



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201974050, 3 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Sidik Puryanto, S.Pd., M.Pd., Dr. Didi Susanto, M.I.Kom., M.Pd.,**

Alamat : Gunung Mulyo RT 01/001 Sarang Kabupaten Rembang, Rembang,
Jawa Tengah, 59274

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Sidik Puryanto, S.Pd., M.Pd., Dr. Didi Susanto, M.I.Kom., M.Pd.,**

Alamat : Gunung Mulyo RT 01/001 Sarang Kabupaten Rembang, Rembang, 9,
59274

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Konflik Dan Gerakan Sosial Di Rembang Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, Dan Lingkungan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Januari 2019, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000157036

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Sidik Puryanto, S.Pd., M.Pd.	Gunung Mulyo RT 01/001 Sarang Kabupaten Rembang
2	Dr. Didi Susanto, M.I.Kom., M.Pd.	Komplek Persada Permai Baru

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Sidik Puryanto, S.Pd., M.Pd.	Gunung Mulyo RT 01/001 Sarang Kabupaten Rembang
2	Dr. Didi Susanto, M.I.Kom., M.Pd.	Komplek Persada Permai Baru



Sidik Puryanto & Didi Susanto

Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang

Pertarungan Ekonomi Politik , Sosial Budaya, dan Lingkungan

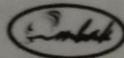


Sidik Puryanto

Didi Susanto

Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang

Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan meniadakan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Konflik Dan Gerakan Sosial di Rembang
(Pertarungan Ekonomi Politik , Sosial Budaya, dan Lingkungan)
Copyright© Sidik Puryanto dan Didi Susanto, 2019

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2019
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo. co. id
facebook: Penerbit OmbakTiga
www. penerbitombak. com

PO. 807.11. '18

Penulis: Sidik Puryanto dan Didi Susanto
Tata letak: Aditya Pradana
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Konflik Dan Gerakan Sosial di Rembang
(Pertarungan Ekonomi Politik , Sosial Budaya, dan Lingkungan)

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019

viii + 133 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-501-5

PEN

BAE

Pem

BA

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ~ vii

BAB 1 KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN ~ 1 Pembangunan Dominan Ekonomi ~ 1

BAB 2 DESKRIPSI GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA ~ 10

- A. Kondisi Daerah ~ 10
- B. Kondisi Lingkungan Pertanian ~ 14
- C. Kondisi Pertanian Wilayah Pegunungan Watuputih ~ 20
- D. Kondisi Sosial Penduduk Kecamatan ~ 24
- E. Kondisi Sosioekonomi ~ 26
- F. Tradisi Budaya ~ 32
- G. Pandangan Masyarakat Desa Tegaldowo terhadap Budaya Modernisasi ~ 42
- H. Sikap Masyarakat Desa Tegaldowo terhadap PT. Semen Indonesia Tbk. ~ 44

BAB 3 GEJALA, SEBAB KONFLIK DAN GERAKAN SOSIAL ~ 50

- A. Konflik Lama ~ 50
- B. Hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk. sebagai Konflik Baru ~ 57
- C. Faktor Lain Penyebab Gerakan ~ 64
- D. Ketidaksiapan Masyarakat dalam Menerima Budaya Baru ~ 67
- E. Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Nasional di Rembang ~ 68
- F. Perbedaan Pandangan Akademisi ~ 69
- G. HAM dan Demokrasi ~ 70

BAB 4 STRATEGI PERLAWANAN ~ 73

- A. Strategi Tindakan Perlawanan ~ 73
- B. Strategi Kelembagaan ~ 75
- C. Membentuk Organisasi Primordial ~ 80
- D. Strategi Dukungan Eksternal ~ 86
- E. Wanita Sebagai Garda Terdepan dalam Gerakan ~ 91

STOP PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI REMBANG

Kajian penelitian ini bertema konflik dan gerakan sosial yang terjadi di Rembang Jawa Tengah terhadap penolakan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. Kajian konflik dan gerakan sosial memiliki relevansi dan berhubungan erat di antara keduanya, dikarenakan setiap konflik pembangunan, gerakan sosial selalu mengiringinya. Pro dan kontra mewarnai dalam setiap proses pembangunan, dikarenakan masing-masing menggunakan paradigma berpikir sesuai dengan konteks pengetahuannya.

Pertenggaran paradigma antara politik ekonomi, sosial budaya dan lingkungan menjadi deretan persoalan dalam setiap konflik pertambangan. Sintesis yang ditawarkan belum menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sering kali sintesis yang dikeluarkan cenderung pilihan antara tesis atau antitesis.

Info dan pemesanan buku-buku **Penerbit Ombak** lebih mudah **secara online**



0821-3766-6614



Marketing_Ombak



Marketing_Ombak



Penerbit OmbakTiga



@penerbit_ombak



PENERBIT OMBAK

Jalan Kumuhuman Nogotirto III,

Kecamatan B. 15 Yogyakarta 55509

ISBN 602-258-501-



Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang

Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sidik Puryanto

Didi Susanto

Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang

Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2018

**Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang
Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan**

Copyright© Sidik Puryanto dan Didi Susanto, 2018

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2018
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo. co. id
facebook: Penerbit OmbakTiga
www. penerbitombak. com

PO. *. **. '18**

Penulis: Sidik Puryanto dan Didi Susanto
Penyunting: Kartika Nurul Nugrahini
Tata letak: Aditya Pradana
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang
Pertarungan Ekonomi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018

+* hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-***-*

PENGANTAR

Kajian penelitian ini bertema konflik dan gerakan sosial yang terjadi di Rembang Jawa Tengah terhadap penolakan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. Kajian konflik dan gerakan sosial memiliki relevansi dan berhubungan erat di antara keduanya, dikarenakan setiap konflik pembangunan, gerakan sosial selalu mengiringinya. Pro dan kontra mewarnai dalam setiap proses pembangunan, dikarenakan masing-masing menggunakan paradigma berpikir sesuai dengan konteks pengetahuannya.

Pertenggaran paradigma antara politik ekonomi, sosial budaya dan lingkungan menjadi deretan persoalan dalam setiap konflik pertambangan. Sintesis yang ditawarkan belum menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sering kali sintesis yang dikeluarkan cenderung pilihan antara tesis atau antitesis.

Penelitian ini meskipun dilakukan di kawasan pegunungan, yang masyarakatnya masih termasuk kelompok pedesaan, namun dalam realitasnya sebagian besar sudah mengenal teknologi kekinian, yang dapat dikatakan di era sekarang tidak ada batasan tentang pengetahuan teknologi modern yang menjadi pembeda dengan masyarakat perkotaan. Gaya hedonis dan memilih barang berdasarkan fashion menjadi gairah bahwa ada bukti modernitas di wilayah tersebut.

Realitas bahwa pertambangan yang ada memang nyata meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Semakin banyak jenis dan macam bidang pekerjaan menciptakan peluang kerja makin banyak dan sebagian masyarakat beralih untuk bekerja selain petani.

Perbedaan dimunculkan bagi petani yang tetap ingin menghargai warisan nilai-nilai ketradisional dari leluhur dan ingin selalu menjaga kelestarian alam dari kerusakan menjadi instrumen untuk menentang setiap usaha pertambangan yang akan masuk kembali ke wilayah mereka. Cukup sejarah pertambangan skala kecil saja yang perlu tumbuh di wilayahnya.

Kekokohan hati dan diamini oleh masyarakat lain, kompak mereka

menyatakan menentang keinginan PT. Semen Indonesia Tbk. membangun pabrik semen di wilayah pertanian mereka. Ibu bumi menurut mereka, semakin rusak dan sebelumnya telah menyisakan berbagai macam persoalan yang sampai saat ini belum selesai.

Protes masyarakat berkembang menjadi gerakan sosial yang masif hingga sekarang. Kekecewaan yang menumpuk dari pengaruh keluhan yang tidak tersampaikan, pemerintah dianggap berpihak kepada korporasi, dan tidak tanggap terhadap permasalahan masyarakat, dampak lingkungan, dan degradasi budaya, ketidakadilan semakin memperkuat semangat untuk terus menentang beroperasinya pabrik semen di Rembang.

Pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai kebudayaan keindonesiaan hendaknya menjadi parameter bagi korporasi sebelum membangun sebuah industri yang berada di wilayah permukiman padat penduduk, yang setiap saat akan mengancam kelangsungan kehidupan nyaman yang telah dibangun sejak daru dahulu kala.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si, yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan tiada henti, Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, yang telah banyak menuntun peneliti bergerak pada ranah filsafati, Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum, yang tiada hentinya memberikan masukan kepada peneliti.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak kepada penulis mendapat imbalan yang terbaik oleh Tuhan YME.

Penulis

2018

BAB 1

KEBERPIHAKAN PEMBANGUNAN

A. Pembangunan Dominan Ekonomi

Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan dari *underdevelopmetalism* menuju *developmentalism* menjadikan banyak Negara yang sedang berkembang mau tidak mau harus ikut tercebur dalam arus kemajuan yang didengungkan oleh Negara yang telah melampaui batas dan telah menjadi jargon industri dunia dengan menerapkan hukum liberal kapital yang hal tersebut sangat belum dipahami oleh negara yang sedang berkembang dan/atau Negara yang masih dalam taraf kemiskinan akut, yang sumber daya manusianya sangat belum mumpuni dalam mengimbangi konsep kemajuan yang seolah dipaksakan. Sebagai jawaban yang jika tidak dilakukan maka yang terjadi adalah negara tersebut akan mengalami de-eskalasi atau kemunduran dari peradaban dunia yang dapat dipastikan akan menghambat tujuan kemajuan bersama sebagai sebuah paradoksisasi zaman.

Banyak Negara kemudian mempercepat kemajuan dengan menjadikan industri pertambangan sebagai pilar utama untuk menopang perekonomian sebuah negara termasuk negara negara Asia dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) terdapat 5 sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan perekonomian yaitu sektor industri pengolahan, industri perdagangan, sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor industri pertambangan.

Namun ketika sektor industri pertambangan bergerak secara progres perdebatan perdebatan muncul. Di satu sisi industri pertambangan di pandang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Negara, di sisi lain industri pertambangan dianggap sebagai suatu masalah dikarenakan dampak yang selalu mengiringinya. Pro dan kontra selalu mengiringi dalam setiap pembangunan industri pertambangan.

Beberapa prespektif yang mendukung pembangunan atau disebut kaum *developmentalism*, memberikan sebuah pandangan tentang kebermanfaatannya dilihat dari faktor ekonomi. Bainton dan Macintyre (2013), dalam hasil penelitiannya di Papua Nugini menemukan bahwa pertambangan telah memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, namun perubahan ekonomi ini, terutama melalui distribusi manfaat dan peluang yang diturunkan dari tambang untuk pengembangan bisnis, telah melibatkan proses pembagian masyarakat dan ketidaksejahteraan yang telah berlangsung sangat lama. Dampak pertambangan yang terjadi di Papua Nugini menciptakan hubungan yang dekat antara kepemilikan lahan, kepentingan lahan dengan kapitalisme, yang kemudian menciptakan pengembangan bisnis yang berkelanjutan di tempat-tempat sumber daya alam.

Sethi, et al. (2011), juga menemukan pada pertambangan emas yang dilakukan oleh *Freeport-McMoran Copper & Gold*, mengutamakan persoalan hak asasi manusia (*human rights*), pemeliharaan masyarakat lokal sekitar tempat pabrik berdiri (*treatment of indigenous people on whose traditional land its mine was located*); pembangunan ekonomi (*economic development*) dan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan, kesehatan dan fasilitas perumahan (*job creation and, improvements in health, education, and housing facilities*) (Kistanto et al. 2012; Maria & Devuyt 2011; Motardero 2007; Regadon 2009).

Pandangan lain menemukan bahwa perkembangan industri pertambangan menimbulkan berbagai macam persoalan, baik pada awal ketika akan dimulainya pembangunan dan pada saat industri sudah berjalan. Persoalan-persoalan yang terkait dengan industri pertambangan adalah munculnya penolakan dari masyarakat sekitar terkait dengan isu-isu yang berkembang sehubungan dengan berlangsungnya pembangunan industri tambang. Konflik pertambangan menjadi referensi setiap inci proses pembangunan.

Penolakan yang memunculkan konflik dan semakin meningkat (eskalasi konflik), bahkan dalam perkembangannya penolakan berujung munculnya gerakan sosial. Dapat dikatakan bahwa setiap pembangunan yang melibatkan pertambangan, baik dalam skala kecil dipastikan menimbulkan berbagai masalah, dan berkembang menjadi konflik lalu berujung pada gerakan sosial, karena di dalamnya pasti mencakup adanya kasus ketimpangan, dominasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Menurut

Singh (2001) gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga-lembaga yang setiap kemunculannya didasari oleh adanya suatu konflik dan pergulatan pergulatan dalam kasus ketimpangan, dominasi, kebebasan, dan keadilan sosial.

Penolakan atau resistensi petani terhadap industri tambang tidak hanya terjadi di dalam negeri bahkan di negara maju seperti di Amerika, Mexico, India, Guatemala pun terjadi. Holden dan Jacobson (2008) dan Ganibay, Boni, Penico, Urquijo, Klooster (2011), menyebutkan bahwa penolakan masyarakat terhadap pertambangan emas di Guatemala dikarenakan isu pencemaran lingkungan, kesenjangan ekonomi, konflik pekerja, dan konflik ekologi, menciptakan oligopoli, imperialisme.

Sebagaimana penelitian Ngadisah (2003), tentang *Konflik dan Gerakan Sosial Politik di Papua* menyebut bahwa penyebab konflik berkembang menjadi gerakan sosial di Papua disebabkan benturan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional yang tidak mampu dipahami oleh masing-masing elemen, baik dari korporasi maupun masyarakat. Kondisi masyarakat lokal yang belum siap menerima perubahan secara cepat menciptakan konflik berkembang mengkristal dan terakumulasi menjadi kerusuhan sosial. Setiap bentuk perubahan yang besar dan terjadi secara tiba tiba yang berakibat merugikan petani akan selalu memancing kemarahan dan akan mengkristal menjadi kerusuhan sosial (Scott 1981).

Banyaknya kasus konflik pembangunan yang berujung munculnya gerakan penolakan dengan bentuk perlawanan bahkan dengan bentuk radikalisme dari masyarakat setempat menandakan bahwa kurang adanya pemahaman yang mendalam (makna filosofis) mengenai konsep pembangunan itu sendiri baik dari masyarakat, korporasi ataupun dari pemerintah. Pembangunan filosofis yang dimaksud adalah pembangunan yang seimbang baik dari konteks ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan (*sustainable development*).

“Sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals while at the same time sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depend. The desired result is a state of society where living conditions and resource use continue to meet human needs without undermining the integrity and stability of the natural systems. Sustainable development ties together concern for the carrying capacity of natural systems with the social, political, and economic challenges faced by humanity.

Sustainability science is the study of the concepts of sustainable development and environmental science. There is an additional focus on the present generations' responsibility to regenerate, maintain and improve planetary resources for use by future generations." (Donovan 2009)

Memang sebuah tujuan yang ambisius, namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa diwujudkan, dan untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan peran dan aktor sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aktor-aktor tersebut sangat diperlukan dalam proses percepatan pembangunan manusia berkelanjutan atau menjadi *agent of change* perubahan, sebagaimana dijelaskan tujuan dari pembangunan berkelanjutan;

The Social Development Goals cover a broad range of social and economic development issues. These include poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment and social justice, (Press release – UN General Assembly's Open Working Group proposes sustainable development goals 2016)

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmnet*) yang selama ini menjadi arah pembangunan yang sebenarnya belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam hal pencapaiannya, terutama bagi masyarakat bawah (*grassroot*). Justru yang selalu muncul mengiringi pembangunan pertambangan adalah kesenjangan, ketidakadilan, lingkungan rusak, kearifan lokal tergerus, pendidikan terabaikan, masyarakat dipinggirkan (*deprivacy*), kemiskinan dan seolah masalah tersebut tidak pernah berhenti meskipun upaya sudah dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) hanya menjadi jargonisasi dan isu yang menarik untuk menghegemoni memperdaya masyarakat dengan embel-embel politik pembangunan berkelanjutan. Rayuan manis dari politisi demi mewujudkan kepentingan dengan bantuan kekuasaan (*power*) yang dimiliki baik secara personal maupun kelompok.

Kebijakan sentralisasi (*top down*) atau kebijakan terpusat yang dianggap melindungi kepentingan yang tidak terlihat baik personal ataupun kelompok menambah tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi jauh dari harapan, dan pembangunan seolah kembali ke zaman klasik yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi dengan dibalut kepentingan politik semata daripada kepentingan universal dan berkesinambungan. Faqih (2005), di negara dunia ketiga, gerakan sosial pada umumnya berkaitan

dengan respons terhadap pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut pembangunan. Namun, pembangunan dipandang oleh rakyat justru menjadi sebab kemacetan ekonomi, krisis ekologi, serta berbagai berbagai kesengsaraan rakyat.

Konsep lain dari pembangunan adalah masih cenderung dominan mengarah kepada konsep pertumbuhan ekonomi, sebagai *the goal achievement* atau tingkat capaian ekonomi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, dan meskipun paradigma pengetahuan sudah mengkritisi, namun dalam faktanya paradigma ekonomi murni masih menjadi dominan (Tjokrowinoto 1996, Soetomo 2006, Usman 2006). Konsep pembangunan harusnya juga belajar memahami sejarah, sebagaimana penelitian Kartodirdjo (1984) dalam *Pemberontakan Petani di Banten* mengemukakan bahwa gerakan petani tidak lagi harus dipahami akibat dari faktor ekonomi semata, namun harus dilihat dalam ranah lain, seperti sosial dan budaya yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai belumlah menjadi pemikiran bagi aktor-aktor pelaku ekonomi, dan seolah sejarah gerakan sosial di Negara ini tidak perlu diperhitungkan efeknya.

Menurut Ngadisah (2003), pembangunan adalah bentuk nilai-nilai baru, yang kemudian jika dipaksakan menimbulkan benturan dengan nilai-nilai lama, dan jika itu terjadi menurut pendapat Scott (1981) masuknya perubahan perubahan yang dianggap terlalu cepat, bagi petani adalah sesuatu yang baru, sehingga jika dipaksakan akan memberikan efek yang nyata seperti perlawanan bahkan berlanjut dengan gerakan sosial (Ngadisah 2003; Silaen 2006).

Kasus konflik semen di Rembang Jawa Tengah dapat dianalisis sesuai dengan konteks sudut pandang mana dilihat. Konteks kebijakan politik menjadi sumber konflik, seperti yang menjadi faktor-faktor konflik. Faktor yang ikut andil menjadi penyebab konflik adalah kebijakan pemerintah yang ada selama ini, masih cenderung memihak tunggal kepada salah satu aktor yaitu korporasi. Akibatnya adalah kebijakan pemerintah selalu berlawanan dengan *actor grassroot*. Ngadisah (2003) & Awang (2005), Dimpos (2006) menyebut bahwa faktor pendorong terjadinya gerakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Menurut Dewi (2006) menyebut bahwa konflik terjadi dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Kebijakan dengan memberikan izin pendirian oleh pemerintah daerah

Rembang dan izin operasional pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. oleh pemerintah provinsi telah mereduksi kepentingan masyarakat yang selama ini ikut menjaga, mengelola dan memanfaatkan lahan perhutani sebagai sarana kebutuhan hidup pokok bagi kebanyakan masyarakat di wilayah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu menciptakan kondisi frustrasi dan kecewa pada masyarakat, tentang bayangan kondisi yang tidak jelas setelah pabrik semen berdiri, bagaimana nasib sebagai petani yang mendulang dengan memanfaatkan lahan perhutani, yang sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, lalu pekerjaan apa yang harus dilakukan untuk menghidupi keluarga mereka. Dugaan kebanyakan masyarakat tentang penghilangan budaya yang telah dilakukan dari generasi ke generasi menciptakan pemikiran yang negatif sehingga menimbulkan ketidaksepahaman tentang persepsi yang kemudian menciptakan kegalauan, kerisauan hati. Menurut Awang (2005), "... ada perbedaan pengetahuan pemanfaatan hutan dan defortasi antara negara dan masyarakat. Negara cenderung pada bentuk perlindungan dan konservasi alam dan masyarakat cenderung pada pemanfaatan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan..."

Isu ekologi lingkungan menjadi sumber konflik, dikarenakan sumber air yang ada di Pegunungan Watuputih mempunyai fungsi yang sangat besar dalam mendukung pertanian di wilayah sekitar. Di perkirakan bahwa dalam potensi ekonomi kegiatan pertanian diakumulasi lebih banyak daripada yang dihasilkan dari sektor pertambangan. Sumber air di CAT Pegunungan Watuputih sangat membantu pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Rembang. Dikhawatirkan dengan penambangan besar-besaran yang dilakukan oleh pabrik semen, sumber air semakin lama semakin habis, dan hal itu akan berdampak buruk bagi masa depan masyarakat. Maka dari itu, mereka berpendapat bahwa kawasan karst di Pegunungan Watuputih merupakan kawasan yang harus dilindungi dan dijaga agar tetap lestari, selain sebagai kekuatan ekosistem alam, Pegunungan Watuputih memiliki fungsi sebagai penampung dan cadangan air sebagai sumber penghidupan masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya (Suharko 2016).

Berdasarkan perspektif hukum, ada tumpang tindih pada landasan hukum yang digunakan. Kontradiktif landasan antara pihak pemerintah dengan Perda lingkungan. Disebutkan bahwa meskipun dalam Perda No.6 Tahun 2010 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang RT/RW Nasional, dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RT/RW

Kabupaten Rembang secara jelas mengatakan Cekungan Air Tanah (CAT) Pegunungan Watuputih termasuk kawasan hutan lindung. Diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 poin menyatakan bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B, yaitu CAT yang berada di lintasan antar-Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, namun pemerintah daerah dengan kebijakannya tetap saja memberikan izin lingkungan kepada korporasi, berdalih pada dasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang otonomi pemerintah daerah. Undang-Undang mengatur tentang pemerintah daerah berhak untuk mengatur kebijakan-kebijakan daerah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsi demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam bingkai NKRI.

Faktor yang membuat konflik semakin *explosive* adalah adanya degradasi unsur nilai. Nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari budaya orang Jawa dihilangkan dalam proses pembangunan, misalnya nilai *tepo sliro*, *ke-egaliter-an*, tidak tampak pada saat proses awal berdirinya pabrik semen, misalkan penduduk tidak mendapatkan hal-hal tentang sosialisasi terlebih dahulu, pihak aparat desa yang berfungsi sebagai transformer terkesan menyembunyikannya, dikarenakan setiap pembangunan selalu menggunakan target bisnis. Pernyataan lain, sudah menjadi kebiasaan bagi setiap pembangunan lebih mengedepankan kepada pemegang kekuasaan alias kewenangan dalam membuat kebijakan, atau *top up* daripada *bottom up*.

Nilai masyarakat desa (*primordialisme*) di sekitar lokasi masih teguh dengan prinsip sebagaimana *wongtani*, masih *mengugemi* budaya tradisional, seperti menolak terhadap perubahan. Maria dkk. (2011), menyebut bahwa konflik yang terjadi di Afrika dikarenakan masih sulitnya masyarakat dalam menerima pencerahan baru dikarenakan masih memiliki pemikiran paternalistik yang bertentangan dengan sesuatu yang baru.

Menurut analisis Gunarwan Suratno (2004), tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yang berkaitan dengan sosial budaya, dengan adanya perusahaan tambang asing maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah sistem sosial budaya yang telah berlaku selama bertahun-tahun dalam masyarakat lokal. Sistem sosial budaya yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma-

norma sosial dan kelembagaan yang mengarahkan dan mengatur perilaku manusia. Beberapa komponen lingkungan termasuk dalam sosial budaya yang memiliki pengaruh akan hadirnya perusahaan pertambangan adalah, (1) keadaan bentuk masyarakat, kualitas dan hubungan di antaranya, (2) hubungan timbal balik antara sosial budaya lingkungan dan sosial ekonomi, (3) perilaku, persepsi, cita-cita dan nilai dari masyarakat.

Selama sepanjang waktu, setiap pembangunan industri pertambangan hanya berorientasi pada kesejahteraan ekonomi semata, sedangkan kesejahteraan sosial budaya politik belum menjadi kebutuhan pokok dalam setiap proses pembangunan. Fakta yang selama ini terjadi adalah ketimpangan sosial, yang tujuan ekonominya semakin meningkat akan tetapi sosial budaya politik makin tertinggal. Dampaknya sangat kurang baik jika pembangunan pertambangan terjadi dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang masih memiliki keeratan terhadap sosial budaya politik primordial, maka banyak kasus perlawanan masyarakat dalam menolak pembangunan pertambangan.

Penguasaan atas sumber daya alam secara perseorangan maupun kolektif seperti hak tanah adat dan hak ulayat biasanya tidak bebas dari kearifan lingkungan atau pengetahuan budaya yang menyangkut pengelolaan lingkungan. Dengan pesatnya kemajuan pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat terutama perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi, maka pranata sosial pun cenderung berkembang. Tetapi perkembangannya tidak secepat perkembangan teknologi sehingga menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat (Jonny Purba 2002).

Satu sisi yang lain, bahwa setiap pembangunan mewujudkan kesejahteraan ekonomi menjadi ukuran dalam setiap prosesnya. Anggapan bahwa ekonomi menjamin kehidupan yang sejahtera dan akan terhindar dari kemiskinan diyakini oleh sebagian masyarakat. Berbagai macam dan jenis lapangan kerja menjadi bumbu manis dalam setiap pembangunan. Sebagian masyarakat yang pro pabrik semen mengatakan dengan adanya pabrik semen meningkatkan tingkat perekonomian mereka, sekarang banyak dari masyarakat memiliki hunian kos bagi pekerja semen, *laundry*, dan warung makan, yang setiap harinya memiliki omset lumayan.

Pendapat lain bahwa dengan adanya pabrik semen di lingkungannya masyarakat bisa memperoleh pekerjaan baru, memberikan harapan baru karena memiliki pekerjaan tetap yang setiap bulan mendapatkan gaji,

dan bagi masyarakat yang berada di sekitar juga memiliki kesempatan mengembangkan pekerjaan lainnya, belum lagi bagi masyarakat yang terkena dampak jual beli lahan memiliki uang berlebih bahkan sangat berlebihan seukuran mereka. Banyak dari masyarakat yang membeli beberapa kendaraan angkut sekaligus, dari hasil penjualan tanah yang mereka punyai, sementara sisanya dibelikan tanah yang baru di daerah lain.

BAB 2

DESKRIPSI GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA

A. Kondisi Daerah

Gunem adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang Jawa Tengah, kecamatan bagian selatan yang berbatasan dengan sebelah timur Kecamatan Sale, sebelah barat Kecamatan Sulang, sebelah utara Kecamatan Pamotan, dan sebelah selatan masuk Kabupaten Blora. Gunem merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang yang berjarak kurang lebih 27 kilometer dari ibu kota kabupaten.

Sarana dapat mengakses ke Kecamatan Gunem, dapat melalui dua alternatif jalan yang menghubungkan langsung dengan Kecamatan Gunem, yaitu dari sebelah barat, melewati jalan beraspal yang menghubungkan dengan Kecamatan Bulu, atau dengan menggunakan jalur dari sebelah utara berhubungan dengan Kecamatan Pamotan. Kecamatan Gunem disebut Kecamatan paling selatan di wilayah Kabupaten Rembang, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blora, dengan hanya dipisah oleh Pegunungan Watuputih.

Kecamatan Gunem dilihat secara administrasi terdiri dari 16 wilayah desa. Setiap desa terbagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dengan jumlah seluruhnya sebanyak 35 RW. Setiap RW terbagi menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 175 Rukun Tetangga (RT).

Desa Tegaldowo merupakan desa dengan jumlah RT dan RW paling banyak dibanding dengan desa lainnya yaitu 6 RW dan 42 RT. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya yang mencapai 1.629,09 hektar atau 20.31 persen dari luas wilayah dan merupakan desa terluas di Kecamatan Gunem. Luas wilayah Desa Tegaldowo ini memang sangat jauh dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Gunem. Desa Kulutan merupakan desa dengan jumlah RT yang paling sedikit. Ini sesuai dengan luas wilayahnya

yang hanya 175.71 hektar dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Desa Sambongpayak.

Tabel 2.1 Kondisi Wilayah Berdasarkan Jumlah RT dan RW

No.	Nama Desa	Luas	RW	RT
1	Kajar	751,64	3	10
2	Timbrangan	401,72	1	8
3	Tegaldowo	1.629,09	6	42
4	Pasucen	624,36	1	9
5	Suntri	221,97	1	9
6	Dowan	810,12	3	10
7	Trembes	526,13	1	10
8	Gunem	369,15	3	13
9	Kulutan	175,71	2	5
10	Sidomulyo	407,17	3	13
11	Telgawah	352,14	1	6
12	Sendangmulyo	811,23	1	9
13	Panohan	371,51	2	8
14	Demaan	201,03	1	8
15	Banyu urip	277,10	3	9
16	Sambongpayak	90,29	3	6

(Sumber: BPS Kecamatan Gunem 2016)

Moda transportasi umum belumlah mencukupi, seperti angkot yang hanya beroperasi dalam pelayanan hanya sampai siang, jika sudah sore hari akan sulit dijumpai dan itu pun hanya beberapa jumlahnya, pada malam hari jasa angkutan yaitu ojek manual. Kebanyakan moda transportasi yang dipakai masyarakat sekitar dengan menggunakan motor roda dua, mobil pribadi ataupun mobil *pick up* yang biasa dipakai mengangkut barang, bahkan di daerah Tegaldowo kendaraan *truck* menjadi moda transportasi yang sangat spesial bagi masyarakat, karena disamping dapat memuat banyak barang karena kelebaran bak truk, selain itu, truk adalah kendaraan yang kuat untuk menjangkau daerah tersebut, naik turun, di samping kanan kiri tampak jurang yang cukup dalam.

Faktor sarana transportasi umum yang belum memadai, jalanan yang sempit dan banyak tikungan tajam, juga menjadi kendala perjalanan bagi masyarakat sekitar, jika tidak hati-hati dan sabar, kecelakaan pun sering tidak terelakkan. Bagi yang mengendarai kendaraan roda empat

harus sering mengerem, kemudian bergeser ke sisi yang lebih pinggir lagi jika dari arah berlawanan berjumpa dengan kendaraan sejenis atau yang lebih besar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti serempetan, adu spion. Masyarakat yang memilih berkendara motor roda dua, kewaspadaan dan kecermatan menjadi kunci dalam keselamatan, sering terjadi kekagetan pada saat melewati tikungan tajam di saat dari arah berlawanan muncul kendaraan lain secara tiba-tiba, membuat jantung berdegup kencang, sambil seraya memaki ataupun mengucap “*syukur tidak apa-apa*”.

Akses dari Kecamatan Pamotan menuju Kecamatan Gunem agak mudah menemukan moda transportasi umum meski hanya di pagi hari sampai siang, tidak halnya dengan keterhubungan dengan Kecamatan Sulang. Moda transportasi yang menghubungkan dua Kecamatan tersebut lebih sulit dijumpai. Di samping sulit, biaya juga lumayan mahal, sekitar 20–25 ribu rupiah untuk dapat mencapainya, hanya dengan jarak sekitar 7 km, setara dengan jarak 70 km di jalan pantura. Memang cukup sulit dan lumayan mahal, namun dibandingkan dengan keindahan alam yang dijumpai sungguh sangat terbalaskan. Pohon pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, perkebunan tebu, hamparan sawah yang luas, dan pohon *ental/keling* penghasil *legen* banyak dijumpai pada jalur Gunem Sulang.

Bagi masyarakat yang *tidak* menjumpai satupun moda transportasi, ada pasukan ojek yang selalu siap mengatarkan ke mana tujuan, walaupun harus mengeluarkan kocok yang sangat lumayan, antara 50 ribu rupiah atau bahkan bisa lebih, bergantung dari kesepakatan. Memang terkadang muncul kata “*mata duitan*” karena mahalnya biaya jasa transportasi yang ada, namun begitu dipadukan dengan alasan mereka yang selalu berdalih bahwa zaman sekarang 10 ribu, 20 ribu tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, BBM gak ada yang premium, mahal, dan sebagainya, seolah wajar juga alasan yang keluar dari mulut mereka, meski bisa disebut “*polos*”, namun sulit untuk diingkari bahwa fakta memang demikian.

Namun kondisi tersebut sungguh sangat berbeda dengan sebelum tahun 1990-an atau antara tahun 2005, beberapa sumber yang mengatakan bahwa, dulu transportasi yang menghubungkan Gunem dan Pamotan sangat mudah dijumpai, tiap hari banyak yang *ngetem* (berhenti untuk menunggu penumpang) di depan Pasar Gunem, bahkan dari Desa terpencil dalam cakupan Desa Tegaldowo dan sekitarnya selalu ada setiap hari, karena dulu

memang belum banyak sekolahan di sana, dan harus ke Lasem atau Pamotan jika lanjut ke tingkat sekolah menengah ke atas.

Memang dalam kenyataannya benar juga, di sekitar tahun 1990-an banyak siswa yang berasal dari daerah Gunem belajar di sekolah menengah, baik di Pamotan maupun Lasem dan bahkan di pusat Kota Rembang. Banyak teman sekolah penulis pada masa itu yang berasal dari daerah Gunem dan sekitarnya.

Berkurangnya moda transportasi umum juga dikarenakan faktor *membudaknya* moda transportasi jenis sepeda motor menjelajah daerah terpencil, sangat diminati oleh pengguna, karena selain memudahkan juga sangat melancarkan kegiatan penduduk di sekitarnya. Kondisi terpencil, bagi penantang adrenalin akan sangat menikmati kondisi jalan yang berliku-liku, naik turun, yang bisa memberikan kepuasan bagi yang suka tantangan.

Kondisi jalan dan jarak tempuh dari masing desa di wilayah Kecamatan Gunem juga memengaruhi kapasitas angkutan umum yang ada di wilayah tersebut, dan lebih memilih motor sebagai moda transportasi sehari-hari, karena selain mudah, juga dirasa sangat cepat dan sangat sesuai dengan medan jalan di wilayah mereka. Berikut gambaran jarak desa di wilayah Kecamatan Gunem.

Tabel 2.2 Kondisi Jarak Desa dengan Kecamatan Gunem

No.	Nama Desa	Jarak dengan Kecamatan
1	Kajar	18 km
2	Timbrangan	12 km
3	Tegaldowo	10 km
4	Pasucen	13 km
5	Suntri	9 km
6	Dowan	7 km
7	Trembes	3 km
8	Gunem	1 km
9	Kulitan	1 km
10	Sidomulyo	1 km
11	Telgawah	2 km
12	Sendangmulyo	2 km
13	Panohan	3 km
14	Demaan	6 km
15	Banyuurip	6 km
16	Sambongpayak	8 km

(Sumber: data BPN Rembang 2016)

B. Kondisi Lingkungan Pertanian

Kecamatan Gunem memiliki luas daerah sekitar 8.020,34 hektar, yang terbagi 15,83 persen digolongkan daerah persawahan, dan 84,17 persen lainnya tergolong bukan sawah. Dengan rincian lahan sawah 1.269,33 hektar, dan lahan bukan sawah 6.751,01 hektar. Perbandingan antara sawah dan bukan sawah sekitar 1:6. Berikut tabel hasil luas lahan berdasarkan klasifikasi tanah, baik tanah sawah maupun tanah yang disebut tanah kering.

Tabel 2.3 Klasifikasi Lahan Berdasarkan Kegunaan

No.	Nama Desa	Tanah sawah	Tanah kering	Jumlah
1	Kajar	54,75	696,89	751,64
2	Timbrangan	96,11	305,61	401,72
3	Tegaldowo	104,49	1.524,60	1.629,09
4	Pasucen	47,49	576,87	624,36
5	Suntri	66,66	155,31	221,97
6	Dowan	105,29	704,83	810,12
7	Trembes	168,33	357,80	526,13
8	Gunem	82,44	286,71	369,15
9	Kulutan	68,32	107,39	175,71
10	Sidomulyo	135,72	271,45	407,17
11	Telgawah	32,73	319,41	352,14
12	Sendangmulyo	85,98	725,25	811,23
13	Panohan	77,72	293,79	371,51
14	Demaan	55,25	145,78	201,03
15	Banyuurip	41,94	235,16	277,10
16	Sambongpayak	46,12	44,17	90,29

(Sumber: BPN 2016)

Lahan bukan sawah/lahan kering terbagi dalam beberapa jenis, meliputi tegalan, dan daerah persilan. Tegalan atau tegal menurut pandangan masyarakat adalah lahan yang hanya spesifik bagi tanaman selain padi, seperti jagung kacang-kacangan. Tegal menurut masyarakat Desa Tegaldowo adalah lahan tanam yang berada di Pegunungan Watuputih. Tegalan termasuk lahan kering, bukan berarti lahan yang tidak bisa ditanami, namun lahan yang mengandalkan air hujan sebagai sumber penghidupannya. Lahan persilan disebut juga dengan daerah hutan yang bisa ditanami dengan tanaman hortikultura, atau komoditas pangan warga sekitar, seperti padi, jagung, kacang, ketela, dan jenis sayuran, seperti kacang panjang, sawi.

Lahan persilan banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanami berbagai tanaman yang bisa membantu kebutuhan pangan keberlanjutan. Banyak masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gunem yang menyewa lahan persilan dengan jumlah yang bisa sangat luas, dan bergantung dari seberapa kemampuan untuk mengolahnya. Biasanya dengan hasil dari lahan persilan, akan sangat membantu menambah penghasilan petani.

Lahan sewaan di daerah persilan desa biasanya dilakukan transaksi dalam model sewa, dengan mantri atau mandor perhutani yang mempunyai binaan di daerah tersebut. Mantri yang memiliki daerah binaan memiliki tanggung jawab tentang pengelolaan wilayah hutan masing-masing, yang meliputi menjaga kelestarian hutan, dengan menanam hutan kembali jika ada kerusakan, baik dari kejadian alam atau pasca penebangan resmi.

Tabel 2.4 Spesifikasi Lahan Kering Menurut Penggunaan

No.	Spesifikasi Lahan Kering	Penggunaan
1	Tegalan	Lahan milik pribadi, fungsi lahan pertanian palawija, misal: mayoritas jagung, jenis kacang-kacangan, padi <i>gogo</i> .
2	Persilan	Lahan sewa dari milik perhutani, fungsi lahan mayoritas jagung dan ketela pohon.

(Sumber: Olah Data Primer 2018)

Hasil sewa lahan oleh mantri ke petani, biasanya dilakukan kesepakatan umum (karena tidak ada aturan tertulis dalam sewa penggunaan lahan). Biaya yang dikeluarkan petani juga tidak banyak, hanya sebesar ratusan ribu per hektar. Karena dianggap biaya sangat murah, jika dibandingkan dengan sewa di selain lahan persilan, maka banyak masyarakat yang menginginkan lahan persilan ini.

Berdasarkan hasil kalkulasi antara modal dan hasil yang didapat, sewa lahan persilan sangat menguntungkan. Petani bisa mendapatkan untung berlipat-lipat. Dengan fakta tersebut maka tak jarang petani selalu menggarap sewa lahan persilan, dan bahkan bisa jadi akan sangat mempertahankan lahan persilan yang dia miliki jika ada orang lain yang mau menyerobot lahannya, tapi itu bahkan jarang sekali terjadi. Petani selain mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh, para mantri pun diuntungkan dengan dibantu pengelolaan. Dari pengelolaan yang selama ini dilakukan petani, lahan persilan menjadi subur, karena pemupukan ikut

dengan tanaman yang dipunyai petani.

Mantri dan mandor pun juga diuntungkan dengan model gratis tenaga dalam penanaman hutan kembali. Karena, biasanya memang sudah menjadi kesepakatan bahwa setiap petani yang mengambil lahan persil harus ikut bertanggung jawab memelihara, menanam hutan kembali, tanpa ada jasa penanaman dari mantri atau mandor. Meskipun ada kesan tidak adil, namun petani tetap saja mematuhi, karena kesepakatan sebelumnya, dan tidak ada petani yang mengingkarinya, karena efeknya bisa kembali ke petani, seperti tidak diberikan lagi lahan persil. Kekuasaan yang sewenang-wenang sebenarnya.

Kecamatan Gunem selama tahun 2014 memiliki data curah hujan sebesar 1.699 mm dengan jumlah curah hujan 90 hari. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember (543 mm). Pada bulan September sampai dengan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

Tabel 2.5 Data Statistik Curah Hujan Kecamatan Gunem

Uraian	Satuan	2014	2015
Luas	Ha	8.020,34	8.020,34
Ketinggian wilayah	m dpl	60-550	60-550
Hari hujan	Hari	90	-
Curah hujan	mm	1.699	-

(Sumber: Distanbunakikan Kabupaten Rembang 2016)

Lahan sawah yang ada di wilayah Gunem Rembang, kebanyakan termasuk sawah tadah hujan. Hanya beberapa daerah yang mendapat irigasi dari Waduk Panohan yang ada di Desa Panohan, yang letaknya di bukit sebelah selatan Desa Panohan. Waduk Panohan termasuk tempat penyimpanan air yang paling besar di Gunem Rembang, selain tempat penampungan kecil lain yang ada di beberapa desa di Kecamatan Gunem Rembang.

Struktur geografis yang kebanyakan dengan perbukitan, akan sangat sulit juga di Kecamatan Gunem dibangun waduk dalam jumlah yang banyak, sekapasitas waduk Panohan misalnya. Hanya beberapa desa yang bisa menikmati irigasi dari waduk Panohan, di antaranya Desa Sendangmulyo, Desa Panohan, dan Desa yang ada dibawah waduk.

Sawah-sawah yang terkena aliran dari Waduk Panohan memiliki beberapa kesempatan ditanami padi. Petani biasanya bisa menanam padi

tiga kali dalam setahun. Sebagian juga memanfaatkan lahan pertaniannya untuk ditanami selain padi, misalnya, jenis sayuran, ada kacang panjang, sawi, lombok, dll. dan tanaman buah, seperti melon, semangka.

Sawah tadah hujan hanya memiliki kesempatan menanam padi satu kali dalam setahun, diteruskan dari kebanyakan tanaman palawija, seperti kacang-kacangan, tomat. Kebanyakan petani yang mempunyai lahan tadah hujan menciptakan pengairan sendiri dengan membuat sumur *bur*, dengan kedalaman berkisar di atas rata-rata 15 m.

Sumur-sumur yang diciptakan oleh masyarakat, akan sangat membantu dalam pengelolaan tanaman pertanian. Sebagaimana prinsip hidup petani, yaitu dapat bertahan hidup dengan cara bertani. Air adalah sumber utama keberlanjutan pertanian. Petani masa sekarang sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Sebagian petani dalam pengelolaan lahan pertaniannya sudah memiliki paradigma baru, yaitu beralihnya beberapa hal penting ke era modernisasi. Berubahnya ke era modernisasi terlihat dalam penggunaan teknologi pertanian.

Petani era sekarang sangat terbantu dengan teknologi peralatan pertanian. Jika dulu alat untuk membajak sawah masih menggunakan bantuan tenaga sapi, kerbau, dan menggunakan alat yang disebut *luku*, sekarang kebanyakan petani sudah beralih dengan *traktor*. Memang sangat membantu dalam pengelolaan lahan pertanian, dengan efektif dan efisien. Meskipun sekarang traktor bisa didapat melalui sewa, namun bagi sebagian petani sudah banyak yang memiliki alat tersebut.

Tugas petani lebih ringan lagi, sekarang dalam soal panen padi, sudah terbantu dengan alat pemroses padi, yang disebut *blower*. Alat ini mempunyai multifungsi, fungsi memotong tanaman padi, sekaligus memproses hasilnya yaitu padi. Alat ini sungguh sangat efisien, dan bisa menekan biaya panen petani, yang dari sebelumnya dalam proses panen padi, masih menggunakan tenaga manusia, minimal 15 orang yang ikut memanen, sekarang bisa menggunakan sekitar 1 atau 2 orang untuk menjalankan mesin.

Hitungan 15 orang manual, dengan estimasi biaya sekitar Rp70.000 x 15 orang, ditambah biaya makan sehari 3 kali, biaya rokok, jajan, akan jauh lebih hemat jika menggunakan mesin. Cukup waktu hanya beberapa jam, hemat biaya, dan sekaligus hasil padi lebih bersih, dan siap dijual atau siap diproses melalui pengeringan untuk selanjutnya dijadikan simpanan kebutuhan makan sehari-hari. Selain pemikiran bisnis, penghematan dalam

biaya operasional pengelolaan pertanian, sebagian petani di era sekarang, mulai beralih ke tanaman bisnis. Tanaman bisnis antara lain: melon, cabai, tomat, tembakau. Jika dulu kebanyakan petani masih menggunakan era lama dalam pertanian, sekarang sudah beralih ke era baru dalam bertani.

Era baru pertanian adalah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tanaman pertanian yang bisa memberikan hasil yang memuaskan akan sangat disukai oleh petani di era sekarang, yang tidak menguntungkan akan segera ditinggalkan. Tanaman yang menjadi komoditas tinggi adalah melon dan cabai. Kebanyakan petani sangat membanggakan melon, jangka waktu pendek, dan rata-rata panen yang dihasilkan luar biasa. Selain melon ada tanaman cabai, panen bisa berkali kali, dan jika waktu harga tinggi bisa selangit, keuntungan berlipat-lipat.

Beralihnya pertanian tradisional menuju pertanian modern, memberikan kontribusi pada alasan gerakan sosial berkelanjutan hingga sekarang. Petani dengan gigih ingin mempertahankan tentang prinsip dasar petani, tanah dan air adalah sebagai sarana pokok dalam dunia pertanian. Jika tanah dan air hilang maka kehidupan agraris akan punah. Mereka berpikir bagaimana kelangsungan hidup setelah tanah air tidak ada. Selain melon dan cabai yang menjadi andalan tanaman komoditas di beberapa desa di Kecamatan Gunem, tembakau juga terbukti menjadi komoditas tanaman yang memiliki hasil menguntungkan sejak beberapa tahun terakhir.

Beberapa petani berpendapat bahwa selama 6 tahun terakhir komoditas tembakau memiliki daya pikat yang baik bagi masyarakat sekitar pegunungan kapur. Hasil panen yang didapat cukup memberikan kepuasan. Banyak masyarakat di daerah Desa Suntri, Desa Dowan, Desa Tegaldowo, dan Timbrangan, (Ring 1: bagian otokrasi dari pabrik semen) menyukai tanaman tembakau ini. Jika dilihat dari letak geografis dan ekologi, daerah di sekitar Ring 1 ini memang cocok untuk budi daya tembakau. Dengan curah hujan antara 1500–2000 mm/tahun, suhu udara antara 21–32 derajat celcius, kemudian didukung dengan pH tanah di antara 6–9, dan di ketinggian antara 25–50 m di atas permukaan laut, sangat memungkinkan sebagai habitat yang cocok untuk tanaman tembakau.

Tembakau memang jika dilihat dari kebutuhan air, tidak terlalu banyak membutuhkan limpahan air. Hanya saja kondisi tanah jangan sampai kering benar, dan jika itu terjadi, diperlukan adanya penyiraman. Tembakau menjadi komoditas pertanian yang dilakukan petani di daerah

Desa Tegaldowo dan sekitarnya sejak enam tahun terakhir. Tembakau menjadi tanaman setelah panen padi. Sekitar bulan April sampai dengan Desember, karena melewati beberapa tahapan penanaman.

Pembibitan dilakukan sejak awal bulan April, selama sebulan atau lebih, untuk mendapatkan hasil bibit yang bagus dan maksimal untuk ditanam. Sambil menunggu pembibitan selesai, biasanya dipersiapkan lahan penanaman. Biasanya petani membuat *gulutan* dengan lebar tanah sekitar 30 cm, panjang menyesuaikan dari posisi lahan, biasanya memanjang dari ujung satu ke ujung lain. Selesai membuat tempat tanam, petani mulai mempersiapkan penanaman awal. Setelah bibit cukup tanam, dilakukan penanaman. Proses penanaman yang dilakukan petani masih dengan menggunakan cara tradisional, seperti menggunakan *taju*, sebagai tombak untuk membuat lubang di tanah.

Pemikiran pertanian modern petani di daerah Tegaldowo, memberikan pemahaman bahwa petani sangat bisa dijadikan tumpuan hidup masyarakat di daerah sekitar. Hal ini sangat berbeda dengan filosofi kapitalisme, bukan industri yang diinginkan, namun perkembangan pertanian atau modernisasi pertanian. Harusnya ada dorongan dari berbagai pihak, untuk menciptakan pembangunan keberlanjutan tanpa ada lagi kerusakan alam. Hal itu yang justru bukan menyelesaikan, bahkan akan menghilangkan keberlanjutan pertanian. Berikut data pertanian Kecamatan Gunem di tahun 2015.

Tabel 2.6 Data Pertanian Kecamatan Gunem

Uraian	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Rata rataproduksi (kw.ha)
Padi			
Padi sawah	1.738	10.774	61,99
Padi ladang	700	2.450	35,14
Palawija			
Jagung	3.750	16.305	43,48
Ubi kayu	1.710	25.573	149,55
Kedelai	136	104	7,65
Kacang tanah	15	14	9,33

Holtikultura			
Mangga	222	350	15,76
Pisang	344	3.650	106,10
Kedondong	3	2	6,67
Jambu biji	200	300	15,0
Nangka	416	95	2,28
Cabe besar	41	36	8,78
Petai	6	12	20,0
Melinjo	2	1	5,0
Perkebunan			
Kelapa	240	5.920	246,67
Tebu	265	25	0,94

(Sumber: Distanbunakikan 2016)

Peternakan di wilayah Kecamatan Gunem juga memiliki peran penting di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk di Kecamatan Gunem memelihara berbagai jenis ternak. Kambing ternak yang diperlihara mulai dari sapi, kambing, ayam, dan beberapa jenis unggas lainnya. Pada tahun 2015 ternak ayam memiliki peningkatan sejak 2014, dari 38.060 ekor menjadi 43.376 ekor. Jumlah sapi di tahun 2015 cenderung menurun, dari tahun 2014 sekitar 8081 menjadi 5.083. Berikut perbandingan jumlah ternak dan unggas di tahun 2015 dan tahun 2014.

Tabel 2.7 Jumlah Hewan di Kecamatan Gunem

Jenis hewan	Tahun 2014	Tahun 2015
Ayam Broiler	37.500	37.500
Ayam Kampung	38.060	43.376
Sapi Potong	8.081	5.083
Kambing	8.944	9.722
Domba	7.515	10.045
Itik	4.429	5.729
Kelinci	137	155
Kerbau	157	119

(Sumber: Distanbunakikan Kabupaten Rembang 2016)

C. Kondisi Pertanian Wilayah Pegunungan Watuputih

Desa Tegaldowo memiliki luas area yang bisa disebut salah satu desa terbesar di wilayah Kabupaten Rembang, dengan luas lahan 1.629 ha, dengan pembagian lahan sawah 104, dan lahan bukan sawah 1.524. Lahan

seluas itu merupakan lahan tadah hujan, dengan estimasi curah hujan 2000 mm/tahun.

Lahan bukan sawah didominasi oleh daerah pegunungan Watuputih, yang berada di sebelah selatan desa. Banyak orang melihat sebagai lahan kering, namun tidak bagi warga sekitar. Karena pertanian jagung sangat tumbuh subur pada musim sekarang, dan petani rata-rata memanen dua kali dalam setahun.

Sepanjang 3 km, Pegunungan Watuputih terbentang dari sisi barat ke timur, di sisi sebelah timur Pegunungan Botak, yang mengelilingi dan merupakan batas Desa di wilayah Tegaldowo, Suntri, dan Dowan. Pegunungan Watuputih juga memisahkan Desa di bagian selatan yang sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Blora, di bagian sebelah timur masuk wilayah Kecamatan Sale.

Pegunungan Watuputih menjadi *geger* sejak 2012 hingga sekarang, disebabkan oleh masuknya pabrik semen Gresik, kemudian berubah menjadi Semen Indonesia Tbk. *Geger* Watuputih menjadi perhatian nasional dan internasional, karena merupakan efek domino dari kejadian di Pati beberapa waktu yang lalu. Pegunungan Watuputih kaya batu kapur, yang jika dilihat secara awam memang terlihat tampak warna putih batuan kapur. Meskipun demikian, sebagian masyarakat memperoleh hasil pertanian yang melimpah dari batuan kapur Watuputih.

Hasil yang didapat dari hasil tanaman jagung sangat melimpah, dan bagi masyarakat Tegaldowo dijadikan tanaman komoditas primer, selain padi. Estimasi hasil panen dari tanaman jagung per hektar mencapai sekitar lima sampai tujuh ton. Jika selama musim tanam bisa tiga kali panen, kalkulasi hasil jagung yang diperoleh adalah sekitar 20 ton per tahun.

Hasil yang diperoleh masyarakat Desa Tegaldowo bertambah berlipat, selain menggarap tegalan milik sendiri, mereka kebanyakan menyewa lahan persilan. Semakin luas lahan persilan yang disewa, makin menambah pendapatan yang masuk ke kantong mereka. Terkenal dengan sebutan masyarakat peramu, ahli dalam bertani, sebagian masyarakatnya selalu mencari lahan persilan hingga ke pelosok di luar desa. Jangkauan penyebaran dalam mencari lahan persilan baru hingga ke lain kecamatan, bahkan sudah menjangkau wilayah lain kabupaten.

Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban menjadi pangkalan lahan berikutnya. Bagi masyarakat yang sudah terbiasa hidup bertani dan mengandalkan kehidupan mereka dari hasil pertanian, memang sudah

menjadi keharusan. Sebagai ciri dari *sosial animal*, yang harus mampu bertahan hidup dalam kondisi apa pun.

Kebanyakan petani yang memiliki jiwa, prinsip hidup, budaya petani sering kali harus melawan pada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan jiwa mereka. Karena mereka sudah menganggap, apa yang menjadi budayanya paling benar. Kebanyakan mereka menolak jika harus mengubah apa yang telah menjadi prinsip hidup mereka.

Persilan dari Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, dan Kecamatan Sarang juga menjadi target dari sebagian masyarakat Tegaldowo untuk memenuhi pertanian mereka. Bahkan beberapa orang bertempat tinggal di lahan persilan mereka, hingga proses pembubakan sampai penanaman selesai, dan tak jarang yang tinggal hingga musim panen tiba. Desa Tegaldowo dan Pegunungan Watuputih, Pegunungan Botak memiliki hubungan sangat erat. Tampak keakraban sejarah ada dalam diri mereka. Bertiganya saling membutuhkan satu sama lain (*symbiosis mutualism*).

Desa Tegaldowo, bisa dicapai dari dua arah. Jalur yang pertama bisa dilalui dari Kecamatan Gunem dengan radius sekitar 12 km. Kondisi jalan beraspal, dan cukup bagus, kadang naik, kadang turun menukik. Terdapat dua kelokan yang sangat tajam, di samping kiri kanan jurang yang cukup lumayan dalam. Sebelum mencapai Desa Tegaldowo, terlebih dahulu melewati Desa Dowan dan Desa Suntri. Tampak di samping kiri, hijau pepohonan yang terlihat di pegunungan Botak, kemudian di sisi kanan tampak jauh panorama di bawah yang indah. Dapat dilihat bangunan pabrik semen, dan perumahan penduduk desa di bawah.

Sejuk dan pemandangan yang indah, kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan tidak bisa diukur dengan ekonomi, keindahan sangat berkaitan dengan kesenian, kenyamanan. Keseimbangan ekologi pertanian tumbuh dari sejarah masa lalu menuju sejarah modern. Keseimbangan terusik dengan hadirnya pabrik semen di Gunem Rembang.

Kenyamanan tidak bisa diukur dengan harta berlimpah, uang banyak, namun kenyamanan hanya dapat diukur dengan kerelaan hati, kerendahan hati. Bagi yang berpihak pada konservatif, kenyamanan adalah *absolute*, dan tidak bisa dibeli atau digadai dengan apa pun. Jalur yang kedua, bisa dilalui dari arah barat, yang menghubungkan dengan Kecamatan Bulu, Kecamatan Sulang, hingga ke Kabupaten Kota Rembang pada jalan Blora. Sebalah barat Desa Tegaldowo ada Desa Timbrangan, dan Desa Pasucen, sebelah selatan ada Desa Kajar.

Desa Tegaldowo sangat dekat dengan Pegunungan Watuputih, letaknya persis di belakang perumahan penduduk. Saking dekatnya, masyarakat memiliki ikatan sangat erat, mereka berpikir jika gunung rata dengan tanah, akibat dampak pabrik semen, apa yang bakalan terjadi. Sejarah pegunungan Watuputih akan menjadi sejarah yang tidak bermakna. Hilangnya pegunungan Watuputih akan disebut sebagai hilangnya ciri Desa Tegaldowo yang selama ini memiliki kaitan sejarah yang kuat.

Menjulang tinggi sekitar 15 meter, bagaikan paku Bumi di sisi selatan, di satu sisi Gunung Botak. Kekuatan alam yang mengagumkan. Kekuatan alam yang bernasib tragis, karena mesin-mesin kapitalis mengeruk sumber daya alam demi keuntungan berlimpah. Alienasi, keterpurukan, ketidakadilan menjadi stigma baru yang akan muncul di peradaban baru, peradaban yang memihak pada kehancuran alam dan menggantikannya dengan setitik madu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.

Desa Tegaldowo terbagi dalam enam dukuhan, yang masing-masing dukuhan dipimpin oleh kepala dukuh (*kamituwo*). Yaitu Dukuh Ngablak, Dukuh Nduko, Dukuh Tegaldowo, Dukuh Ngeluh, Dukuh Ngrencong, dan Dukuh Karanganyar. Masing-masing dukuhan mempunyai pimpinan dukuh atau kadus, yang tugas pokoknya adalah mengelola, menjaga masing-masing wilayahnya di bawah struktur tertinggi desa yaitu Kepala Desa.

Dukuh Tegaldowo merupakan dukuh *krajan* dari Desa Tegaldowo, atau disebut Dukuh Krajan karena memiliki arti penting menurut sejarah desa. Disebut *cikal bakal* Desa Tegaldowo berasal dari Dukuh Tegaldowo. Dukuh Tegaldowo berada di tengah-tengah desa, diapit oleh Dukuh Ngablak, Dukuh Nduko, dan Dukuh Karanganyar.

Dukuh Tegaldowo tepat berada di kaki Pegunungan Watuputih, yang terlihat pada saat ini, tanaman jagung menghijau tinggi, tampak tegalan *terassering*, bagaikan piramida hijau, berderet dari satu ujung ke ujung yang lain, mencerminkan kehidupan melimpah di lahan yang kering, tapi bukan di lahan yang tandus. Limpahan hasil alam yang tiada pernah habis termakan usia, dan bisa diwariskan kepada anak cucu dan turunannya.

Tabel 2.8 Data Hasil Pertanian Palawija di Pegunungan Watuputih

Uraian	Hasil (ha)
Palawija	
Jagung	5–8 ton
Ketela	15–20 ton

(Sumber: Olah Data Sekunder 2018)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, selain tanaman yang jagung dan ketela, beberapa tanaman pertanian lainnya juga menjadi komoditas masyarakat di sekitar Pegunungan Watuputih, dan biasanya disebut tanaman tumpang sari atau dengan kata lain tanaman yang ditanam tidak memiliki kelebihan akan hasil, seperti kacang panjang, kacang tanah dan cabai, dikarenakan di samping daerah pegunungan yang menjulang tinggi, dan hanya mengandalkan hujan sebagai unsur pengairan alami.

Pernyataan bahwa di daerah pegunungan atau tanah yang berbatu sering disebut tanah yang tandus, sering tidak benar, justru pada tanah yang berbatu memiliki kandungan mineral yang sangat bagus bagi tanaman, dan kandungan mineral yang terkandung tidak akan pernah habis.

D. Kondisi Sosial Penduduk Kecamatan

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Gunem pada 2015 mencapai 23.780 jiwa, terdiri dari 11.899 jiwa penduduk laki-laki dan 11.881 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Tegaldowo yang mencapai 5.119 jiwa, sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Desa Telgawah dengan jumlah 528 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kecamatan Gunem keseluruhan.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kecamatan Gunem Tahun 2016

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah penduduk		
			Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Kajar	432	686	680	1.366
2	Timbrangan	468	733	760	1.493
3	Tegaldowo	1.523	2.545	2.547	5.119
4	Pasucen	175	472	439	911
5	Suntri	388	691	698	1.389
6	Dowan	421	818	764	1.582
7	Trembes	575	989	939	1.928
8	Gunem	672	1.017	1.062	2.079
9	Kulutan	159	281	265	546

10	Sidomulyo	501	742	796	1.538
11	Telgawah	145	261	267	528
12	Sendangmulyo	379	632	608	1.240
13	Panohan	362	611	587	1.198
14	Demaan	343	606	610	1.216
15	Banyuurip	329	529	540	1.069
16	Sambongpayak	190	286	292	578

(Sumber: BPS Kabupaten Rembang 2016)

1. Data Pendidikan

Menurut data pendidikan di Kecamatan Gunem, di tahun 2014/2015 jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 3.368 orang, tercakup di beberapa sekolah yang tersebar mulai dari SD/MI sampai dengan level sekolah menengah atas atau sederajat. Terdapat 43 sekolah di Kecamatan Gunem, terdiri dari 17 TK swasta, 20 SD Negeri, 2 SLTP Negeri, 2 MTs swasta, 1 SMK swasta dan 1 SMK Satap di Desa Tegaldowo. Jumlah guru yang tersebar di sekolah Kecamatan Gunem sebanyak 305 orang, 42 guru TK/RA, 167 guru SD/MI, 64 guru SLTP/MTs, dan 32 guru SMK.

Berikut tabel jumlah murid dan guru yang tersebar di beberapa sekolah di Kecamatan Gunem.

Tabel 2.10 Data Sekolah, Siswa dan Guru di Kecamatan Gunem

Uraian	TK/RA	SD/MI	SLTP/MTs	SMK
Sekolah	17	20	4	2
Murid	608	1.862	664	234
Guru	42	167	64	32

(Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunem 2016)

2. Data Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Gunem tersebar di berbagai desa di wilayahnya, di wilayah terpencil yang jauh dari kota terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu), meliputi 4 Pustu yaitu Pustu Desa Gunem, Pustu Desa Trembes, Pustu Desa Demaan, Pustu Desa Tegaldowo. Pustu atau Puskesmas pembantu memiliki fungsi sentral sarana kesehatan di pedesaan, atau perwakilan Puskesmas induk yang berada di kecamatan.

Setiap Pustu terisi oleh beberapa tenaga medis, bidan dan perawat dengan dipimpin oleh satu koordinator Pustu. Kegiatan pelayanan di Pustu dilakukan pada waktu pagi hingga siang. Pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan pada Pustu, namun dapat diberikan oleh tenaga medis lain

seperti dokter, bidan yang membuka praktik secara mandiri. Berikut data kesehatan Kecamatan Gunem.

Tabel 2.11 Data Kesehatan Kecamatan Gunem

Uraian	Banyaknya
Puskesmas	1
Pustu	4
Posyandu	46
Polindes	13
Bidan praktik	13
Dokter umum	1
Perawat	4
Bidan	16
Bidan desa	16

(Sumber: UPT. Puskesmas Gunem 2017)

E. Kondisi Sosioekonomi

1. Ekonomi Pertanian

Mayoritas masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya adalah petani (*peasants*). Petani dalam arti sesungguhnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan proses proses mengolah bumi, mengambil hasil dari apa yang sudah dikeluarkan oleh bumi. Golongan petani di dalam struktur masyarakat pertanian di wilayah Desa Tegaldowo dan sekitarnya adalah sebagai berikut.

No.	Golongan petani berdasarkan tanaman pertanian	Spesifikasi tanah dan sistem tanam	Prediksi hasil dalam luas per ton
1	Padi	Tanah sawah, sekali tanam	1 ha/ 5–8 ton
2	Jagung	Tanah tegalan, 2 x panen	1 ha/ 5–7 ton
3	Cabai	Tanah sawah, sekali tanam	1 ha / 1–2 ton
4	Ketela	Tanah persilan	1 ha/ 20 ton
5	Tembakau	Tanah sawah	1 ha/ 1–2 ton

(Sumber: Olah Data Sekunder 2018)

Petani di sekitar Desa Tegaldowo, seperti dijelaskan, bahwa di samping memiliki tanah sawah, tanah tegalan, mayoritas masyarakat juga menyewa lahan persilan, dengan estimasi masing-masing 1 hektar lahan, dan itu bergantung dari mekanisme pengelolaan masing-masing. Tanaman yang

dihasilkan oleh petani, terutama padi selain menjadi kebutuhan pangan primer, baik di masa sekarang dan di masa mendatang hingga musim panen berikutnya. Kebiasaan masyarakat di daerah Desa Tegaldowo terhadap padi adalah dengan menyimpan dalam kondisi kering, agar awet dan tahan lama, dan tidak menjadi komoditas sebelum masa panen datang lagi.

Tanaman lain yang disebut menjadi komoditas adalah tanaman jagung, ketela, cabai, dan tembakau. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat tidak menghendaki tanaman seperti cabai dan tembakau, dengan alasan bahwa hasilnya tidak bisa digunakan untuk membantu memberi pakan ternak sapi, mereka lebih senang menanam jagung, karena bermanfaat bagi ternak ternak mereka.

Bagi masyarakat yang mayoritasnya memelihara sapi, pakan sapi adalah hal yang sangat penting bagi kelangusungan hidup hewan sapi. Sapi bukan diambil tenaganya seperti masyarakat tradisional yang menggunakan tenaga sapi untuk bajak sawah. Sapi-sapi yang ada di Desa Tegaldowo dan sekitarnya sengaja dipelihara untuk memanfaatkan daging, agar dalam jangka waktu tertentu bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian awal sapi.

Sapi yang bisa dipelihara oleh masyarakat adalah tipe sapi yang kurus, sapi betina agar berkembang biak. Selain sapi, hewan peliharaan lain yang disukai oleh masyarakat adalah ayam dan bebek. Gambaran hewan ternak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13 Hewan Ternak Berdasarkan Komoditas Ekonomi

No.	Jenis hewan ternak	Pemanfaatan ekonomi
1	Sapi	Komoditas jangka menengah, sekitar 6 - 12 bulan
2	Ayam	Komoditas jangka pendek
3	Bebek	Komoditas jangka pendek

(Sumber: Olah Data Sekunder 2018)

Hubungan tanaman pertanian dengan hewan ternak disebut sistem tumpang sari dalam sistem pertanian. Memanfaatkan satu sisi, dengan keuntungan dua kali lipat. Modal satu, dua kali hasilnya. Seperti jagung dengan sapi, jagung dengan ayam dan bebek. Hasil tanaman yang dipergunakan untuk komoditas perkenomian sehari-hari petani (jangka pendek) terutama hasil pertanian jagung, sedangkan cabai dan tembakau

bisa disebut sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi lumayan tinggi. Hasil tanaman melimpah jika harga pasar bagus. Sebab itulah petani kebanyakan beralih dari jagung ke cabai dan tembakau. Dari hasil panen, jika dirupiahkan, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14 Hasil Panen Dan Estimasi Jumlah Rupiah

No.	Hasil panen	Rp	Estimasi hasil (ton/ha)	Jumlah dalam rupiah
1	Jagung	3000/kilo	5-6 ton/ ha	15-18 juta/ ha
2	Cabai	20.000/ha (harga bergantung pasar)	1-2 ton	20 jt/40 jt
3	Ketela	1600/kilo	20 ton/ha	26 juta
4	Tembakau	40.000-70.000	1-2 ton	40-70 juta

(Sumber: Olah Data Primer 2018)

2. Ekonomi Kreatif

Selain memiliki keseharian sebagai petani, sebagian masyarakat Desa Tegaldowo juga memiliki profesi lain. Hal ini disebabkan, adanya dukungan fasilitas pasar desa, dan berdirinya tambang tambang kecil atau galian C, yang sudah ada sejak 1996. Berbagai profesi lain yang dimaksud adalah pedagang besar dan pedagang kecil, UMKM, penjual jasa, buruh, tukang batu, tukang kayu, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dll. Bagi kebanyakan bidang pekerjaan lain, didominasi oleh para pendatang, seperti pedagang, warung kopi, tukang batu, UMKM, yang sudah bertempat tinggal lama di Desa Tegaldowo.

Sebab lain yang bisa dijadikan alasan, bahwa pendatang bisa sukses di Desa Tegaldowo berkaitan dengan sejarah desa. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pendatang akan sukses karena riwayat Wali Desa, yaitu Mbah Ronggodito (*cikal bakal desa*) adalah pendatang, dan barang siapa yang mau berusaha dan sering berziarah di Makam Mbah Ronggodito dan berdoa, makan doanya akan terkabul.

Perekonomian Desa Tegaldowo meningkat sejak adanya pasar desa yang berdiri tahun 1988, dan adanya tambang desa yang berskala kecil, dan berikut muncul pabrik semen. Jasa angkutan truk semakin banyak, jasa bengkel, dan toko kelontong baik besar maupun kecil, dan warung kopi semakin membeludak. Berikut jenis dan bentuk pekerjaan, yang semakin meningkat sejak adanya tambang kecil atau galian C, berikut dengan jumlah.

Table 42.15 Industri UMKM

No.	Jenis UKM	Jumlah
	Industry kecil	
1	Industri jajanan	3
2	Industri makanan	6
3	Industri minuman	1
Jenis pertokoan		
1	Toko bangunan	1
2	Toko kelontong besar	3
3	Toko kelontong kecil	5
Jenis jasa		
1	Jasa angkutan truk	30
2	Jasa travel	2
3	Jasa angkutan umum	2
4	Jasa selep jagung	3
5	Jasa selep padi	1
6	Bengkel sepeda motor	5
7	Bengkel truk	1
Jenis warung kecil		
1	Warung makan	3
2	Warung kopi	23

(Sumber: Data Arip Desa 2016)

3. Pasar Desa sebagai Pusat Transaksi Ekonomi

Pasar Desa Tegaldowo dibangun sejak 1988, yang menghubungkan perekonomian desa sekitar dengan daerah luar. Pasar yang berada di tengah-tengah Desa Tegaldowo, dan lokasinya tepat di beberapa desa sekitar, seperti Desa Dowan, Desa Suntri, sebelah utara, Desa Timbrangan, Desa Kajar di sebelah barat, merupakan ekosistem yang menguntungkan. Pasar Desa Tegaldowo, bisa disebut sebagai pasar besar, sentra kulakan barang dari bakul luar daerah yang datang tiap hari pasaran. Bagi masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang kecil sangat diuntungkan dengan hadirnya pasar. Perputaran uang bisa membantu penduduk sekitar dalam berdagang.

Setiap hari pasaran yaitu hari Senin dan Kamis, banyak pedagang dari luar yang datang berjualan di pasar desa. Datang dari Pamotan, Blora dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, bisa colt maupun truk, datang dengan rombongan disebut *mbalokan*. Suasana ramainya pasar membuktikan roda perekonomian desa berjalan sungguh sangat baik. Semua elemen saling terhubung dan saling berintegrasi dalam sistem perekonomian, dengan bersumber pada banyaknya pabrik tambang.

Jika pada pagi hari, jalannya perekonomian ada di pasar, di warung-warung kopi, dan pada sore hingga malam geliat roda ekonomi terdapat pada penjual mie ayam, penjual bakso, penjual lalapan yang berada di pinggiran terminal desa. Desa Tegaldowo disebut desa yang memiliki potensi ekonomi tinggi, semuanya didukung oleh sumber daya alam. Sejak tahun 1996 tambang galian C mulai beroperasi, seperti tambang batu tras, tambang batu gamping, batu andesit, dan tambang pasir urug.

Potensi ekonomi tinggi dengan didukung sarana pasar desa, menghasilkan sumber penghasilan baru bagi masyarakat dalam mendongkrak perekonomian mereka, selain hasil pertanian sehingga varian-varian baru dalam bidang pekerjaan merebak ke pelosok desa, dan varian baru ini lebih mudah, lebih gampang, cukup modal sudah jalan. Berbeda jika dalam pertanian, yang di samping membutuhkan biaya, mengolah tanah, menunggu hasil, baru bisa menikmati hasil. Bagi masyarakat yang instan, waktu tersebut sungguh sangat lama, lebih enak menjadi pedagang, atau jualan, atau membuka warung kopi, dengan praktik jual beli lebih mudah mendapatkan uang dengan cepat.

Perbedaan paradigma dalam bisnis dan pertanian memang sangat berbeda. Di satu sisi ingin cepat dapat, di sisi lain perlahan tapi pasti dapat. Dan pasar menjadi tempat kerukunan bagi perbedaan paradigma tersebut, yaitu sebagai sarana pertukaran ruang dan kondisi yang saling terkait. Pasar memberikan ruang diskusi, ruang adu gagasan, ruang memberi dan menerima, dan pasar mampu menerapkan solusi atas perbedaan paradigma yang muncul di tengah masyarakat.

Faktor lain adalah lokasi desa yang strategis berada di tengah-tengah, mudah dijangkau dari desa yang berada di sebelah utara maupun desa yang ada di sebelah barat. Dukungan sarana transportasi, dan jalan yang cukup baik, memudahkan dan mempercepat pergerakan roda mencapai daerah tujuan.

Selain pasar sebagai fungsi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan material masyarakat, pasar juga memiliki fungsi penyebaran budaya. Pasar dipandang sebagai strategi yang mudah terhadap masuknya budaya baru di dalam masyarakat Tegaldowo dan sekitarnya. Budaya baru yang sangat tampak adalah perilaku ekonomi dan modernisasi gaya konsumtif.

Perilaku ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan selain bertani, yaitu dengan berdagang, penjual jasa, dsb. Perilaku ekonomi juga menimbulkan efek adanya persaingan bisnis di kalangan masyarakat, karena didorong

nilai hedonisme sudah merasuk kedalam nilai kehidupan mereka. Instan, mementingkan hasil dan dengan proses yang cepat, dan nafsu untuk meraih kesuksesan seperti orang lain, menimbulkan persaingan kadang menciptakan persaingan yang berujung negatif.

Misalnya, satu orang memiliki usaha dagang sukses, maka orang lain berbondong-bondong meniru seperti yang orang lakukan. Contoh, jasa cucian motor, warung kopi, toko kelontong kecil. Di sisi lain bisnis dalam dunia pendidikan sangat kurang diminati, seperti lembaga belajar mandiri di sekitar wilayah lima desa hanya ada satu.

Gaya konsumtif merupakan budaya yang sangat mudah berasimilasi, mudah diterima. Gaya hidup kepemilikan benda-benda simbol kemewahan, seperti mobil, sepeda motor bagus sudah menjadi perilaku konsumtif masyarakat sekitar. Penggunaan teknologi mobil menjadi tren di kalangan anak muda, dan *global fashion* merebak, baik pada anak-anak maupun level di atasnya.

Budaya baru yang sangat tampak adalah pada gaya berpakaian yang *fashionable* yang dipakai oleh para ibu, pada saat mereka dalam suasana santai, hanya dengan celana pendek dan singlet, berleenggok santai di jalan seolah memiliki kebanggaan dengan dikatakan sebagai orang kota. Dan bagi remaja dan gadis yang modern, gaya yang dipakai jins ketat, dikombinasikan singlet ketat, meski tak tampak padanan warna, yang penting keindahan menurut mereka. Dengan ponsel di saku celana depan atau belakang menambah kemolekan bagi siapa saja yang melihatnya.

Pemandangan lainnya yang menjadi cerminan bergesernya kebudayaan pedesaan, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam studi etnografi. Studi tentang perubahan sosial budaya masyarakat desa.

4. Ekonomi dan Stratifikasi Sosial

Lingkungan pedesaan yang ada di wilayah Desa Tegaldowo memiliki kesamaan dengan wilayah lain dalam melihat tingkat atau status sosial masyarakat. Hampir semua masyarakat melihat nilai status sosial bergantung pada tingkat ekonomi. Masyarakat yang kaya memiliki prestise yang tinggi dibandingkan masyarakat yang miskin. Bagi masyarakat miskin, orang kaya dianggap bisa memiliki kemewahan yang berwujud kebendaan (material), dan non material, misalnya jabatan.

Jabatan oleh masyarakat miskin disebut sebagai barang yang diperjualbelikan, misalkan kepala desa dan semua perangkat, PNS, aparat

keamanan Polisi dan TNI, bisa dibeli oleh orang yang memiliki harta kekayaan banyak. Atau dengan kata lain, dengan memiliki harta yang melimpah, banyak kesempatan untuk memiliki jabatan tersebut.

Bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, nilai jabatan memiliki penghargaan yang berbeda, dalam cara pandang mereka. Baik dari segi struktur desa, sosial, dan faktor lain, misalnya kepatuhan akan hukum. Dalam struktur masyarakat pedesaan, nilai status sosial tertinggi adalah kepala desa, disusul perangkat desa, kadus dan struktur di bawahnya. Dari nilai sosial, guru dan tenaga medis memiliki nilai yang lebih tinggi. Pada kepatutan hukum, aparat TNI POLRI memiliki prestise yang tinggi pula.

Menarik sekali, bahwa ada sebagian masyarakat, lebih menilai TNI POLRI justru memiliki nilai yang paling tinggi di antara semua profesi. Pandangan masyarakat ini lebih pada ranah hukum. Aparat TNI POLRI dianggap sebagai roh kekuasaan, pemaksaan, kebenaran absolut, dan berhak atas senjata. Maka sering kali yang muncul nilai-nilai ketakutan, kecemasan (*rezim Orba*). Selain beberapa status sosial dilihat nilai pengharganya, masih ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang menonjol dalam stratifikasi sosial, yaitu tokoh masyarakat, kiai/ulama, dan dukun.

F. Tradisi Budaya

Sebelum deskripsi sosial budaya ditulis, terlebih dahulu dijelaskan kenapa masyarakat Desa Tegaldowo paling serius melakukan gerakan sosial menolak pabrik semen, agar tidak terjadi multipersepsi. Meskipun dalam setiap gerakan masyarakat Tegaldowo didukung olah beberapa masyarakat sekitar, seperti sebagian besar dari Desa Timbrangan, sangat kecil dari Desa Pasucen, namun dampak langsung jika benar-benar terjadi eksploitasi besar besaran pada Pegunungan Watuputih, akan sangat dirasakan oleh masyarakat Tegaldowo, karena selain lokasi yang paling dekat, yaitu di sebelah selatan desa, disamping itu sebagian masyarakatnya sudah memiliki pandangan yang luas tentang pengetahuan lingkungan, sehingga wajar jika mereka kritis terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak benar, dibandingkan dengan daerah terdekat lain, seperti Desa Kajar.

Penulis, dalam menyusun kajian sosial budaya dan ekonomi membagi struktur kelembagaan masyarakat di Desa Tegaldowo, menyerempet ke masyarakat sekitarnya, membagi tipe kelembagaan kelompok masyarakat menjadi tiga kelompok, (1) masyarakat pra-konflik, (2) masyarakat era

konflik, (3) masyarakat pasca-konflik. Kajian yang akan ditulis adalah soal sosial budaya dan ekonomi masyarakat menurut kelompok tersebut.

Masyarakat pra-konflik disebut dalam penelitian ini untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa Tegaldowo sebelum berdirinya pabrik semen. Dilihat dari karakteristiknya, masyarakat yang ada di Desa Tegaldowo dan sekitarnya disebut sebagai masyarakat pegunungan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat tradisional.

Karakteristik masyarakat pra-konflik, sebagaimana teori struktural fungsional melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Masyarakat berada dalam sistem sosial yang memiliki norma-norma sebagai konsensus bersama. Konsensus mekanistik, tanpa meletakkan dasar status, semua individu adalah sama, tanpa ada perbedaan yang menjadi perdebatan.

Ciri lain dari masyarakat struktural fungsional adalah (1) masyarakat merupakan satu kesatuan, dan masing-masing saling berinteraksi, (2) hubungan masing-masing bersifat satu arah yaitu keseimbangan, dan di dalamnya terdapat unsur timbal balik, (3) integrasi yang terjadi di masyarakat senantiasa menimbulkan ketegangan ketegangan, dan penyimpangan penyimpangan, tetapi akan dapat dinetralisasikan dengan lewat proses pelembagaan, (4) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian, (5) sistem diintegrasikan lewat kepemilikan nilai-nilai yang sama (Zamroni 1998).

Kehidupan masyarakat Desa Tegaldowo sebelum konflik mencerminkan kehidupan yang taat pada konsesus. Kehidupan yang menghargai akan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Norma-norma dalam bermasyarakat menjadi pandangan hidup, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Nilai-nilai luhur tradisional masih sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Tegaldowo dan sekitarnya. Nilai kegotongroyongan, nilai kerukunan, nilai keterbukaan, nilai menghormati pendatang, nilai menjaga tradisi/budaya leluhur.

1. Nilai Kerukunan Gotong Royong

Nilai kegotongroyongan, sebagai bentuk saling kerja sama, saling membantu, saling berinteraksi, saling memahami kesulitan satu sama

lain, masih sangat kental hingga kini. Masing-masing saling menyadari, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam setiap kegiatan baik tradisi kebersihan desa, keagamaan, atau bahkan dalam kegiatan panen desa. Kegiatan gotong royong di Di Tegaldowo pada saat panen, banyak tetangga yang saling membantu, dan tidak diberi upah, karena besok bergantian. Jika pada zaman dahulu membantu dengan memikul jagung, tapi sekarang menggunakan sepeda motor.

Gotong royong juga tampak dilakukan pada saat ada tetangga yang mau mendirikan rumah baru, masyarakat lain dengan sadar saling membantu, bisa disebut *sambatan*. Kebanyakan para lelaki yang ikut dalam kegiatan ini, sedangkan para ibu hadir sebelumnya, dengan membawa beberapa bahan pokok untuk meringankan yang punya hajat. Kegiatan gotong royong, pada intinya dilakukan untuk membantu masyarakat yang punya niat *hajat*. Misalkan pada kegiatan *mantu* (proses pernikahan), *nyunat* (proses khitan). Sebelum konflik masyarakat sangat memelihara nilai kegotongroyongan, namun setelah adanya konflik yang menimbulkan pertentangan di masyarakat, nilai-nilai gotong royong mulai berubah. Gotong royong dilakukan pada masyarakat yang terkotak akibat konflik. Kelompok pro dan kontra saling terpisah.

2. Nilai Toleransi

Kerukunan dan kegotongroyongan sebenarnya memiliki substansi yang sama, yaitu interaksi sosial dalam kelembagaan masyarakat. Yang membedakan adalah pada tujuan masing-masing, kerukunan cenderung memihak pada toleransi, sedangkan gotong royong menciptakan harmonisasi berupa tindakan.

Kerukunan yang melekat pada masyarakat Desa Tegaldowo, terjadi pada sikap toleransi antarwarga dalam menentukan ideologinya. Contoh nilai kerukunan yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pada kegiatan *ambengan/kenduren*. Nilai-nilai kerukunan masyarakat sangat kental pada saat sebelum konflik.

Kegiatan *ambengan/kenduren* pada masyarakat sebelum konflik, dilakukan setiap ada kegiatan keagamaan, misalkan *suronan, ruwahan*, dll. Setelah konflik pabrik semen, nilai-nilai kerukunan mengalami perubahan. Contoh lain nilai kerukunan adalah, pada saat panen tiba, setiap masyarakat mempunyai kerukunan dengan memberikan sedikit hasil panen, hasil palawija, untuk diberikan ke tetangga sekitar. Meskipun jumlahnya tidak

banyak, namun kerukunan memiliki peran penting dalam sistem sosial. Disebut bahwa masyarakat di Desa Tegaldowo sebelum konflik, memiliki ikatan emosional yang sangat kuat sehingga dalam setiap kegiatan apa pun selalu saling berintegrasi satu sama lain, dan menjalin kerja sama satu sama lain.

3. Nilai Keterbukaan (Jujur)

Nilai kejujuran sangat menjadi pokok interaksi pada masyarakat tradisional pada masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya. Kejujuran dan keterbukaan memiliki makna yang sangat penting. Kebanyakan masyarakat pedesaan memang menghindari jenis perbuatan tidak jujur. Ketidakjujuran terjadi pada masa konflik, contohnya adalah pada saat pabrik semen berdiri, beberapa komponen tokoh masyarakat seperti elemen pemerintahan desa, mulai dari kepala desa dan perangkat, bahkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten menutupi informasi yang sebenarnya. Pada saat beberapa pemuda datang dan bermaksud menanyakan, namun justru jawaban yang diterima tidak memuaskan.

Ketidakjujuran terjadi juga pada saat pihak-pihak terkait dalam melakukan sosialisasi tidak disertai penjelasan pada masyarakat dengan sebenarnya. Masyarakat memiliki hak untuk tahu, namun beberapa komponen tokoh pemerintahan justru memberikan respons yang negatif. Nilai kejujuran merupakan ciri masyarakat struktural pedesaan, karena kejujuran adalah modal sistem sosial akan berjalan dengan baik. Ketidakjujuran menciptakan keretakan sosial, kemudian kerusakan sosial (*sosial disorder*), dan gerakan sosial (*sosial movements*).

4. Tradisi Menghormati Tamu/Pendatang

Masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Tegaldowo memiliki tradisi selalu menyambut tamu yang datang ke rumah mereka. Tradisi ramah tamah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar memiliki tujuan bentuk saling menghormati, saling menghargai kepada masyarakat pendatang. Mereka tidak memedulikan soal status tamu yang datang (Hefner 1990). Karena mereka memiliki pandangan bahwa semua tamu adalah sama, dari keturunan yang sama.

Pendatang atau tamu yang datang wajib dihormati, dihargai. Perlakuan terhadap pendatang/tamu harus sangat baik agar tidak menimbulkan kekecewaan, jika tamu kecewa maka rezeki pun tidak terbawa. Pandangan

ini berkaitan dengan ideologi mereka, yaitu menghormati tamu, melayani tamu dengan sangat baik artinya bersedekah, dan jika semakin banyak bersedekah gantinya akan lebih banyak. Syarat pendatang/tamu agar masyarakat menghargai, adalah bertamu dengan adat istiadat yang telah dilakukan sesuai tradisi masyarakat sebelumnya. *Kulonuwun*, *nuwunsewu*, bahasa yang digunakan Jawa alus (*kromo inggil*), sebagai bentuk penghargaan dari pendatang/tamu kepada pemilik rumah yang dituju.

Mengetuk pintu dahulu sebelum masuk ke dalam rumah, adalah adat bertamu. Ketuk pintu memberikan makna bahwa sebelum bertamu harus memberitahu terlebih dahulu sebelumnya. Meminta izin masuk ke dalam rumah, menghormati rumah sebagai nilai tempat tinggal yang harus dihormati, dihargai sebagaimana menghargai diri masing-masing.

Perilaku yang baik juga menjadi syarat diterima di dalam masyarakat pegunungan. Kerendahan hati sebagai seorang pendatang harus dilakukan, jika tidak tanggapan masyarakat juga berbeda. Perilaku jujur juga memberikan motivasi masyarakat untuk menghargai pendatang/tamu.

Beberapa waktu yang lalu, penulis bertamu ke salah satu rumah masyarakat, dan seperti kebiasaan yang dilakukan, bentuk penghormatan, penghargaan memang sangat tinggi. *Sugatan* yang diberikan, dan sambutan yang dilakukan memberikan makna mendalam sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap pendatang/tamu yang datang.

Nilai-nilai menghargai tempat tinggal orang lain dalam bertamu dirasa sangat kurang, bagi pendukung gerakan, pada saat datangnya pendatang, yaitu pabrik semen. Nilai modernisasi semestinya tidak bertabrakan dengan nilai-nilai primordial, agar dalam menyambut pendatang bisa diterima dengan baik.

Bagaimana perilaku masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya terhadap pabrik semen, mencerminkan bahwa saling menghargai kebudayaan sangat diperlukan, untuk menjaga sistem sosial agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Budaya yang dibawa oleh pendatang hendaknya bisa menyesuaikan/beradaptasi dengan budaya masyarakat, dan bukan sebaliknya.

5. Tradisi Sedekah Bumi

Sedekah bumi atau syukuran atas apa yang dikeluarkan oleh bumi, mengartikan bahwa manusia selama hidupnya harus selalu bersyukur

kepada Sang Pencipta, atas apa yang telah diberikan berupa panen yang melimpah. Sedekah bumi bagi masyarakat petani merupakan sebuah hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena petani menikmati hasil panen yang tumbuh dari bumi. Bagi kebanyakan petani, sedekah bumi adalah hal yang wajib. Bahkan sebagian masih memiliki keyakinan, ada efek negatif bagi sebuah desa jika tidak melaksanakan sedekah bumi.

Sedekah bumi bisa diartikan menghormati bumi, menghargai bumi, dikarenakan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh bumi untuk membantu petani hingga masa panen tiba. Bumi akan memberikan hasil bagi petani jika petani mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bumi. Begitu juga sebaliknya, disebut petani dan bumi sebagai perilaku transaksional yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

Bumi dan petani adalah bentuk integrasi mekanik. Integrasi mekanik adalah integrasi yang berdasar aturan atau norma-norma sejarah, yang sudah terjadi di masa lampau. Nilai norma harus menjadi sebuah konsensus atau kesepakatan bersama, tanpa ada batas yang membedakan antarindividu. Semua individu berlaku hukum yang sama, yang membentuk sebuah struktur sosial yang baku. Tidak ada kekuasaan dan kewenangan dari super ordinasi, yang ada adalah kesetaraan sosial, saling terintegrasi adalah absolut. Integrasi antara bumi dan petani menciptakan sistem kehidupan yang berdasarkan struktur fungsionalnya. Bumi dan petani adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Petani akan sangat marah ketika ibu bumi dirusak. Bumi harus dilestarikan, sebagai bentuk penghargaan kepada bumi. Bumi rusak, hilang maka petani juga musnah.

Sedekah bumi adalah tempat bertemunya individu, kelompok, lembaga, di suatu desa dalam satu kesatuan pada waktu dan tempat yang sama. Melupakan perbedaan, semua adalah sama dalam kedudukan, status. Tidak ada dominasi dan didominasi. Semua memiliki kesadaran masing-masing tentang kebersamaan. Kebersamaan hak dan kewajiban dilebur menjadi komunitas bebas nilai. Sedekah bumi biasanya dilakukan setelah masa panen padi tiba. Namun dikarenakan musim panen sekarang tidak menentu, sedekah bumi dilakukan setelah bulan syawal, yaitu *selo*. Bulan *selo* disebut dalam bulan *jowo*. Sedekah bumi dilakukan setiap tahun sekali. Bagi masyarakat Desa Tegaldowo, hari di mana dikatakan sebagai pesta desa. Isi kegiatannya adalah dengan menampilkan beberapa kesenian, seperti ketoprak, orkes dangdut, dan setelah itu kegiatan pengajian.

Kegiatan lain adalah tumpengan, yang dilakukan di *punden desa*.

Tumpengan terbagi dalam dua bagian, pertama tumpengan bagi masing-masing kepala rumah tangga, yang dibawa bersama-sama dengan seluruh masyarakat lainnya menuju *punden desa*, yang kedua adalah tumpengan yang berasal dari masyarakat berupa *takir kecil*, dibentuk piramida, kemudian diarak ramai-ramai dengan dipikul oleh empat orang, menuju *punden desa*. Kegiatan tumpengan dilakukan bersamaan dengan pentas kesenian ketoprak. Bisaanya sebagai syarat, sebelum pentas ketoprak dimulai, diadakan kegiatan sindiran/tayuban di *punden desa*, dengan menabuh peralatan musik tayub, kemudian diikuti dengan tarian ledek/penyanyi dalam langgam Jawa.

Kegiatan tumpengan, tayuban di *punden desa* dilakukan dengan maksud menghormati, menghargai leluhur desa, atau disebut cikal bakal desa. Disebut juga sebagai interaksi multidimensi antarmanusia dengan sejarah leluhur, yang masih berlangsung hingga sekarang, dan diteruskan di masa mendatang dan seterusnya. Penghormatan petani terhadap bumi, selain sedekah dusun adalah kegiatan syukuran sebelum masa tanam, syukuran habis masa tanam, dan masa panen. Untuk tetap menjaga sistem keharmonisan antara bumi dan petani diperlukan *integrasi mekanik* saling menghormati, saling bekerja sama, dan saling membutuhkan tanpa ada batas sosial yang mengikat dan memaksa.

6. Tradisi Sampurbawur

Tradisi *sampurbawur* adalah tradisi *bancaan* [selamatan, red.] yang dilakukan untuk menolak bencana (*tolak bala*). Menurut sejarah, tradisi *sampurbawur* ini dilakukan untuk menghormati sejarah *begede lodaya*. *Begede lodaya* adalah simbol dari seekor hewan disebut macan gembong. “Rumiyen turene mboten wonten *bancaan sampurbawur, begede lodaya ngrusak*”. *Begede lodaya* adalah simbol keangkuhan, kesombongan, yang dimiliki oleh kekuasaan. Kekuasaan yang digunakan dalam kesombongan, keangkuhan berakibat pada kerusakan dan kezaliman. Agar tidak merusak maka diadakan kegiatan *sampurbawur*, sebagai bentuk interaksi sosial agar terwujud suatu sistem sosial yang baik.

Bancaan sampurbawur biasanya dilaksanakan pada hari *jumat legi*, setelah tumbuh *kembang alang-alang*. *Bancaan* berupa jajanan buatan masyarakat sendiri. Seperti *apem*, *gedhang*, *telo*, dll.

7. Tradisi Kaleman

Tradisi *kaleman* adalah kebisaan yang dilakukan oleh petani untuk menghargai Bumi dengan mengadakan syukuran yang berupa hasil

tanaman yang dihasilkan oleh Bumi. Misalkan nasi tumpeng, ketela rebus, jagung, ganyong, dll. Tradisi *kaleman* tidak menggunakan jajan-jajanan. Tradisi *kaleman* khusus dilakukan oleh petani, dari hasil panen tanaman yang ditanam di bumi Tegaldowo. *Bucu kendit* adalah tumpeng yang dibalut oleh *angus dandang* (warna hitam), dan tidak bisa dimakan. *Bucu kendit* dibuat hanya pada waktu *kaleman*. “*Kaleman niku namung dilaksanaake petani. Bancaanipun nggih sedoyo hasil panen petani*”.

Selain *kaleman*, tradisi lain yang dijumpai di daerah Jawa khususnya di Tegaldowo, di antaranya *pahingan*. *Pahingan* bisaanya dilakukan untuk menghormati *rojo koyo* seperti sapi, kerbau. Dulu ada perbedaan dalam memperingati *pahingan*, kerbau pada Rabu Pahing, sedang sapi pada Jumat Pahing. Tradisi *pahingan* bisanya dilakukan oleh petani yang memiliki hewan *rojo koyo*, dengan mengalungkan ketupat, lepet, sebagai bentuk sedekah dengan tujuan menghindari *tolak balak*, atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada hewan peliharaan.

8. Agama

Hampir seluruh masyarakat Desa Tegaldowo beragama Islam. Islam di Tegaldowo terbagi dalam beberapa kelompok, NU dan Muhammadiyah, dan Islam abangan. Pada dasarnya, menurut sejarah kebanyakan masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya cenderung ke abangan. Namun, seiring dengan perkembangan, Islam NU menjadi mayoritas, abangan bergeser menjadi Islam abangan.

Muhammdiyah dibawa oleh pendatang yang umumnya dari kota, dalam perkembangannya tidak signifikan terhadap masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya, karena di samping termasuk hal yang baru bagi masyarakat, tradisi yang ada pada Muhammadiyah tidak sejalan dengan NU sehingga kebanyakan masyarakat menolak.

Salah satu alasan kenapa NU mudah diterima oleh masyarakat adalah strategi dalam penyebarannya. Menurut sejarah NU adalah sebagai partai politik, NU sudah melakukan strategi dengan mengadakan pertalian dengan kiai-kiai pedesaan dalam memperkenalkan gaya politik keagamaan yang mereka miliki. Santri-santri dikirim ke daerah-daerah terpencil di seluruh penjuru daerah, dan kemudian mengorganisasikan kegiatan kegiatan pengajian dan meletakkan dasar dasar pendirian cabang partai (Hefner 1999).

Meskipun dasar pendirian NU adalah dengan pendekatan partai

politik, namun strategi yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu dengan tujuan utama adalah dengan melakukan pendekatan “merebut hati dan pikiran masyarakat” sehingga ajarannya mampu membaur dengan tradisi kejawen masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya. Seperti doa dalam acara sedekah bumi, tingkeban, dan adat-adat lain yang di dalamnya diisikan cara pandang Islam. Selain itu, kebanyakan tokoh agama yang menjadi acuan ajaran, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama di kota yang NU juga.

Secara kuantitas, karena kesulitan mencari kondisi yang sebenarnya tentang jumlah pastinya, namun estimasinya antara jumlah Islam Muhammadiyah dengan Islam abangan, lebih banyak Islam abangan daripada Islam Muhammadiyah. Karena dari sejarah budaya, golongan abangan atau kejawen adalah agama leluhur nenek moyang dan tentu saja masih ada sebagian masyarakat yang mengagungi tradisi tersebut sampai sekarang.

Merangkum beberapa pendapat dari wawancara yang mendalam, meskipun di data statistik tercantum bahwa mayoritas agama masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya adalah Islam, namun dari data wawancara Islam yang dimiliki masyarakat Tegaldowo terbagi dalam tiga golongan, seperti yang disampaikan tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya memang harusnya dilakukan kajian yang mendalam lagi terkait dengan budaya agama pada masyarakat Desa Tegaldowo. Kenapa Muhammadiyah tidak berpengaruh banyak pada masyarakat di sana, dan adakah golongan Islam lain yang masuk atau tidak, dan kesulitan apakah yang dialami oleh golongan baru yang mau masuk ke daerah Tegaldowo dan sekitarnya?

Data yang diperoleh penulis, tentang sulitnya golongan baru masuk, pada suatu waktu, ada yang masuk yaitu Islam LDII, namun dalam prosesnya banyak masyarakat yang menolak, hingga akhirnya terjadi pengusiran terhadap golongan tersebut, dan sampai sekarang tidak terdengar lagi kabarnya.

9. Budaya Pendidikan dan Kesehatan

Masyarakat Desa Tegaldowo memiliki ciri masyarakat pedesaan. Beberapa ciri yang disampaikan oleh Kuntowijoyo tentang masyarakat pedesaan adalah kurangnya antusias soal pendidikan. Kebanyakan masyarakat pedesaan mempunyai kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas pendidikan rendah yang dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat

Desa Tegaldowo dan sekitarnya, diketahui dari hubungannya dengan budaya primordial masyarakat tentang pendidikan. Kebanyakan masyarakat Desa Tegaldowo mempunyai prinsip hidup tentang ketiadaan manfaat terhadap sekolah. Mereka masih menganggap bahwa sekolah tinggi-tinggi tapi menganggur, atau jika bekerja kebanyakan kuli bangunan, dll. Namun sekarang perubahan pendidikan meningkat, sejak adanya pendatang yang berprofesi menjadi guru di Sekolah Dasar ataupun SMP/MTs, yang berasal dari kota.

Penyebaran virus pendidikan menjadikan masyarakat Desa Tegaldowo meningkat soal pendidikan, namun perlu kajian penelitian lebih lanjut seberapa besar perubahan peningkatan dalam pendidikan. Dari data fakta di lapangan di Desa Tegaldowo sekarang memiliki jumlah sekolah tingkat Sekolah Dasar 3 buah, SMP/MTs 1 buah, dan SMK N 1 buah. Meskipun perubahan dalam pendidikan sudah mulai tampak, hal itu belum memberikan perubahan yang cukup banyak pada perubahan budaya primordial, yang merupakan budaya masyarakat asli.

Persoalan budaya primordial yang masih sulit untuk diubah hingga sekarang adalah kawin muda. Masih banyaknya masyarakat Desa Tegaldowo yang mengagungi budaya ini, memberikan efek pada kualitas pendidikan rendah. Karena, kebanyakan yang melakukan nikah muda adalah para gadis yang baru lulus sekolah SMP ataupun yang masih sekolah. Jika tidak segera menikah, nantinya akan disebut perawan tua, dan itu *tabu/aib* bagi masyarakat.

Faktor lain yang menghambat kualitas pendidikan adalah justru masyarakat yang berekonomi mampu, berperilaku budaya kawin muda ini. Banyak dari masyarakat mampu, menikahkan anak-anak mereka yang masih usia belia, hanya takut terhadap mitos tentang aib jika anak gadisnya tidak segera menikah. Kualitas pendidikan rendah juga bisa dilihat dari seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan. Kebanyakan masyarakat di Desa Tegaldowo rendah dalam kesadaran dalam kesehatan, terutama soal sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Wawancara dengan salah satu perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Tegaldowo, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan dan ketersediaan dalam MCK, menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan dan keindahan lingkungan. Sebab lain tentang kesadaran kesehatan rendah adalah sepinya masyarakat yang datang untuk mengetahui kondisi kesehatan, disebabkan juga bahwa masih

ada kepercayaan pengobatan kepada selain ahli medis.

Budaya lama, keyakinan akan sugesti dari seorang dukun atau kiai memberikan pengaruh tentang tingkat kesadaran masyarakat soal kesehatan dan didukung dengan masih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan *weton Jawa*, atau memilih hari menurut *petung Jawa*, ketika mereka mau melaksanakan segala sesuatu, termasuk berobat ke puskesmas. *Petung Jawa* yang dihindari bisaanya *taliwangke* dan *tomposeren*. Sulitnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sangat identik dengan tingkat kesulitan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jika kualitas pendidikan baik maka tingkat kesehatan juga baik.

G. Pandangan Masyarakat Desa Tegaldowo terhadap Budaya Modernisasi

Beberapa kali datang dan pergi, mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tegaldowo cenderung mencoba dengan hal-hal yang baru, sekiranya dalam pemikiran mereka terlihat menguntungkan baik bagi identitas diri atau bagi tatanan ekonomi mereka. Hal yang menyebabkan masyarakat sangat menerima keberadaan budaya modernisasi adalah pertama, dalam konteks *utilities* atau makna kegunaan. Misalkan pada teknologi pertanian yang sudah digunakan pada era sekarang, dan teknologi tersebut dapat mempercepat pekerjaan, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Faktor *utilities* terkait dengan efektivitas dan efisiensi pada alat alat modernisasi mempercepat budaya modernisasi berjalan hingga saat ini. Penggunaan teknologi pertanian maju yang sudah dipakai oleh masyarakat Desa Tegaldowo adalah pada jenis alat panen jagung dan alat pembuat *gulutan* pada persiapan lahan tanaman tembakau. Dan modernisasi pertanian lainnya adalah penggunaan *polybag* dalam proses tanam cabai.

Faktor yang kedua adalah karena nilai-nilai kemewahan ada dalam budaya modernisasi. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang dalam masyarakat Desa Tegaldowo, semakin menumbuhkan rasa gengsi atau rasa harga diri yang tinggi yang dapat memunculkan identitasnya sebagai orang kaya. Kepemilikan identitas kemewahan dapat terlihat dari bagaimana kondisi rumah yang bagus dan bertingkat, memiliki beberapa kendaraan angkut, memiliki kendaraan yang bagus, dan ciri lain adalah *fashionable* atau dalam hal berpakaian dan kelengkapan aksesoris. Realitas di masyarakat selalu menerima hal yang baru dalam konteks *fashion*, untuk membuktikan

identitas dirinya, keunggulan dirinya dari orang lain. Dampak terlihat adanya persaingan bagi kelas orang kaya dalam menunjukkan identitas dirinya, dan ini terjadi cukup masif. Misalkan beberapa dari masyarakat yang di kelas ekonomi tinggi selalu memberikan hiburan dangdut kepada masyarakat setahun sekali, demi harga diri tinggi. Beberapa perlakuan lain yaitu dengan *berselancar* ke tempat wisata dengan mengajak warga lain secara gratis, dsb.

Bagi masyarakat kelas ekonomi rendah, nilai kemewahan tetap ada meskipun tidak seperti kelas ekonomi tinggi. Mereka cenderung bisa menahan keinginan mereka, karena disesuaikan dengan tingkat ekonomi mereka. Namun pada dasarnya mereka memiliki rasa iri untuk melakukan hal yang dilakukan oleh golongan kelas ekonomi tinggi. Kadang banyak di antara mereka sengaja melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan ekonomi tinggi untuk sekadar mendengar cerita mereka, dan harapan sesekali diajak untuk menikmati kemewahannya. Masyarakat pada kelas ekonomi tinggi juga selalu mencoba hal-hal yang baru bagi mereka yang disebabkan oleh persaingan yang terjadi di antara mereka sendiri, demi kepentingan identitas, baik identitas diri maupun dalam persaingan bisnis.

Pada persaingan masyarakat ekonomi kelas bawah, hal yang sangat terlihat adalah menjamurnya warung kopi di berbagai sudut dan wilayah dukuh di Desa Tegaldowo, warung-warung kecil tersebar, dan jaraknya saling berdekatan. Jadi, bukan hanya masyarakat dengan ekonomi kelas tinggi maupun ekonomi kelas rendah, selalu mencoba dengan hal-hal baru sebagai bentuk mengunggulkan identitas dirinya, menyesuaikan dengan kondisi tingkat ekonomi mereka masing-masing.

Pandangan masyarakat Desa Tegaldowo terhadap masuknya budaya modernisasi dikatakan sangat *welcome*, terlihat dari budaya mereka sehari-hari familier dengan modernisasi. Beberapa faktor yang sangat mendasari mudahnya budaya modernisasi adalah kejujuran dari agen pembawa perubahan, produk dari perubahan, dan pendekatan yang dilakukan adalah *micro approach*.

Agen pembawa perubahan sangat penting bagi terbukanya pemikiran masyarakat pada budaya baru. Agen hendaknya adalah aktor yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang maksimal. Sukses atau tidaknya proses perubahan itu terpusat pada agen tersebut. Faktor lain yang sangat penting adalah bagaimana pendekatan yang dilakukan. Pendekatan yang selama ini dilakukan oleh pembawa kebudayaan baru adalah *micro approach*.

Bagaimana interaksi antar-individu menjadi pendekatan emosional terhadap terbentuknya budaya-budaya baru. Seperti contoh, interaksi penjual dengan pembeli, individu dengan individu.

Persaingan kelas dari masing-masing golongan baik golongan ekonomi tinggi dan ekonomi rendah, dengan menyesuaikan kondisi ekonomi mereka, dengan kata lain bahwa hedonisme, dan masyarakat konsumtif menjadi hal yang sudah cukup familier di kalangan masyarakat pedesaan menciptakan sebuah paradigma baru dalam persaingan dalam bidang ekonomi menuju hal-hal yang instan, seperti menjamurnya warung-warung kopi di desa tersebut.

Beberapa pandangan masyarakat Desa Tegaldowo terhadap budaya modernisasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Pandangan Masyarakat Desa Tegaldowo Terhadap Budaya Modernisasi

No.	Pandangan masyarakat	Keterangan
1	Nilai kegunaan (<i>utilities</i>)	Terlihat dalam penggunaan teknologi media, dan teknologi pertanian
2	Nilai kemewahan (<i>hedonisme</i>)	Terlihat pada kepemilikan barang-barang mewah, dan pada fashion.

(Sumber : Olah Data Primer 2018)

H. Sikap Masyarakat Desa Tegaldowo terhadap PT. Semen Indonesia Tbk.

Pandangan masyarakat Desa Tegaldowo secara keseluruhan terhadap masuknya pabrik semen PT. Semen Indonesia, dari awal sudah terbelah. Terbelahnya masyarakat memiliki masing-masing persepsi, asumsi dan dasar yang rasional dan objektif. Perbedaan pandangan di antara masyarakat Desa Tegaldowo menyebabkan perubahan nilai kerukunan yang selama ini sudah menjadi budaya asli masyarakat setempat. Sebagai contoh, mudarnya nilai kerukunan, kegotongroyongan, karena sudah menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kelompok pro memandang negatif kepada kelompok kontra ataupun sebaliknya. Hadirnya kelompok tengah semakin memperjelas sistem menjadi terkotak-kotak.

Terbelahnya masyarakat Desa Tegaldowo menjadi tiga bagian, membuktikan bahwa konflik dalam sistem sosial mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerusuhan sosial (*sosial disorder*). Kelompok pro atau *in group*, kelompok kontra (*out group*), dan kelompok di antara bayang-bayang

di antara pro dan kontra, yaitu kelompok lain atau *other group*.

1. Kelompok Kontra

Pandangan kelompok kontra dalam menentang kehadiran pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk, adalah pandangan subsistensi pertanian. Subsistensi terhadap kelangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi identitas mereka. Identitas yang harus dipertahankan, karena sebagai warisan dari leluhur yang harus selalu dijaga dalam kondisi apa pun. Warisan subsistensi, bukan hanya pada saat ini, akan tetapi diperuntukkan untuk masa yang akan datang, masa anak cucu mendatang.

Pandangan yang paling penting bahwa ada makna yang tersembunyi, nilai-nilai hakiki substansial dalam konsensus antara bumi dan petani. Terdapat hal-hal yang sangat mendasar bisa disebut sebagai prinsip, antara bumi dan petani, dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Hamonisasi, kerja sama, kerukunan, keseimbangan menjadi nilai abadi. Saling menghargai, saling menghormati menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga tradisi budaya dari sebuah sistem yang terstruktur. Untuk menjaga kekuatan agar tetap terjaga, sebuah sistem memiliki empat unsur, sebagaimana dalam *konsensus* atau kesepakatan, dan jika salah satu dari unsur tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah kerusakan sistem. Yaitu, (1) pemeliharaan, masing-masing komponen harus saling memelihara, saling menjaga satu sama lain, (2) solidaritas, saling bersatu membangun bersama, (3) *goal attainment*, ada tujuan bersama dalam sistem, (4) adaptasi, saling memberi dan menerima tanpa ada perbedaan.

Empat unsur tersebut yang selama ini dipegang oleh petani dan bumi dalam menjaga sebuah sistem. Masing-masing tahu akan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Maka tidak heran jika di berbagai tempat menentang segala bentuk eksploitasi bumi. Pada masyarakat Batak, bumi disebut sebagai *bona pasogit*, masyarakat Papua menyebut gunung sebagai kepala ibu.

Pandangan kelompok kontra juga sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang selama ini dilihat, dirasakan, dari dampaknya penambangan yang dilakukan oleh perusahaan kecil yang berjumlah belasan di wilayah Desa Tegaldowo. Selain dampak pencemaran dari lingkungan yang dihasilkan dari debu kendaraan, faktor lain adalah kebisingan suara, dari dentuman ledakan disebut tahapan awal penambangan yang menyebabkan kurangnya kenyamanan, karena

lokasi yang sangat dekat dengan permukiman masyarakat.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi sebuah paradigma berpikir, timbul kesadaran baru tentang dampak lingkungan akibat dari pertambangan kecil yang ada di wilayah Desa Tegaldowo, kemudian muncul kelompok penolak terhadap eksploitasi pabrik semen yaitu PT. Semen Indonesia Tbk, yang faktanya lebih besar dari perusahaan tambang yang sebelumnya berdiri.

Kelompok penolak mulai mengaktualisasikan diri mereka, dengan mengadakan protes, pemboikotan, kemudian melakukan aksi bangun tenda di pintu masuk pabrik semen. Dilanjutkan lagi dengan aksi demonstrasi, aksi mengecor kaki, aksi jalan kaki ke kantor gubernur, dengan tuntutan agar pemerintah menutup pabrik semen. Kelompok tersebut menyimbolkan organisasi mereka dengan sebutan JMPPK Rembang, efek solidaritas sistem gerakan yang ada di Pati sebelumnya. Organisasi dan gerakan sosial masih bertahan sampai sekarang, karena dukungan pihak-pihak yang peduli dengan lingkungan dan kegigihan masing-masing dalam menjaga tujuan gerakan.

Kelompok kontra disebut juga subsistem yang memisahkan diri dari kelompok masyarakat yang dibentuk dari sistem terdahulu, kemudian sekarang menjadi bagian dari subsistem kelompok-kelompok kiri, atau lembaga-lembaga independen yang tujuannya adalah menentang segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pemerintah atau yang berlindung di bawahnya. Dengan dasar tujuan adalah subsistensi, konservasi, tujuannya adalah tetap menjaga kepentingan bersama dalam mempertahankan, menjaga, dan melestarikan keadilan, kesejahteraan masyarakat.

Kelompok kontra juga disebut sebagai lembaga di luar pemerintah, NGOs (*Non Government Organization*), yang dalam pergerakannya memantau kinerja lembaga pemerintah, dan/atau disebut sebagai lembaga pengontrol kebijakan-kebijakan lembaga pemerintahan. Lembaga ini dibentuk dari skala nasional sebagai supersistem kelompok kiri, WALHI, YLBHI, Komnas HAM, JATAM, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh kelompok kontra pabrik semen sengaja dilakukan dalam tujuan membangun sebuah sistem yang harmonis, integritas mekanik yang dibangun di antara manusia dengan alam sejak zaman dahulu, dan saling tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kontra merupakan sebuah titik kejenuhan yang selama ini dialami oleh sebagian masyarakat

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan yang sudah ada sejak lama.

2. Kelompok Pro

Kelompok pro lebih dekat dengan sistem besar dari organisasi korporasi dan pemerintah. Kelompok pro memiliki orientasi mendukung pemerintah dan lembaga yang bernaung di bawahnya. Kelompok ini menjadikan alasan nilai-nilai nasionalisme dalam mengaktualisasikan identitas diri mereka, sekaligus untuk meng-*counter* terhadap pandangan masyarakat lain yang bertentangan.

Pandangan lain adalah melihat dari keuntungan ekonomi yang akan didapatkan oleh perusahaan PT. Semen Indonesia Tbk. Pandangan yang sama seperti orientasi dari lembaga pemerintah dan korporasi. Kelompok pro berpandangan agar mendapat kesempatan utama untuk bekerja di kantor, setiap hari bisa bekerja, selalu presensi masuk, mendapat gaji bulanan, layaknya seorang PNS pada umumnya. Dengan kondisi seperti itu, mereka tidak perlu capek-capek lagi untuk mencari usaha baru yang belum tentu menguntungkan, seperti buka warung, atau bisnis yang lain.

Memiliki pekerjaan kantoran dianggap lebih dihargai daripada pekerjaan lainnya. Penghargaan lain terkait dengan penghasilan yang pasti didapat setiap bulan, tanggal muda wajah berseri-seri layaknya bos besar. Paling tidak harapan jauh lebih cerah dengan bekerja di kantoran daripada sebagai petani, atau yang lainnya.

Anggota kelompok pro secara kuantitas memang mayoritas adalah dekat dengan dunia bisnis, karena mereka mengerti dengan adanya pabrik semen, tentu saja akan menambah penghasilan mereka. Pengetahuan perputaran uang yang lebih banyak, yang diperoleh dari masyarakat atau pekerja pabrik tentu saja akan sangat membantu tingkat perekonomian mereka. Imbas peningkatan ekonomi melibatkan banyak sektor, seperti pengguna jasa angkutan, bengkel, warung-warung, dan jasa lainnya. Anggota kelompok pro lain berasal dari pendatang yang sudah lama bertempat tinggal di Desa Tegaldowo. Mereka umumnya banyak berprofesi selain petani. Misalkan para guru, tenaga medis, sopir.

Kelompok pro dalam inisiatif mendukung pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk, selalu berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, dengan maksud mengajak semua masyarakat agar bersatu memberikan dukungan ke pabrik semen. Mereka berpandangan

bahwa jika semua masyarakat mendukung pabrik semen, maka apa yang selama ini mereka dapatkan, seperti pekerjaan tentu saja akan semakin keberlanjutan. Berbeda jika masyarakat masih banyak yang menentang, justru akan memperlambat dan mungkin juga pekerjaan yang diperoleh akan hilang.

Kontrak sosial yang diterapkan oleh sistem organisasi pabrik semen membuat mereka seolah terikat dan menciptakan utang baru bagi mereka, utang yang akan terbayar lunas jika mereka bisa mengubah masyarakat mendukung pabrik semen, tapi sayangnya mereka kurang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan itu, dan sekarang mereka lebih asyik dengan apa yang diperoleh saat ini, dan tidak berpikir di masa mendatang. Kelompok pendatang yang pro semen, bisa disebut memiliki tujuan agar memperoleh pekerjaan, karena mereka rata-rata tidak memiliki sawah sebagai lahan pertanian, dan memilih pekerjaan lain untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.

3. Kelompok Tengah

Kelompok tengah bisa disebut kelompok yang baik tidak mendukung pabrik semen atau menolak. Namun, ada beberapa catatan yang bisa dijelaskan dalam penulisan ini, bahwa ada beberapa kriteria yang bisa ditemukan di dalam kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok tengah.

- a. Kelompok diam. Kelompok ini adalah kelompok yang lebih memilih diam dengan kenyamanan mereka daripada harus terlibat dalam kegiatan, baik dengan kelompok pro maupun kelompok kontra. Kelompok ini biasanya berbuat seolah tak peduli/cuek dengan kondisi sekitar. Kelompok ini dominan adalah kelompok yang memiliki tingkat perekonomian mapan, bisa PNS, atau pendatang yang berprofesi sebagai pedagang yang sudah lama, dan cukup berada, atau kelompok asli yang tidak mau terlibat apa pun dengan masyarakat lain karena alasan tertentu.
- b. Kelompok yang secara lahiriah tampak mendukung pabrik semen, namun di dalam batin menolak, bahkan sangat keras dalam menolak. Tetapi juga tidak ikut dalam setiap kegiatan kontra. Perilaku mereka diketahui jika dengan cara pendekatan yang mendalam. Kelompok tengah tipe ini adalah kelompok orang yang mengalami kasus tanah yang sebelumnya tidak terselesaikan sampai sekarang, perasaan kecewa terhadap pemerintahan desa yaitu perangkat desa, namun tidak berani menyampaikan secara

terang-terangan.

c. Kelompok *sungkan*

Kelompok ini cenderung tidak bergerak sama sekali, baik ikut dalam kelompok pro maupun kontra, meskipun mereka tidak setuju dengan pabrik semen, namun karena mereka masih memiliki rasa *sungkan* terhadap saudaranya yang menjadi perangkat desa, maka mereka lebih baik tidak bergerak.

d. Kelompok takut (kelompok trauma)

Kelompok ini sangat pasif dan cenderung diam karena takut akan ancaman atau intimidasi oleh kelompok tertentu sehingga membuat mereka sangat diam dan tidak berani untuk berbuat apa-apa, dan/atau disebabkan takut karena trauma dengan apa yang mereka ketahui tentang kejadian yang terlihat selama ini. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terasing dalam urusan pabrik semen.

BAB 3

GEJALA, SEBAB KONFLIK, DAN GERAKAN SOSIAL

A. Konflik Lama

Konflik masyarakat lokal dengan PT. Semen Indonesia, yang terjadi di Desa Tegaldowo dan sekitarnya merupakan rentetan konflik yang sebelumnya sudah ada, dari sejak berdirinya tambang skala kecil atau Galian C, yang sudah ada sejak tahun 1996. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan masa itu sudah terjadi sejak praktik jual beli lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang berjalan dengan tidak adil.

Konflik berlanjut dengan bertambahnya aktor yang berkepentingan. Sejak masa itu, masyarakat mengalami berbagai macam kejadian yang kurang mengenakkan, atas perilaku yang kurang baik dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pendukung perusahaan tambang. Perilaku tidak baik yang diterima oleh masyarakat yang menjadi korban, tidak menanggapi dengan terbuka atau terang-terangan.

Masyarakat desa yang cenderung lebih memilih aman, kebanyakan tidak melakukan pilihan perlawanan. Mereka pasrah (*skeptis*) dan menyerahkan kepada takdir. Bukan berarti mereka takut pada perang, namun mereka lebih memilih menghormati budaya untuk mengalah, karena yang dinamakan musuh bukanlah orang yang saling kenal sudah sejak lama, saling membantu jika ada kesulitan, dan saling gotong royong.

Selain budaya mengalah sebagai wong cilik, hubungan patron klien menjadi peran utama dalam setiap kasus yang terjadi. Nilai-nilai stratifikasi sosial masih sangat tinggi terhadap lembaga-lembaga superordinasi, yang didominasi oleh komponen pemerintahan desa dan didukung oleh lembaga di atasnya. Masuknya aparat keamanan baik TNI POLRI dalam kelompok tersebut menambah kekuatan yang menciptakan peran atas ketidakberanian masyarakat sekitar dalam melakukan perlawanan.

Sejarah kekuatan militer memiliki peran pada setiap kegiatan tidak lepas dari peran pemerintahan zaman Suharto. Dengan kekuatan besi, menggunakan peran aparat militer sengaja dilakukan untuk mendukung setiap langkah dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

Rezim Orba memang memiliki peran dalam memainkan sejarah pembangunan nasional. Dengan orientasi pada peningkatan ekonomi, mau tidak mau segala cara harus dilakukan demi terwujudnya tujuan tersebut. Bagaimana Orba memainkan depolitisasi untuk menekan setiap gerakan yang tidak mendukung, dan bahkan tindakan represif akan dilakukan untuk memuluskan apa yang menjadi tujuannya.

Meskipun dalam berbagai persoalan pembangunan selalu menggunakan tindakan militer dan cenderung represif, namun beberapa keuntungan dari perubahan pembangunan bisa terlihat hingga saat ini. Pembangunan percepatan nasional patut mendapat apresiasi yang maksimal oleh generasi masa kini dan mendatang. Apa yang bisa dinikmati sekarang tidak lain adalah hasil karya rezim Suharto. Bisa dibayangkan jika kehidupan pembangunan masa itu sangat didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang memadai, tentunya negara ini akan jauh di depan dan setingkat Negara Jepang, Cina, atau negara maju lainnya.

Satu kesalahan yang harus menjadi catatan bagi pembangunan ekonomi Orba adalah ketidakseimbangan perencanaan pembangunan tidak didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bayang-bayang imperialisme memberikan efek *inlander*, masih terasa hingga saat itu. Masyarakat pribumi identik masyarakat *ngisoran*, terbelakang dan bodoh, akibat dari lamanya penjajahan. Negara yang kenyang akan sejarah penjajahan, tidak menjadi daya ingat bagi rezim Orba untuk mengubah revolusioner dengan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh kalangan pribumi. Rezim Orba tidak pernah belajar dari Jepang, dengan mementingkan kualitas pendidikan manusia ketimbang pembangunan ekonominya.

Ketakutan masyarakat akibat dari efek sindrom militerianisme zaman Orba sangat terasa hingga saat ini dengan tidak adanya perlawanan, protes bahkan gerakan radikal yang sudah semestinya perlu dilakukan. Perlakuan intimidasi, pembohongan, pembodohan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mementingkan keuntungan pribadi sekiranya menjadi pemicu konflik yang terjadi sekarang ini.

Bayangan masyarakat *inlader* merupakan bawaan dari kebudayaan

lama, yang menjadi karakter masyarakat pedesaan dan pegunungan yang cenderung tidak frontal dalam setiap menanggapi setiap persoalan yang buruk menimpa dirinya. Kesan lebih tertutup bahkan menyimpan selama puluhan tahun, melawan dengan cara mereka sendiri lebih bagus dalam upaya menjadi struktur sosial.

Beberapa kejadian atau kasus yang menjadi rangkaian konflik yang sebelumnya sudah ada, terbagi dalam beberapa subbab, dengan klasifikasi konflik menurut motif, dan beberapa pertentangan yang dikaitkan dengan konflik sebelum datangnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.

1. Konflik Pembebasan Lahan

Sejak munculnya tambang di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, sekitar tahun 1996, berbagai persoalan muncul terkait dengan pembebasan lahan dari para petani. Petani yang merasa memiliki tanah yang didapatkan secara turun-temurun (*warisan dari kakek buyut*) dan memang kebanyakan tidak memiliki surat sah yang membuktikan kepemilikan tanah yang sah atau sertifikat, dijadikan modus oleh oknum tertentu agar mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang kurang baik.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum untuk mengelabui masyarakat dalam persoalan lahan sering kali dilakukan, dan sengaja diperuntukkan bagi individu dan/atau kelompoknya demi kepentingan ekonomi dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Kesadaran masyarakat tergugah setelah adanya kisruh tanah yang terjadi sekarang ini. Pemikiran mereka seakan sudah terbuka, akan pentingnya sertifikat yang harus dipunyai, untuk menandakan kepemilikan yang sah akan tanah yang dimilikinya. Karena selama ini masyarakat hanya tahu bahwa surat pajak (SPPT) sudah sah sebagai pemilik tanah.

Dari beberapa kasus tentang pembebasan lahan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penyerobotan lahan

Kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak penambang atau oknum yang memanfaatkan perusahaan tambang terhadap tanah yang dimiliki masyarakat Desa Tegaldowo terjadi jauh sebelum pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Kasus-kasus tersebut masih banyak yang belum terselesaikan sama sekali, bahkan hingga saat ini kasus tersebut seolah hilang.

Banyak petani merasa tanah yang mereka miliki berkurang, dikarenakan terkena rembetan pembuatan jalan atau pelebaran jalan menuju lokasi tambang serta dampak penggunaan bom di waktu eksploitasi tambang. Tindakan itu dilakukan tanpa memberitahukan petani yang memiliki hak atas tanah tersebut. Kesengajaan oknum dalam melakukan tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok dan seolah teroganisir, dikarenakan beberapa kali masyarakat mendapatkan ketidakjelasan dari kasus yang dialaminya.

Karena dianggap perbuatan itu menjadi kerugian bagi diri petani, mereka mengadu kepada pemerintahan desa. Namun, yang didapat bukannya hal yang diharapkan, kebenaran dan keadilan, justru malah seakan ada permainan dan seolah sudah direncanakan sebelumnya.

Menyingkapi perlakuan dari oknum tersebut, para petani hanya pasrah dan menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Kasus hilangnya tanah dengan modus kesengajaan oleh oknum tidak dibalas, namun petani memilih tindakan subsistensi dengan sengaja membiarkannya. "*Urip wis ono sing ngatur*" sering kali menjadi dasar bagi masyarakat primordial dalam menghadapi segala bentuk kejadian dalam kehidupan.

b. Penipuan dalam jual beli lahan

Kasus penipuan dalam jual beli lahan banyak terjadi antara petani dengan perantara atau makelar. Banyak perantara bermain dan saling bekerja sama satu sama lainnya untuk saling mendapatkan keuntungan secara bersama sama pula, bahkan sering terjadi dalam satu proses jual beli terdapat beberapa perantara, tangan pertama, tangan kedua, dan bahkan ada tangan tangan selanjutnya.

Masyarakat desa pada umumnya tidak saja tidak suka dengan hal yang rumitkan, tetapi juga membingungkan, karena terlalu banyak campur tangan dari para makelar yang sengaja mengondisikan seperti itu. Kondisi tersebut sengaja dimanfaatkan oleh perantara untuk semakin membingungkan masyarakat, agar semakin mudah melakukan tindakan yang kurang benar.

Kebanyakan kasus penipuan jual beli lahan berasal dari banyaknya perantara tidak bertanggung jawab yang ikut nimbrung dalam proses tersebut. Beberapa kasus yang dialami oleh beberapa masyarakat akibat dari perantara adalah ketidakjelasan kapan pelunasannya, penggelapan dilakukan oleh perantara dikarenakan personal meninggal, penipuan atas

jual beli tanah petani tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya tanah yang dijual setengah, namun kenyataanya seolah telah dijual keseluruhan.

Perilaku oknum makelar tanah yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai agen dalam membantu pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. justru berbalik arah menyerang balik dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, menimbulkan aktor konflik semakin bertambah, dan akumulasi konflik makin meningkat.

2. Konflik dengan Kelompok Luar

Konflik dengan kelompok luar diawali dengan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari kelompok-kelompok pendukung tambang. Perilaku tidak menyenangkan oleh kelompok-kelompok yang berlandung di balik tambang telah disinggung sedikit, bahwa pada dasarnya untuk mewujudkan tujuannya yaitu memperoleh keuntungan ekonomi semata, perilaku perilaku tidak etis sering dilakukan.

Selain melakukan upaya kecurangan dan bahkan mekanisme prosedur yang nyata-nyata salah, ada upaya lain yang dilakukan, yaitu melakukan ancaman secara simbolik kepada masyarakat secara terang-terangan. Seperti contoh, ungkapan verbal “*ngko nek ora mbok dol tanahmu bakalan ilang*”, ungkapan tersebut memberikan makna, jika tanahmu tidak dijual, maka dipastikan akan hilang.

Perilaku tersebut masih sering ditampilkan hingga saat ini. Contoh kasus yang terjadi saat ini adalah perilaku sewenang-wenang atas masyarakat dengan tetap menyerobot tanah meskipun sang pemilik tetap berjuang keras untuk mempertahankannya. Kejadian menyerobot tanah tersebut sudah sering kali dilakukan.

Beberapa masyarakat sependapat, bahwa konflik semakin berlanjut jika orang-orang yang di atas hanya percaya kepada mereka, bukannya terjun langsung melihat keadaan yang sebenarnya. Masyarakat menyadari bahwa tidak bisa menolak tambang, namun proses yang dilalui harusnya penuh dengan kejujuran, kebaikan dan bukan sebaliknya.

“Sakjane masyarakat mriki niki sampun sadar, tambang ora keno ditolak, ning nek ningali perilakune pamong-pamong deso, sing tumindak ora jujur, kawit biyen, nggarai gelo” (Wawancara dengan pendukung gerakan pada bulan Desember 2016).

Perilaku yang dilakukan oleh oknum pamong/perangkat desa yang

menciptakan banyak persoalan yang semakin menumpuk menimbulkan rasa kecewa, rasa benci, dan berubah menjadi aras yang menimbulkan eskalasi konflik di kemudian hari. Perilaku tidak baik oknum masih terjadi hingga sekarang.

Perilaku lain yang menimbulkan kebencian, yang harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai elemen pemerintahan desa adalah memberikan informasi yang jelas dalam setiap komplain dari masyarakat, namun realitasnya adalah justru masyarakat diberikan sebuah *a game* yang berputar dan berbelit-belit, dan hal itu terus saja berulang sedemikian rupa sehingga di kemudian dari masyarakat merasa malas dan enggan untuk bertanya tentang apa yang menjadi hak mereka. Seperti contoh, misalkan dari seorang masyarakat yang menanyakan soal tanah yang hilang, kepada seorang perangkat, jawaban yang diterima menjadi beralih ke orang lain, kemudian ketika bertanya lagi ke orang kedua, jawabannya menjadi ke orang ketiga, begitu seterusnya.

Linglung masyarakat terhadap apa yang menjadi respons mereka, menjadikan keputusan akan apa yang selama ini dipertanyakan dengan maksud mencari jawaban yang jelas dan benar, namun justru persoalan semakin berbelit-belit dan masyarakat tidak tahu harus ke mana lagi, seolah tidak menemukan tempat untuk bertanya.

3. Konflik Politik Pilkades

Perhelatan pilkades di akhir 2014 lalu, sekitar bulan November, memberikan pemahaman baru terkait dengan konflik yang pada masa itu masih hangat-hangatnya di masyarakat Desa Tegaldowo. Paling tidak masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok kontra tetap harus memberikan pilihan untuk memilih calon kepala desa 6 tahun ke depan.

Sejenak melupakan kisruh pabrik semen, bergembira dalam suasana kemeriahan pilkades pada masa itu. Baik masyarakat pro maupun kontra saling melupakan peristiwa yang menimbulkan kerenggangan di antara mereka. Seolah menjadi obat meski hanya beberapa hari saja.

Pada kesempatan yang sama, disebut oleh informan bahwa, pada saat pencalonan kepala desa pada saat itu, kepala desa sekarang pernah berjanji untuk mendukung gerakan dalam melawan pabrik semen. Namun setelah pesta demokrasi selesai dan menjadi pemenang, janji yang diucapkan sirna. Seperti yang disampaikan kepala desa sekarang pada masa itu "*Nek aku dadi ora bakalan ono pabrik semen*" tapi setelah jadi jawaban menjadi berbeda.

Masyarakat seolah hanya menjadi alat politik untuk mencapai kekuasaan dan tentu saja banyak yang merasa kecewa dengan hal tersebut. Meski begitu, masyarakat kontra tambang sudah bisa melupakan hal-hal semacam itu, namun tetap menjadi catatan dalam diri mereka, dan menjadikan pengalaman berharga untuk waspada di kemudian hari.

Perhelatan politik pilkades menimbulkan perpecahan di dalam tubuh masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen, ditimbulkan pengaruh dari masing-masing pasangan calon yang berusaha memperoleh suara dengan berbagai cara untuk menang. Salah satu pasangan calon diusung oleh masyarakat kontra pabrik semen, namun dalam praktiknya justru masyarakat kontra pabrik semen terpecah oleh calon lain, sehingga kekurangkompakan masyarakat tersebut menimbulkan kekalahan calon yang diusungnya.

Setelah proses pilkades selesai, perhatian masyarakat tertuju pada kepentingan calon kepala desa yang diusungnya, seperti harga diri, menyembunyikan diri dari interaksi, bahkan dampak yang ditimbulkan dari pilkades terhadap kelangsungan integrasi mekanik yang selama ini dibangun seakan menjadi pudar. Dampak dari konflik pilkades mengaburkan tujuan masyarakat yang kontra pabrik semen.

4. Campur Tangan Pendetang

Kelompok pendatang telah disinggung sebelumnya sebagai kelompok yang sudah lama bertempat tinggal dan menjadi anggota tetap masyarakat Desa Tegaldowo. Sejak munculnya perusahaan tambang, semakin banyak pendatang yang masuk ke wilayah desa dan menjadi kebiasaan membawa budaya baru ke dalam masyarakat.

Kelompok pendatang pada umumnya adalah kelompok yang sudah memiliki pemikiran terbuka, tidak kolot, menerima setiap perubahan yang berbeda dengan masyarakat asli Desa Tegaldowo, yang masih sulit menerima perubahan secara kompleks. Bahkan masyarakat asli sangat menolak keras budaya pendatang yang bisa disebut budaya negatif. Budaya negatif yang tidak disenangi oleh masyarakat asli adalah minuman keras. Sejak kelompok pendatang masuk, budaya minuman keras semakin meledak dan melanda para pemuda.

Kelompok pendatang tipe ini kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang pro dengan pertambangan, membentuk koloni baru dan makin kuat, makin beringas karena setiap ada kasus yang menjadi

algojo adalah mereka yang disebut preman yang terlebih dahulu minum minuman keras dalam setiap akan melakukan tindakan. Perilaku campur tangan pendatang dalam berbeda pendapat dengan masyarakat yang kontra dibuktikan dari beberapa pendatang yang selalu ikut mendukung kegiatan pro tambang dan diprediksi campur tangan pendatanglah yang membujuk masyarakat untuk mendukung perusahaan tambang.

Bukannya konflik semakin mereda, namun justru menambah eskalasi konflik menjadi meningkat, dengan campur tangan pendatang dalam melakukan segala tindakannya untuk mendukung perusahaan tambang, yang justru memberikan penglihatan yang negatif kepada masyarakat dan menambah daftar faktor-faktor konflik.

B. Hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk. sebagai Konflik Baru

Hadirnya pabrik semen skala besar yaitu PT. Semen Indonesia Tbk., menimbulkan beberapa pandangan negatif bagi sebagian masyarakat yang selama ini telah mengalami berbagai perlakuan, tindakan yang tidak mengenakan dari kasus-kasus perusahaan tambang sebelumnya. Seolah menemukan kesempatan baru, untuk dapat mengekspresikan apa yang selama ini mereka rasakan, yang selama ini mereka simpan dan makin menumpuk. Luapan amarah, benci, dendam, terhadap oknum masa lalu menjadi alasan pokok dalam setiap kegiatan protes yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik tambang. Apalagi praktik-praktik tindakan tidak mengenakan itu terjadi di era pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. saat ini. Bagi oknum yang telah menjalankan peran sebelumnya, dengan hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk, pundi-pundi uang juga akan semakin banyak, jika mendapatkan objek tanah yang empuk.

Harga tanah semakin mahal dari yang sebelum PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Harga tanah dari awal sebelumnya datang pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. kisaran di bawah seratus ribu per meter menjadi dua kali lipat, bahkan beberapa tempat bisa tiga kali lipat. Maka tidak heran jika beberapa masyarakat seperti ketiban rezeki nomplok. Beberapa orang masyarakat menerima miliaran rupiah dari hasil jual beli tanah. Dan tentu saja bagi makelar, uang *cibika cibiki* menjadi sumber penghasilan baru bagi mereka dan hasilnya sangat lumayan. Dengan kata lain, demi keuntungan yang sangat menggiurkan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik-praktik kecurangan kerap kali terjadi, antara pihak makelar dengan pemilik

tanah, dan bukan dengan pihak PT. Semen Indonesia Tbk. (bukan berarti di dalam internal PT. Semen Indonesia Tbk. sendiri tidak ada oknum).

Jika dicerna dari berbagai pendapat masyarakat, disimpulkan bahwa sesungguhnya kebanyakan masyarakat menerima dengan keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. namun karena agen yang membawa kebudayaan baru tidak memiliki kapasitas dan kemampuan sebagai layaknya agen, maka yang terjadi adalah apa yang menjadi substansi nilai tidak bisa berjalan, dan meski berjalan tidak berada dalam proses yang benar. Kemudian apa yang menjadi tujuan semula, tidak terlaksana, dan mengacaukan semuanya, dan yang mendapatkan kerugian adalah masyarakat dan PT. Semen Indonesia Tbk. akibat ulah oknum yang tidak bisa membawa substansi ke proses yang benar. Beberapa poin yang menjadi perhatian di dalam konflik antara masyarakat dengan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya Humanisasi

Dengan kata lain, layaknya penjual dalam menawarkan sebuah produk yang mereka bawa, sebelum melakukan sebuah kegiatan transaksi harus diawali dengan adanya proses sosialisasi produk. Pengenalan produk sangat penting dilakukan, dengan tujuan produk dapat diminati kemudian terjual, dengan transaksi yang benar, yang seimbang, dan sama-sama dalam kondisi sadar (*humanis*).

Sosialisasi produk bukan sekadar menawarkan secara fisik semata, akan tetapi makna terpenting yaitu nilai-nilai kebermanfaatannya dari produk menjadi substansi inti yang tidak bisa tidak harus ditawarkan. Sosialisasi bukan sekadar memberi tahu saja (*to know*), akan tetapi harus mampu dimengerti, disadari tentang nilai-nilai fungsi dan kebermanfaatannya sehingga produk yang akan dibeli bisa memberikan kegunaan bagi realitas kehidupan sekarang dan masa mendatang.

Setelah sosialisasi produk dilakukan, ada satu hal penting untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi berhasil, yaitu proses pendekatan dalam proses sosialisasi. Pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan makro dan mikro. Secara umum sosialisasi dilakukan dengan pendekatan makro, namun jika belum maksimal sangat diperlukan pendekatan mikro, demi keseimbangan pada hasil. Namun, dalam realitas sekarang pendekatan mikro jarang sekali digunakan, atau bahkan ditinggalkan, dan cenderung pada pendekatan makro yang dianggap mewakili keseluruhan

dalam kuantitasnya.

Kecenderungan pendekatan makro harusnya sudah mulai ditinggalkan sebagai bagian dari proses sosialisasi, karena di era *global society*, ketika keterbukaan informasi diiringi dengan keterlibatan hak asasi dan demokrasi, setiap individu sangat berperan menonjolkan identitas dengan pandangan pemikiran mereka dan mampu melawan dengan kekuatan individu. Dalam beberapa kasus gerakan sosial, meskipun kekuatan tidak seberapa, namun gelombang gerakan akan terus bergerak meningkat dan akan berlangsung sangat lama, dan hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian yang besar baik secara materiel maupun non-materiel.

Role model atau memainkan peran sebagai penjual yang sebenarnya, tipe penjual haruslah yang memiliki peran sebagai aktor yang mampu memainkan peran sebagai agen. Agen berfungsi sebagai perantara agar sebuah produk bisa diterima dengan sadar oleh masyarakat. Maka sangat dibutuhkan seorang agen yang memiliki tipe dari agen yang sebenarnya. Seorang agen harus memiliki kapabilitas baik secara intelektual maupun tingkat emosional, bukan sekadar agen yang hanya berorientasi pada hasil pribadi atau kelompok semata, akan tetapi harus secara menyeluruh. Untuk menjadikan nilai-nilai umum sebagai tujuan, maka agen harus memiliki karakter yang menyesuaikan kondisi budaya masyarakat sekitar, bisa membaur, bukan agen yang memiliki kepentingan-kepentingan sentimen pribadi atau agen yang telah memiliki hubungan negatif sebelumnya.

Dari kasus yang berhubungan dengan PT. Semen Indonesia Tbk. kesalahan fatal adalah pada agen sosialisasi yang tidak memiliki kapasitas sebagai seorang agen yang sebenarnya. Agen yang ada justru bertindak tidak sejalan dengan kepentingan tujuan PT. Semen Indonesia Tbk. namun justru berbalik arah menyerang PT. Semen Indonesia Tbk. dengan mengutamakan kepentingan mereka sendiri, kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi bagi kelompok mereka.

Sosialisasi yang selama ini ditampilkan oleh agen adalah sosialisasi secara materiel atau sosialisasi yang tampak dari luar. Seperti contoh wayangan, dangdut, atau dalam bentuk yang lain. Makna sosialisasi yang sebenarnya kurang menjadi perhatian, bagi pihak-pihak yang disebut agen. Bagi masyarakat yang memiliki pandangan kritis, tentu saja sangat berlawanan. Mereka membutuhkan nilai-nilai lebih, bukan sekadar fisik semata, dikarenakan apa yang selama ini terjadi telah menjadi *software* di otak mereka, dan selama ini pula mereka telah didoktrin (*brainwashing*)

oleh oknum dalam bentuk agen.

Pengalaman yang terjadi selama ini dengan membeludaknya perusahaan pertambangan, sedikit tahu tentang dampaknya, didukung dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, masih sangat membekas dalam diri mereka. Bahwa mereka selama ini mengalami ketidakadilan, penindasan, dan tindakan yang menyudutkan mereka, dan jika sekarang mereka berpikir kritis, adalah belajar dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari orang lain. Kepekaan mereka terhadap lingkungan atas dasar masa lalu, kemudian jika dengan pola kritis mereka justru menimbulkan pandangan negatif, hal itu patut disalahkan. Dan bukannya menjadi dilema, namun harusnya menjadi tantangan bagi agen untuk lebih dengan pendekatan mikronya. Namun, realitas sekarang bukannya melakukan pendekatan mikro, namun justru semakin memunculkan kepentingan sendiri dan atas asumsi mereka dengan mengatakan bahwa konflik di Desa Tegaldowo tidak ada.

Jadi, agen telah mendorong konflik antara masyarakat lokal dengan PT. Semen Indonesia Tbk. menjadi meningkat, dan mengakibatkan perseteruan semakin lama hingga sekarang. Agen telah melakukan tindakan dengan memutarbalikkan fakta dengan tidak bersinergi dengan tujuan PT. Semen Indonesia Tbk. demi memenuhi kepentingan mereka sendiri, bukan agen sebagai perantara *common sense*.

2. Munculnya Masyarakat Kritis

Di era keterbukaan sekarang ini, dengan banyaknya media informasi *online* yang bisa diakses oleh setiap masyarakat, baik dari kelompok masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan, baik dari kelompok pro maupun kontra, media selalu memberikan perdebatan ilmiah yang menarik setiap pembacanya. Bahkan media juga bisa menimbulkan berbagai macam dilema dengan kebebasan pers yang dimilikinya, namun berdasarkan substansi demokrasi yang sebenarnya adalah perdebatan tentang isu kontroversial sangat diperlukan dalam membangun sebuah demokrasi yang modern, demokrasi yang masing-masing komponen ikut berperan, berpartisipasi dalam segala isu-isu yang terjadi di Negara ini.

Untuk menciptakan sebuah partisipasi masyarakat, tidak harus secara langsung dengan tatap muka, namun bisa saja menggunakan teknologi modern sebagai sarana prasarana untuk mendukung keaktifan dari partisipasi *publik*, dan media elektronik sangat memberikan kesempatan

partisipasi tersebut. Apa yang menjadi partisipasi akan sangat cepat diterima baik oleh *publik* maupun oleh penerima aspirasi. Penerima aspirasi harus menampung semua keluh kesah dari masyarakat, mendiskusikan, kemudian merepons dan menanggapi apa yang menjadi masalah dari masyarakat. Dalam persoalan tentang partisipasi dari masyarakat, pihak berwenang yang sebagai penerima aspirasi masyarakat wajib menerima, merespons, sekaligus menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat.

Kasus konflik pabrik semen di Desa Tegaldowo, informan menyampaikan bahwa, justru aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui lembaga desa, kecamatan, bahkan Bupati. Namun, aspirasi tersebut kurang mendapat tanggapan yang memuaskan sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pihak-pihak yang berwenang. Kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat tentang informasi yang kurang jelas dan transparan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, dengan jawaban sama tentang *ketidaktahuan* soal pabrik semen menimbulkan pandangan negatif pada mereka. Seolah mereka dengan sengaja menutup-nutupi informasi yang sebenarnya, yang justru menimbulkan prasangka, yang semakin meningkatkan perasaan kecewa yang dipendam.

Bentuk partisipasi masyarakat yang ingin meminta kejelasan informasi yang sebenarnya, sudah dilakukan sejak tahun 2012, hingga 2013, tepatnya pada April 2013, dengan menanyakan lagi tentang kejelasan informasi pabrik semen, namun lagi-lagi bukan kejelasan informasi yang didapat, dikarenakan agen yang bertugas tidak mampu baik secara intelektual maupun emosional. Tampaknya pun agen yang tersebut sangat kurang memahami substansi dari demokrasi yang sebenarnya, yang berbasas dasar yaitu partisipasi masyarakat. Semakin kritis, masyarakat akan semakin sering bertanya, semakin sering menyampaikan pertanyaan maka agen harus semakin *capable*, atau mampu menyeimbangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Harusnya setiap aspirasi masyarakat segera mendapat respons atau tanggapan, agar apa yang menjadi kebutuhan mereka dapat terpenuhi, kejelasan informasi, keterbukaan dan pelayanan yang memuaskan menjadi modal utama, agar terjadi sebuah keseimbangan. Tidak lagi menggunakan cara-cara primordial seperti intimidasi, kekerasan dan sebagainya, yang diyakini tidak akan memberikan penyelesaian namun justru akan menambah kemarahan masyarakat semakin memuncak.

3. Perubahan Kebijakan

Sejak pabrik semen memiliki izin untuk membangun sarana dan prasarana pabrik, dengan memanfaatkan lahan perhutani, dengan dalih alih fungsi lahan atau alasan lain, yang pastinya disebut sebagai kesepakatan penguasa yang memiliki kekuasaan dengan segala kepentingannya yaitu kebijakan ekonomi yang entah bagi siapa manfaatnya, menimbulkan banyak pertanyaan besar, ada sesuatu kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberi izin pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. di lahan ratusan hektar milik perhutani. Kepentingan apa yang tersembunyi hanya para penguasa yang tahu. Kesepakatan di antara mereka hanya mereka yang tahu. Yang jelas kebijakan yang dibuat menampakkan keangkuhan sebagai elite penguasa dalam memuaskan kepentingan-kepentingan mereka. Kelas elite pemegang kekuasaan, dengan mengambil keputusan berdasarkan kelompok yang sejajar dengan mereka, lupa akan dimensi lain yang akan terkena dampaknya, yaitu kelas bawah yang terkena jerat-jerat madu namun berisi racun dari janji-janji politik di awal proses pemilihan penguasa.

Keadilan bukan hanya milik satu kelas atau kelompok kelas tertentu saja, namun realitasnya adalah demikian, seperti yang terjadi dalam setiap kebijakan yang dibuat selalu berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Yang dimaksud keadilan bukan atas dasar pesanan, bukan atas paksaan, juga bukan atas kepentingan kelompok tertentu. Keadilan haruslah memiliki substansi seimbang dan disertai dengan kesadaran. Untuk menjadikan keadilan seimbang dibutuhkan agen yang mampu memahami *keinginan dan kebutuhan* dari masing-masing komponen, bukan satu dimensi saja, baik keinginan ataupun kebutuhan, namun keduanya harus menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat keseimbangan. Untuk menjadikan masing-masing komponen saling menyadari dan saling menghormati, sangat diperlukan sebuah proses pendidikan yang berorientasi pada kebaikan dan kebenaran, dan harus secara masif dilakukan.

Dalam kasus konflik dengan PT. Semen Indonesia Tbk. apa yang menjadi keinginan, kepentingan, dan kebutuhan harus seimbang. Keinginan dan kebutuhan dari masyarakat haruslah terpenuhi terlebih dahulu, karena yang pertama kali terkena dampaknya adalah mereka. Dengan kata lain, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat sekitar pabrik harus dipenuhi.

Dengan adanya kebijakan tentang pendirian pabrik semen di lahan

milik perhutani, yang dengan jumlah ratusan hektar, menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi eksistensi kehidupan agraris yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Seperti penjelasan di atas telah disebut bahwa mayoritas petani di wilayah sekitar tempat pabrik dibangun ikut menggunakan lahan kosong milik perhutani di wilayah tersebut untuk mendulang penghasilan dengan pertanian. Lahan yang kosong atau disebut tanah persil digunakan petani dengan sistem sewa oleh pihak-pihak pejabat perhutani, dimulai dari mandor, mantri dan pejabat di atasnya.

Kesepakatan yang dilakukan di antara mereka sudah terjadi sangat lama, dan tidak ada hukum atau aturan perundang undangan yang mengatur. Kesepakatan mereka dibentuk berdasarkan ikatan primordialisme, kekerabatan, pertemanan, dan atas dasar saling membutuhkan. Selain dengan menyewa, para petani juga diharuskan membantu dalam perawatan hutan, sekaligus penanaman hutan kembali, dan mereka melakukan dengan penuh kesadaran meskipun dipandang tidak layak dan tidak manusiawi.

Kesadaran masyarakat akan sistem hegemoni yang dilakukan oleh pihak perhutani tersebut tidak menjadikan hubungan di antara mereka menjadi renggang, namun justru menjadi sebuah ekosistem yang baik selama ini. Jika dilihat fakta di lapangan, berapa hitungan jasa petani dalam membantu pemeliharaan dan penanaman hutan kembali di area tempat berdirinya pabrik semen? Berapa jumlah ekosistem lingkungan yang terselamatkan dengan bantuan petani? Bukankah ekosistem seperti ini harusnya dijaga sampai dengan keberlanjutan di masa depan?

Dengan kebijakan deforestasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan menghilangkan eksistensi kehidupan agraris petani yang sudah ada sejak dulu ada, menghilangkan kesepakatan-kesepakatan primordial yang sudah menjadi nilai-nilai kehidupan abadi masyarakat, memberikan dampak gejala di masyarakat sehingga menciptakan modus perlawanan sosial. Masyarakat petani yang selama ini sudah berbuat banyak dalam membantu ekosistem hutan yang baik, justru digeser oleh hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh kelas-kelas elite, demi beralih pada kemajuan ekonomi yang masih abstrak, masih ambigu dan sangat membingungkan. Meskipun secara lahir mereka tidak secara langsung menyampaikan aspirasi kritis mereka, bukan mereka tidak berani namun lebih berpihak pada budaya pedesaan yang selama ini mereka anut dan yakini, bahwa semua keangkuhan dan kesombongan akan kembali ke alam, yang akan menang adalah ketenangan, kelestarian, dan kedamaian. Untuk saat ini mereka akan menang, namun

bukan untuk masa mendatang dan seterusnya.

C. Faktor Lain Penyebab Gerakan

Selain beberapa konsep tentang munculnya konflik terhadap PT. Semen Indonesia Tbk. beberapa konsep berikut ini merupakan perkembangan pemikiran yang menjadi penyebab gerakan sosial, dikaitkan dengan kondisi lingkungan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Perlu juga diketahui bahwa perkembangan gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, di antaranya pendukung gerakan sosial dari wilayah lain, dengan membawa beberapa pandangan baru dan sangat nyata yang bisa dijadikan sandaran debat ilmiah.

Dalam beberapa kajian tentang hal-hal penting yang menjadi sandaran bagi perkembangan gerakan sosial, secara sengaja tidak disebut banyak tentang persoalan dokumen amdal, berikut dengan ketidakcocokan isi dokumen dengan fakta di lapangan, bukan maksud untuk menghilangkan fakta namun terdapat batasan-batasan dalam kajian sosiologi dan sulitnya berkoordinasi dengan mereka yang memiliki kompetensi dengan dokumen tersebut. Berikut beberapa isu yang menjadi sebab gerakan sosial masih terjadi hingga sekarang.

1. Kerusakan Lingkungan

Ekologi menjadi faktor sangat krusial dalam usaha menolak setiap jenis pertambangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, eksploitasi alam dalam skala besar sangat tidak diperbolehkan, dalam dunia manapun, dikarenakan alam adalah tiang utama dalam ekosistem kehidupan manusia. Jika alam rusak atau hilang maka ekosistem kehidupan akan berjalan tidak semestinya, dan bahkan tidak dikatakan lagi sebagai sebuah ekosistem karena satu struktur ekosistem sudah tidak ada.

Alam disebut sebagai kekuatan terkuat sebagai penopang sistem kehidupan dunia. Maka untuk tetap menjadi keberlanjutan sebuah ekosistem, alam harus tetap ada, dan dilestarikan selama-lamanya. Alam yang semakin rusak, bisa dikatakan kehidupan dunia semakin hilang dari peredaran. Seperti halnya sebuah sistem manusia dalam wilayahnya, negara menjadi tiang utamanya, yang menopang segala subsistem di bawahnya, harus kuat jika dari subsistem tidak berada pada jalan sesuai negara. Jika negara lemah maka sistem akan rusak dan/atau hilang, dan kehidupan tidak terintegrasi lagi, karena subsistem berjalan sendiri.

Bagi manusia yang merupakan subsistem dari kehidupan, tentu sangat memahami tentang keberadaan dari alam itu sendiri. Jika alam lestari, sistem akan asri, jika alam merana, sistem akan sengsara. Jika alam sengsara, manusia pun merana, jika alam musnah manusia akan punah, dan seterusnya. Untuk menjaga alam agar tetap lestari, manusia yang harus beraksi, tidak boleh basa-basi, pada orang-orang yang berniat merusak atau menghilangkan alam harus segera dihadapi.

Bagi masyarakat Desa Tegaldowo, Pegunungan Watuputih adalah sebuah perumpamaan saudara seiman sebudaya. Jalinan kekerabatan yang dibangun di antara mereka sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala. Sistem yang dibangun sejak lama, bahkan sebelum nenek moyang perusahaan tambang lahir, mereka sudah saling terikat satu sama lain, saling memahami, bahkan saling *take and give*. Disebut oleh tokoh penggerak, Pegunungan Watuputih ibarat ibu bumi, ibu yang menelurkan segala bentuk kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, ibu yang memberikan kenyamanan bagi anak-anaknya, dengan mengerami mereka dari cuaca dingin, ibu yang memelihara anak-anak mereka hingga tumbuh dewasa, ibu yang memberikan mereka minum pada anak-anak yang kehausan, dan ibu yang selalu mengawasi segala tingkah laku anak-anaknya dengan kasih sayang, dan seterusnya.

Sepanjang sejarah masyarakat Desa Tegaldowo, Pegunungan Watuputih memang memiliki hamparan lahan yang subur, bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup, bisa memberikan cukup air karena di bawah pegunungan terdapat CAT (cekungan air tanah) yang memiliki sumber air bisa disebut tidak akan pernah habis, bisa membantu mengurangi hawa yang dingin, dan bisa memberikan ketenteraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam kesunyian.

Apa yang terjadi kemudian jika Pegunungan Watuputih tidak lagi memiliki makna sebagai ibu bumi, tidak lagi memiliki identitas dengan kokohnya sebagai sistem besar, apa yang terjadi jika Pegunungan Watuputih merana, sengsara, dikarenakan keserakahan manusia, kepentingan sesaat manusia, apakah sistem primordial akan selalu kalah oleh kepentingan kekuasaan?

2. Hilangnya Sub-Ekosistem Alam

Pegunungan Watuputih, seperti dijelaskan tentang makna dan nilai-nilai bagi kehidupan manusia, Pegunungan Watuputih juga disebut sebagai

sistem besar yang di dalamnya terdapat subsistem yang saling terintegrasi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pegunungan Watuputih berubah menjadi ekosistem yang pincang sejak hadirnya perusahaan tambang dimulai tahun 1996, dan secara masif diikuti perusahaan tambang lainnya. Dengan melakukan kegiatan penambangan dan peledakan, meskipun masih dibidang dalam skala kecil atau galian C, namun tetap saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebuah ekosistem. Jika proses pertambangan terus dilakukan, maka tidak mungkin sub-ekosistem akan hilang atau punah.

Bagi masyarakat telah disebutkan bahwa ekosistem dengan alam Pegunungan Watuputih sudah terjalin sangat lama. Jika Pegunungan Watuputih hancur maka yang menerima dampaknya adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat dalam menjalankan sistemnya akan berjalan pincang tanpa ada Pegunungan Watuputih. Subsistem yang terkena dampaknya adalah hilangnya tanaman pertanian yang merupakan komoditas jangka pendek petani untuk menopang kehidupan sehari-hari, seperti jagung, yang bisa panen 2 kali dalam setahun, dan hilangnya hewan ternak seperti sapi, ayam, bebek, yang membutuhkan makanan yang berasal dari sumber tanaman jagung.

Sub-ekosistem lain yang akan turut hilang adalah ekosistem gua di bawah Pegunungan Watuputih, yang kelelawar dan binatang lain nyaman tinggal di habitat mereka. Ekosistem dalam gua disebut sangat membantu pertanian masyarakat desa, karena dengan adanya kelelawar yang makanannya adalah serangga dapat membantu petani dalam mengurangi hama serangga bagi tanaman pertanian, dan tentu saja sangat sedikit diperlukan obat-obatan untuk mengusir serangga tersebut.

Air menjadi sub-ekosistem yang akan hilang dengan masifnya penambangan. Kebutuhan air bagi manusia sangat tidak bisa ditawar lagi, yang selama ini kebutuhan air diambil dari sumber yang berasal dari gua yang berada di bawah Pegunungan Watuputih, dan mengalir ke sumur-sumur masyarakat, menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minum, mandi, dan sebagainya. Selain menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan air juga sangat diperlukan untuk mendukung ekosistem pertanian masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa demi kepentingan satu sistem, mengakibatkan sistem lain musnah. Demi kepentingan satu kelompok, mengakibatkan kelompok lain musnah. Demi kepentingan pertambangan ekosistem yang

terbangun selama ini akan musnah.

3. Pencemaran Lingkungan

Dampak pertambangan yang selama ini menjadi dorongan dalam memberikan argumen setiap gerakan sosial adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa berasal dari suara mesin tambang, mesin truk pengangkut hasil tambang, suara ledakan, serta pencemaran yang berasal dari debu dan asap yang dihasilkan dari mesin-mesin tersebut.

Pencemaran lingkungan bagi masyarakat Desa Tegaldowo bukan hal yang baru, karena sebelum munculnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. penduduk sudah menerima dampak lingkungan dari perusahaan tambang terdahulu. Dampak pencemaran lingkungan sangat dirasakan oleh masyarakat desa, adalah debu jalanan pada saat kendaraan pengangkut hasil tambang melintas di tengah-tengah permukiman penduduk. Debu mengepul di saat roda bergerak di atas jalan yang tidak beraspal dan hanya dilapisi struktur tanah padas, putih, di atasnya, menambah parahnya cuaca panas yang semakin menyakkan dada.

Debu dan suara yang dihasilkan dari kendaraan pengangkut hasil tambang sangat mengurangi kenyamanan yang selama ini menjadi ciri lingkungan pedesaan. Banyak masyarakat yang tidak bisa memejamkan mata walau sejenak, akibat suara dari truk pengangkut hasil tambang, kebisingan sangat dirasakan dengan kondisi sekarang. Dampak kebisingan yang ditimbulkan selain mengarah pada kondisi fisik, juga menimbulkan kebisingan mental, yang belum sangat diterima oleh masyarakat di Desa Tegaldowo. Mereka membayangkan jika seandainya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. benar-benar hadir dan beroperasi di desa mereka, malapetaka kebisingan yang akan terjadi.

D. Ketidaksiapan Masyarakat dalam Menerima Budaya Baru

Ketidaksiapan masyarakat dalam menerima budaya modern yang datang, menjadi faktor penyebab gerakan sosial, perubahan yang sangat cepat dirasakan oleh masyarakat pedesaan memberikan respons balik dengan menolak budaya tersebut. Bagi masyarakat desa yang masih mengagungkan budaya-budaya lama, seperti menganut sistem harmonisasi yang secara turun-temurun dimiliki, unsur rasa lebih kuat daripada rasio, kebiasaan bertahan terhadap perubahan sosial, menempatkan alam sebagai kekuatan sinergitas, cenderung memilih hukum masyarakat sebagai kontrol sosial

(Ngadisah 2006:119), sangat bertentangan dengan budaya modern yang begitu progres ke masa depan, kebiasaan yang menerima perubahan dan kreativitas, sistem kontrol sosial melalui hukum yang kuat. Jika kemudian kedua budaya tersebut dicampurkan maka akan menimbulkan gejala dan menjadi rasa frustrasi yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan perlawanan sampai kapanpun, karena masing-masing berpegang pada budaya etnosentrisme. Jika itu terjadi maka upaya akomodasi akan sangat sulit dilakukan.

Faktor lain terkait dengan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima budaya modern adalah faktor pendidikan. Perlu diketahui bahwa masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya mayoritas memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah akan membangun kevakuman dalam pola berpikir mereka. Upaya yang mesti dilakukan untuk menjadikan masyarakat menerima perubahan dan menyamakan persepsi adalah mengembangkan bidang pendidikan.

Pendidikan sebagai satu satunya jalan untuk mengubah masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka, masyarakat modern, yang mampu berpikir kritis dalam setiap fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungannya, agar dapat berkontribusi dalam setiap perkara yang hadir dengan memiliki dasar dan alasan yang rasional, ilmiah, dan bersumber pada kebenaran dan keadilan.

E. Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Nasional di Rembang

Terdapat beberapa pandangan tokoh agama skala nasional yang ada di Rembang tentang berdirinya pabrik semen. Beberapa tokoh mengisyaratkan untuk mendukung dan beberapa tokoh menolak pabrik semen. Hal ini menimbulkan beberapa multitafsir dari kelompok masyarakat yang menolak. Beberapa bahkan menyatakan kritis terhadap mereka, meskipun masih dalam bahasa *sanepo* tapi kritis tersebut bermakna sangat keras.

Masyarakat kelompok kontra dari awal sebelum melakukan aksi gerakan selalu *rawuh* ke beberapa tokoh agama, untuk meminta saran, pendapat, dan *wejangan*, menanyakan perihal bagaimana jika tindakan dalam menolak dilaksanakan, bagaimana dampaknya, dan bagaimana solusinya. Seolah tokoh agama menjadi tempat pertimbangan, tempat diskusi bagi kelompok kontra pabrik semen sebelum melakukan setiap aksinya.

Bagi masyarakat Rembang dalam meminta saran dan wejangan kepada tokoh agama bukanlah sesuatu hal yang baru, di samping Rembang adalah kota santri, juga dikarenakan agama mereka membenarkan bahwa tokoh agama sering kali menjadi teladan, panutan dalam setiap tindakan dan memiliki pengetahuan agama yang sangat tinggi. Logikanya, sebagai orang yang beragama kuat, segala sesuatu harus berdasar pada pandangan agama yang didapatkan dari seorang *kyai*.

Tokoh agama bagi masyarakat yang kontra pabrik semen juga memiliki nilai-nilai *milenarianisme*, atau spirit *Imam Mahdi*, semangat yang kuat bersumber dari tokoh agama. Dengan kata lain, tokoh agama adalah simbol kebenaran, keadilan, kesejahteraan bagi umat universal. Dalam mencari sebuah kebenaran dan keadilan maka dalam pandangan *milenarianisme* ada pada tokoh agama. Maka, pada saat tokoh agama mengatakan bahwa sebuah tindakan tersebut dikatakan benar, maka nilai semangat yang dihasilkan sungguh luar biasa. Dorongan semangat yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran dari tokoh agama akan menyebar luas dan cenderung akan mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Dengan slogan membela kebenaran, keadilan, bahkan beberapa pendukung mengatakan berani berkorban nyawa demi keadilan dan kebenaran, karena mereka menganggap bahwa pabrik semen akan membawa kesengsaraan, kerugian bagi masyarakat sekitar dan masa depan masyarakat, semangat gerakan masih terpancar hingga saat ini.

Meskipun pandangan beberapa tokoh agama berbeda dalam menyingkapi hadirnya pabrik semen, justru malah memberikan semangat baru, untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok kontra berdasarkan prinsip hidup dasar manusia, yaitu kebenaran, keadilan terhadap apa yang selama ini mereka alami. Pengalaman pengalaman yang mereka lihat adalah fakta yang tidak bisa diingkari. Ketidakadilan dan ketidakbenaran yang diterima menjadi cambuk bagi pengukuhan pemikiran kritis mereka. Kritis terhadap pemerintahan, kritis terhadap tokoh agama, dan kritis terhadap masyarakat lain yang pro, dan yang tidak memberikan pendapat apa pun.

F. Perbedaan Pandangan Akademisi

Perbedaan pandangan bermula dari pendapat pakar akademisi ahli geologi yang mengatakan bahwa bentangan karst Rembang tidak termasuk kawasan yang dilindungi, yang dilindungi adalah kawasan

karst Sukolilo, Gunung Sewu, dan kawasan karst Gombang. Mereka juga menekankan dengan mengatakan bahwa kawasan karst Rembang masuk dalam kategori karst muda sehingga tidak menjadi persoalan jika dijadikan daerah pertambangan (*Semarang Metro*, 20 Maret 2015). Secara sosial, pembangunan pabrik semen membawa dampak positif yang signifikan, yaitu masyarakat bisa bekerja di pabrik sehingga pengangguran akan berkurang.

Berdasarkan data ilmiah, pendapat ahli memiliki dasar yang kuat dalam membuat sebuah kajian analisis geologi, namun bagi masyarakat hal yang disampaikan memiliki pengertian yang berbeda, dikarenakan makna yang sebenarnya masih bersifat alamiah (pengalaman). Tentunya pandangan ahli sangat bersinggungan dengan pengalaman dan keyakinan mereka, baik dari konteks bumi, sosial dan budaya.

Masyarakat kemudian menciptakan opini baru untuk menjadikan alasan persoalan dari perbedaan pandangan dari ahli akademisi untuk membantu dalam meningkatkan ekskalasi gerakan, dan mereka tetap berpijak pada ahli yang memiliki pandangan sama dengan pengalaman dan keyakinannya.

G. HAM dan Demokrasi

Faktor lain yang mendorong gerakan adalah perlindungan akan hak-hak asasi dalam berdemokrasi, hak berbicara, hak mengemukakan pendapat, hak persamaan di antara yang lain, diatur dalam perundang-undangan. Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memiliki asas (1) Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia, (2) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan (Suyahmo 2015). Selain dapat menguatkan Negara demokrasi, gerakan sosial meningkatkan ikatan solidaritas organisasi yang tergabung di dalamnya. **Ornop** [?] yang ikut tergabung dalam gerakan meliputi LSM, LBH, YLBHI, KOMNAS HAM. Dalam gelombang gerakan sosial selanjutnya peran **ornop** sangat berperan dalam membantu setiap aksi, menjadikan gerakan sosial semakin kuat dan berlangsung sangat lama.

Pada kasus gerakan masyarakat Desa Tegaldowo, membuktikan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia selama ini belum terlihat di dalam sebuah pemerintahan demokrasi. Hak mendapatkan keadilan, hak memperoleh kebenaran informasi belum terwujud. Justru yang terjadi adalah perwujudan kekuatan otoritas mereka yang sewenang-wenang

sebagai sistem yang memaksa terhadap wong ndeso yang dengan segala kekurangannya.

Mereka juga senantiasa melakukan hal-hal dengan dasar legitimasi kekuasaan untuk melanggengkan budaya superior mereka. Budaya tidak peduli dengan masyarakat yang kritis, budaya mendiskriminasi subsistem, karena menurut pandangan mereka adalah etnosentrisme. Mereka sengaja *memiringkan, menyeringai*, terhadap pandangan berbeda, yang menurut mereka disebut *mengada-ada*, tidak *sendiko dhawuh*.

Mereka melupakan bahwa perkembangan zaman sudah bergerak sangat cepat, perkembangan pola pikir masyarakat sudah meningkat. Demokrasi menjadi milik masyarakat seutuhnya. Harusnya mereka justru menjadi juru kunci bagi pelaksanaan kelangsungan demokrasi. Berhasil atau tidaknya sebuah Negara demokrasi dapat diketahui dari seberapa jauh dari masyarakat dapat berkontribusi dalam setiap pembangunan Negara.

Model pembangunan harusnya tidak lagi dari *up to bottom*, isu sentralistik, pada pembangunan tertentu perlu model *bottom up*, partisipasi masyarakat menjadi ukuran, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat Desa Tegaldowo selama ini memiliki sumber penghasilan yang mencukupi. Dari hasil pertanian mereka sudah sangat bisa untuk kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga.

Model pembangunan sentralisasi hendaknya harus diubah dengan model desentralisasi, yang tujuan pembangunan sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan, dan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu harusnya ada perubahan paradigma dari *power centered* menjadi *society centered*. Untuk menjadikan paradigma *society centered*, sangat diperlukan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat, sebagaimana prinsip dasar dari sebuah negara demokrasi.

Sejak era Reformasi bergulir menjadi sistem Demokrasi, tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat. Masyarakat sadar akan tugas, kewajiban, dan fungsi sebagai masyarakat, yang harus melawan pada hal-hal yang bertentangan dengan asas dan prinsip-prinsip kebenaran, kesejahteraan, dan ketidakadilan.

Reformasi memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan negara demokrasi, dengan membuka cakrawala pemikiran baru bagi masyarakat bawah atau masyarakat pedesaan. Masyarakat mulai menyadari tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak asasi mereka, hak-hak hidup, hak-hak memperoleh keterbukaan, hak-hak keadilan, baik dalam hukum rakyat

maupun dalam forum diskusi.

Demokrasi juga mengembangbiakkan masyarakat terbuka dari masyarakat tertutup, dengan menggeser budaya etnosentrisme menjadi budaya penuh keterbukaan, mengembangkan pemikiran dan menyumbangkan buah pemikiran yang nantinya dapat memberikan kritik dan juga bisa menerima kritik. Pemerintah daerah dalam kasus ini seolah tidak merepresentasikan upaya memiliki pemikiran terbuka yang selama ini menjadi paradigma dalam demokrasi. Bukan merasa bangga memiliki masyarakat yang sudah bergerak maju dari mereka, malah justru mengatakan hal-hal yang mengatasnamakan simbol kekuasaan mereka. Ironi dan tragis bisa disebut demikian, karena fakta tidak akan bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari.

BAB 4

STRATEGI PERLAWANAN

A. Strategi Tindakan Perlawanan

Strategi tindakan atau aksi mencakup tentang berbagai cara dalam bentuk kegiatan atau aktivitas dengan tujuan menolak baik dengan cara sembunyi maupun secara terang-terangan (terbuka). Bagi masyarakat yang melakukan aksi sembunyi bukan berarti tidak mau melawan secara terang-terangan, namun atas dasar nilai tertentu, yang dianggap baik menurut mereka.

Nilai moral petani yang lebih memilih tindakan aman. Memelihara subsistensi sebagai petani cenderung menciptakan masyarakat tidak berbuat apa-apa dan lebih memilih mengurung diri dan melakukan perlawanan dengan keyakinan mereka. Kebiasaan masyarakat menyimpan segala tindakan yang merugikan dilampiaskan dengan cara yang mengintrepretasikan kedendaman dalam bentuk *kutukan*.

Tindakan masyarakat dalam bentuk dendam dengan menggunakan *kutukan* sebagai sarana perlawanan bagi masyarakat umum memiliki makna yang mendalam dan dianggap memiliki nilai *mistis*. Kutukan merupakan bahasa legenda (*fake*) yang memiliki pengertian buruk bagi yang kena *kutuk*, seperti misal Legenda Malin Kundang, Legenda Danau Rawa Pening, dan lainnya. Bentuk perlawanan *kutukan* dilakukan oleh masyarakat yang mengalami penyerobotan lahan, penipuan pembelian lahan yang dilakukan oleh oknum yang berkepentingan dengan makelar tanah dan bukan kepada PT. Semen Indonesia Tbk.

Langkah lain yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menolak pabrik semen dengan mempercayai dan meyakini bahwa terjadinya kejadian-kejadian yang dianggap aneh beberapa kali terjadi di lokasi pabrik semen, seperti beberapa kali mengalami longsor dan beberapa kali kejadian kecelakaan sehingga berakibat pada meninggalnya salah satu pegawai, dianggap bahwa ada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok lain

selain masyarakat dan ikut bergabung dalam usaha menolak keberadaan pabrik semen. Masyarakat beranggapan bahwa alam memiliki cara sendiri dalam menolak dan menentang segala bentuk eksploitasi terhadap dirinya.

Aksi terbuka mulai dilakukan oleh masyarakat dalam menolak keberadaan pabrik semen pada awal tahun 2011, sejak mulai terdengar akan dibangunnya pertambangan pabrik semen di wilayah mereka. Aksi penolakan diawali dengan hanya beberapa anggota masyarakat atau pemuda, kemudian menyebar dan semakin banyak pendukung dari masyarakat yang berada di sekitar desa. Aksi terbuka pertama yang dilakukan adalah dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta tentang dampak jika keberadaan pabrik semen berdiri di tanah sekitar mereka.

Aksi terang-terangan masyarakat dalam menolak pabrik semen disertai dengan pemasangan pamflet, spanduk, banner yang bertuliskan tolak pabrik semen. Tempat-tempat yang menjadi titik kumpul, di gardu poskamling, rumah ditulis dengan menggunakan pewarna menolak keberadaan pabrik semen. Aksi tulisan tentang tolak semen dapat dijumpai di tempat tertentu sepanjang masuk Desa Tegaldowo hingga Desa Pasucen menuju lokasi pabrik semen.

Pro dan kontra masyarakat dalam menanggapi berdirinya pabrik semen dibuktikan dengan blok-blok kelompok masyarakat antara pro dan kontra secara terpisah. Masyarakat kontra membentuk kelompok sendiri dan memilih tempat titik kumpul untuk menyalurkan informasi atau aspirasi. Ketegangan urat saraf antarkelompok masyarakat memicu terjadinya konflik horizontal.

Aksi dilanjutkan dengan protes yang awalnya dilakukan hanya beberapa kelompok pemuda dalam lingkup desa, kemudian berlanjut menuju pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. *Soft* protes yang dilakukan tidak di tanggapi, kemudian di putuskan untuk melakukan aksi demo di Kabupaten Rembang, hingga kemudian pemblokiran jalan lokasi pabrik semen, hingga aksi pendirian tenda selama tiga tahun.

Seakan tidak berkurang ide dalam menciptakan upaya mendukung gerakan, aksi mengecor kaki di Istana Presiden telah dua kali dilakukan menuntut agar dilakukan penutupan pabrik semen di wilayah Rembang. Kemudian aksi jalan kaki menuju Ibu Kota Provinsi, menuntut agar pemerintah mematuhi putusan MA tentang pabrik semen Rembang. Aksi terbuka masih berlanjut sampai dengan sekarang. Berbagai modus kepentingan membuat konflik semakin berkembang dan semakin lama.

B. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan menjelaskan dari awal tentang proses pembentukan organisasi yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan menjelaskan tentang lembaga organisasi lain yang ikut mendukung gerakan perlawanan sosial pada kasus konflik pabrik semen di Rembang antara masyarakat dengan PT. Semen Indonesia Tbk. Kelembagaan terbentuk berdasar pada eksistensi kelompok masyarakat dalam menyampaikan identitas mereka, sebagaimana dari awal masyarakat Desa Tegaldowo mulai membentuk organisasi atau paguyuban didasari oleh informasi yang berkembang tentang substansi gerakan sosial.

Strategi kelembagaan dalam bahasa lain disebut sebagai *seduluran*, mengambil kata dari Saminisme yang memiliki pengertian *seduluran* tanpa batas kelas. Tujuan *seduluran* hanya memiliki *sama rasa, sama rupa* dan *sama nilai*. *Seduluran* memiliki kesamaan dengan persaudaraan dan memiliki makna yang sangat dalam dan kuat bagi anggotanya, selalu konsisten dan komitmen.

Dasar yang menjadi tujuan pembentukan organisasi dalam kasus konflik pabrik semen Rembang adalah: menolak segala bentuk pertambangan baik dalam skala kecil maupun skala besar, melestarikan dan mempertahankan kekuasaan alam agar jangan sampai musnah dikarenakan pertambangan, memperjuangkan hak-hak atas tanah yang hilang, memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kesejahteraan hidup ekonomi agraris.

1. Penyebaran *Seduluran*

Lewis Coser berpendapat bahwa dengan adanya konflik akan dapat menguatkan serta mempersatukan ikatan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpecah dan terpisah karena suatu hal yang berakibat pada pudarnya ikatan *seduluran* yang sebelumnya telah dibentuk melalui sebuah sistem tradisional yang disebut oleh Durkehim sebagai solidaritas mekanik, ikatan tanpa batas, tanpa kelas, dan tanpa diferensiasi sosial.

Ikatan *seduluran* tradisionalistik yang terjadi pada konflik semen di Rembang merupakan turunan dari peran solidaritas mekanik dari masyarakat di Desa Tegaldowo yang telah lama memahami nilai-nilai budaya kerukunan yang sudah terbangun sejak zaman nenek moyang dan berlangsung hingga sekarang. Seakan nilai tersebut akan tetap ada dan bergerak ke zaman modern dengan tetap memegang prinsip pada kesadaran hidup rukun, tanpa batas, tanpa memandang status sosial dan

tanpa perbedaan.

Seduluran dalam budaya pedesaan Jawa berkesan sangat familier di telinga masing-masing dan sudah menjadi hal wajib bagi masyarakat pedesaan pada umumnya untuk memahami makna dan sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami makna *seduluran* saja belumlah cukup sebelum ikut mewujudkan ke dalam tindakan yang nyata. Ibarat pepatah makna tanpa suara, makna dikategorikan sebagai kediaman, sedangkan suara merupakan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa pendidikan makna dan suara adalah mekanisme atau prosedur sebuah sistem yang meliputi adanya *input* dan *outcome*. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain dengan yang disebut evaluasi, karena di dalam makna yang benar terdapat tindakan yang benar, dan untuk mencapai tingkat kebenaran yang tinggi memerlukan apa yang disebut dialektika sosial.

Konflik jika dipahami sebagai makna dan bukan sebagai fakta, bukan sebuah kewajiban dalam menemukan solusi atau penyelesaian, karena pada dasarnya konflik merupakan bagian dari ikatan sistem. Jika ada upaya menyelesaikan hanya sebatas mengikuti proses memahami dari sistem tersebut, dan tidak terpaku dalam sebuah upaya akhir untuk meredam konflik atau bisa disebut *tidak ada akomodasi yang sempurna yang ada hanyalah penyelesaian semu*. Jika konflik didasari dengan bagaimana memahami sebelumnya, tanpa batas apa pun dan tanpa ada kepentingan maupun kekuasaan, konflik akan dengan mudah selesai dengan sendirinya.

Seduluran adalah kata benda dengan imbuhan awalan *se-* dan akhiran *-an*, kata dasar *dulur*. *Dulur* pada dasarnya memiliki makna yang sempit, dalam bahasa pedesaan *dulur* bisa disebut individu yang masih ada ikatan darah dan memiliki ciri ikatan yang sangat kuat karena didasari oleh batin yang kuat. *Seduluran* memberikan maksud pada ikatan antara individu yang masih ada hubungan darah dari struktur kelembagaan yang berada di atasnya. Dalam bahasa sosiologi disebut sebagai paguyuban dalam arti tradisionalistik. Meskipun dianggap tradisional, tingkat *seduluran* yang bersumber pada ikatan darah masih eksis hingga sekarang dan tergolong sangat kuat dan tahan lama seperti gerakan sosial pada konflik semen Rembang. Selain ikatan darah disebut sebagai ikatan tradisionalistik, terdapat hal-hal lain yang dikatakan *seduluran* dalam kategori primordial, yaitu *seduluran* karena persamaan ras, persamaan agama, persamaan kulit, atau disebut identitas sosial.

Seduluran berkembang luas dan memiliki bentuk yang beragam, dan bukan atas dasar ikatan darah saja, namun juga berdasar pada hal lain. *Seduluran* tanpa batas ikatan primordial, menciptakan sebuah paradigma gerakan yang sangat kuat dan sangat terkonsentrasi dengan mengedepankan tujuan bersama (*common goal*) yaitu menolak hadirnya pabrik semen di wilayah Jawa dan pemerintah untuk segera mencabut perizinan dan membatalkan pabrik semen beroperasi di Rembang Jawa Tengah.

Seduluran dalam studi gerakan sosial pada konflik pabrik semen di Rembang mencuat setelah beberapa kali menelusuri dan masuk dalam jaringan orang-orang yang tergabung dalam organisasi gerakan sosial, bahwa makna dan bentuk *seduluran* yang sering disebut oleh tokoh penggerak dimulai dari *dulur* seikatan darah hingga kemudian merembet dan menyebar ke kelompok lain dalam lintas batas baik nasional maupun internasional.

Seduluran menjadi bagian dari beberapa strategi yang disampaikan dalam penelitian ini, karena *seduluran* bisa disebut sebagai bentuk yang berisi cara-cara yang dapat berupa upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar ikut setuju dalam menolak dan mendukung gerakan sosial. Dari beberapa pertemuan dengan beberapa penggerak, tentang bagaimana menjelaskan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dai pabrik semen menjadi topik utama dalam setiap pembicaraan. Dari beberapa kali penyampaian informasi kepada masyarakat sering mendapatkan respons yang kurang baik, bahkan ada beberapa yang terus terang mencibir dengan berbagai alasan. Ada pula yang menolak dengan bahasa yang kasar.

Pendidikan masyarakat bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan tokoh penggerak sudah melakukan proses pendidikan tersebut. Strategi yang dilakukan dengan penyampaian informasi yang sebenarnya, berdasarkan fakta fakta yang ada, karena dengan fakta segala informasi adalah benar dan nyata. Strategi lain adalah bagaimana proses penyampaian yang dilakukan dengan orang terdekat atau seikatan darah, dan upaya tersebut intens dilakukan. Strategi lain adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode *alon-alon*, sabar, dan telaten. Beberapa penggerak menggunakan keterampilan berkomunikasi mereka dalam situasi yang berbeda-beda.

Seduluran yang ada kaitannya dengan gerakan sosial dapat diuraikan

dengan singkat menjadi beberapa bentuk *seduluran* berdasarkan interaksi sosial, dijelaskan sebagai berikut.

a. Seduluran Sedarah

Seduluran karena ikatan sedarah menjadi bagian terpenting dalam strategi penyebaran informasi terkait dampak semen untuk menggaet dukungan dari masyarakat. Ikatan primordialisme menjadi target awal bagi gerakan tolak pabrik semen dikarenakan faktor kedekatan, kepercayaan, dan kebatinan. Di sisi lain, ikatan primordialisme yang telah dibangun sejak lama memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi secara jelas, gamblang, dan mudah diterima.

Seduluran yang dibangun karena ikatan darah atau primordialistik menyebar ke seluruh penjuru lingkungan dari masyarakat Desa Tegaldowo menuju ke lingkungan desa yang lain, dan bisa dikatakan masyarakat yang menolak menjadi semakin banyak pada awalnya. Ini terlihat dari demo tolak semen pertama kali di Kabupaten Rembang. Dalam demo tersebut, hadir ribuan orang atau sekitar 8–10 truk kemudian jumlah semakin kurang dikarenakan beberapa alasan, namun meskipun sekarang jumlah tidak sebanyak awal demo tolak semen, gerakan justru bukannya melemah, malah semakin kuat dan luas karena faktor-faktor perkembangan bentuk *seduluran*. Di sisi lain, kejadian politik pilkades juga menciptakan perpecahan pada kelompok gerakan menjadi semakin berkurang karena perbedaan pilihan dalam mencoblos calon kepala desa.

Seduluran dalam ikatan darah memiliki peran penting dalam strategi pencarian dukungan dalam lingkup pedesaan seperti yang selama ini terjadi di Desa Tegaldowo, Desa Timbrangan, dan desa di sekitarnya. Beberapa tokoh masyarakat desa seperti Kepala Desa Timbrangan masih memiliki ikatan darah dengan Joko Priyanto, yang merupakan tokoh penggerak. Sukinah dan yang lain juga memiliki ikatan darah dengan masyarakat tolak lainnya, begitu seterusnya saling menyambung satu dengan lainnya.

Bentuk *seduluran* lain yang memberikan tema primordialistik adalah kedekatan, ketetanggan, seperti teman dekat, dan para masyarakat yang menjadi tetangga dekat. Seperti dalam kelompok dusun Tegaldowo mayoritas menolak karena berdekatan dengan penggerak yaitu Sukinah.

b. Seduluran Seide, Seprinsip

Seduluran berdasarkan persamaan ide, persamaan prinsip, dan persamaan tujuan menjadi tema tersendiri dalam setiap kasus gerakan

sosial yang terjadi di beberapa penjuru dunia. Persamaan kelas menjadi acuan dalam menciptakan gerakan sosial dengan menjadi *seduluran persamaan kelas*, yaitu kelas masyarakat yang terhegemoni oleh kekuatan dan kekuasaan. *Seduluran* kelas selama ini sering mengalami intimidasi, gangguan, ancaman dan berbagai praktik tidak baik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan.

Marx menyebut bahwa gerakan sosial diawali adanya kesenjangan yang mencolok antarkelas yaitu kelas proletarian dan borjuis, kelas subordinasi dan superordinasi. Di dalamnya, kekuasaan dan kekuatan, kewenangan dan kepentingan berada di balik faktor awal gerakan sosial. Proses perjuangan kelas Marx, Weber, dan Simmel menjadi akar dari semua gerakan sosial yang berdasar pada persamaan senasib dari kelas bawah yang harus tunduk pada hegemoni superior.

Ketertindasan masyarakat Desa Tegaldowo terlihat dari beberapa kejadian mulai dari intimidasi, ancaman, penipuan lahan, pembohongan yang dilakukan oleh penguasa memberikan inspirasi, dan semangat membara untuk menentang kelas tersebut. Dikatakan lagi bahwa sebenarnya konflik yang terjadi dalam menolak pabrik semen merupakan rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya tujuan konflik adalah melawan tindakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik kekuatan dan kekuasaan.

Seduluran dalam persamaan ide, prinsip dan tujuan dalam konflik menolak pabrik semen terlihat dalam beberapa kali aksi yang dibantu oleh beberapa kelompok atau organisasi yang memiliki persamaan ide dan tujuan. Seperti kelompok JMPPK dari Pati, Blora dan Grobogan, dibantu dengan NGoS dalam bidang hukum, yaitu YLBHI, LBH, JATAM dan dari Komnas HAM.

c. *Seduluran* Menuntut Kejujuran

Seduluran dalam menuntut kejujuran menjadi idaman bagi masyarakat di Desa Tegaldowo dan sekitarnya. Karena selama ini masyarakat merasa apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan terkesan melakukan pembodohan publik di tengah perkembangan teknologi.

Kejujuran dari informasi yang diberikan menjadi kunci solidaritas masyarakat Desa Tegaldowo, yang terinterpretasikan dalam kelembagaan sebagai masyarakat pedesaan dan sekaligus perkotaan. Di mana ada kejujuran maka di situ ada kebenaran dan keadilan. Selama ketidakjujuran

masih menjadi kepentingan kelompok maka kesenjangan pasti akan terjadi dan berbuah pada gerakan protes.

Pihak-pihak korporasi dan pemerintah seolah menutupi informasi yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari cerminan sosialisasi yang selama ini seolah sudah dilaksanakan, namun pada dasarnya belum menjelaskan tujuan dari sosialisasi tersebut. Dikarenakan juga oleh pembawa agen sosialisasi belum mampu memahami substansi dari sosialisasi sehingga masyarakat tidak memahami betul apa maksud dari informasi tersebut.

Ketidajujuran juga terlihat dari bagaimana tindakan oknum-oknum memperdaya masyarakat dalam proses jual beli lahan yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan pelik. Ketidajujuran semakin menambah rumitnya pencarian penyelesaian yang sebelumnya sudah ada.

“Misalke tumindak e pamong-pamong niku jujur, nggih menawi mboten wonten tiyang tolak semen”. Kalimat tersebut merupakan kutipan percakapan dari salah satu kelompok gerakan yang pada intinya adalah menunggu kejujuran dari oknum yang bermain dalam konflik semen di Rembang.

Berbagai bentuk *seduluran* memicu gerakan sosial yang solid dan kompak hingga sekarang. *Seduluran* yang bersifat primordial akan lebih kuat daripada *seduluran* yang ada karena faktor kepentingan. Hal itu dikarenakan *seduluran* yang bersifat primordial dilandasi tanpa pamrih, ikhlas, dan penuh pengorbanan demi membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

C. Membentuk Organisasi Primordial

Proses terbentuknya organisasi yang ada kaitannya dengan gerakan sosial dalam menolak pabrik semen di Rembang diawali dengan mengadakan pertemuan pemuda yang dimotori oleh organisasi pemuda setempat. Mereka berkumpul di kantor balai Desa Tegaldowo pada Mei 2013. Beberapa pemuda mengadakan pertemuan bermaksud membentuk sebuah paguyuban dengan nama SUKA DAMAI. Namun, dalam proses pembentukan digagalkan oleh pihak pemerintah desa karena pertemuan dianggap tidak berizin. Di samping itu, paguyuban dianggap ilegal dikarenakan tidak ada kelengkapan administrasi yang bisa melegitimasi sebuah organisasi.

Meskipun digagalkan, namun substansi paguyuban nyatanya sudah terbentuk hingga sekarang. Mereka berpendapat paguyuban hanyalah wadah dari sisi luar (lahiriah), secara substansi dari organisasi merupakan

sebuah sistem yang berjalan dengan mekanisme dan pembagian tupoksi nyatanya sudah berjalan hingga sekarang. Selama ini juga tidak ada hal-hal yang menimbulkan gejolak di antara subsistem tersebut.

Ide pembentukan paguyuban berasal dari seorang tokoh agama setempat yang pada waktu itu ikut mendukung gerakan tolak pabrik semen. Namun dalam perkembangannya, ia berubah menjadi pendukung pabrik. Meskipun begitu, pemikirannya memberikan sesuatu yang baru bagi masyarakat yang menolak yang sebelumnya tidak pernah tahu makna, maksud dan tujuan membentuk sebuah wadah organisasi. Yang mereka tahu adalah selama ini memang kelompok masyarakat yang sering melakukan simbol-simbol dalam menolak pabrik semen, seperti mengadakan gerombolan sendiri, kelompok sendiri, dianggap sebagai hal yang negatif bagi masyarakat lain, bahkan ada pendapat dengan menyebut “*gerombolan ora nggenah*”, *kelompok grudak gruduk*”.

Dianggap *miring* oleh sekelompok masyarakat yang selalu memojokkan, atas inisiatif bersama dan saran dari seorang tokoh agama setempat sepakat membuat paguyuban atau organisasi sebagai wadah ide, gagasan dan segala mekanisme langkah ke depan untuk mengeksistensikan organisasi dalam menolak pabrik semen di Rembang.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan banyak belajar dari beberapa kelompok gerakan sosial lainnya, yang menjadi pandangan jelas bagi kelompok masyarakat penolak pabrik semen di wilayah Rembang tertuju pada kelompok penolak di Kabupaten Pati, Blora, dan Grobogan. Dengan inisiatif bersama, maka disepakati untuk bergabung dalam organisasi JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dengan nama JMPPK Rembang, dengan tetap mengacu pada persamaan ide, prinsip dan tujuan yaitu menolak segala bentuk eksploitasi alam, biarkan alam asri seperti semula dan tetap lestari.

1. Organisasi Tanpa Struktur yang Jelas

JMPPK Rembang adalah sebuah organisasi gerakan sosial dalam menolak pabrik semen di Rembang, yang dibentuk berdasarkan inisiatif bersama, dan atas dasar kesadaran bersama (*common sense*) dengan maksud menampung segala bentuk aspirasi dari anggotanya, berkoordinasi sebelum mengadakan sebuah kegiatan bersama untuk menentukan mekanisme, strategi, berikut teknis dan berikut evaluasi. JMPPK Rembang dalam terbentuknya mengadopsi JMPPK Pati yang sudah berdiri sebelumnya,

karena didasari pada persamaan ideologi dan persamaan geografi yang sama-sama menggunakan ikatan KENDENG, meskipun untuk kawasan CAT Watuputih masih memunculkan pro dan kontra, namun pada pokoknya adalah pelestarian alam dan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan tambang, dan tetap mempertahankan budaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi kaum tani, seperti slogan yang sering dituliskan “*ora ono tambang yo wi iso mangan*”.

Organisasi JMPPK Rembang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki struktur yang tetap, seperti halnya JMPPK Pati, JMMPK Blora, dan JMPPK Grobogan juga tidak memiliki struktur yang administratif. Secara yuridis memang ada koordinator, bendahara, dan seksi-seksi, namun dalam pelaksanaannya tidaklah menjadi kecenderungan harus berpegang pada struktur tersebut. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan penggerak aksi.

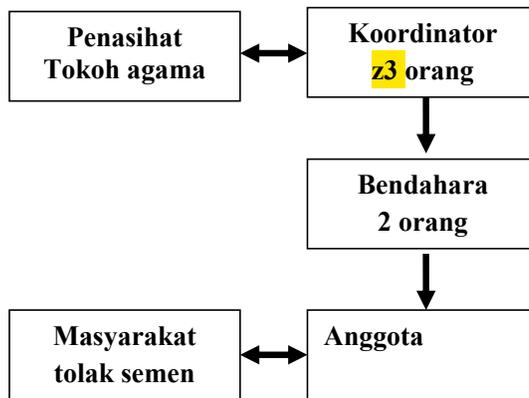
“Ora ono koordinator, Mas. Kabeh podo ngrasakke dadi anggota. Yo dadi koordinator, endi sing gelem, ora ono meri merinan. Sing gelem dadi koordinator yo monggo, sing pengin dadi bendahara yo monggo, ben podo ngrasakke, kabeh mau podo belajare. Koordinator ning JMPPK Rembang ki mberah Mas. Ora mung siji, gantian siji lan sijine (Wawancara dengan koordinator gerakan pada Desember 2016).

Setelah melewati beberapa kali dalam wawancara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin yang dapat disampaikan dalam tulisan ini tentang organisasi JMPPK Rembang. Namun sebelum digambarkan tentang organisasi ini, hendaknya perlu diketahui bahwa sebenarnya organisasi gerakan sosial dalam menolak pabrik semen sudah ada sebelumnya dan sudah melaksanakan tugas berdasarkan fungsi dari hasil *rembug bersama*. Misalkan dalam beberapa waktu sebelumnya dalam mencari dukungan masyarakat tolak semen, masing-masing koordinator melakukan tugasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contoh pembagian tugasnya adalah pemberian informasi pada orang tua, kepada kaum muda, dan di setiap *njagong* di warung-warung kopi. Seperti kutipan percakapan berikut.

“Biyen ki ono tugase sing bagian obyak-obyak, ning warung kopi. Nek aku bagiane mbagi informasi karo wong tuwo tuwo, lan karo dulur-dulur liyane” (wawancara koordinator gerakan pada Desember 2016).

Pembagian tugas yang sudah dilakukan oleh beberapa koordinator sebelum terbentuknya JMPPK Rembang mencerminkan sebagai bentuk organisasi dalam batas kecil. Kemudian seiring dengan bertambahnya pendukung dan membentuk organisasi JMPPK Rembang menambah ruang bagi anggota anggota baru untuk ikut dalam berbagai kegiatan dan ikut berfungsi dalam struktur organisasi tradisional tanpa administratif dan yuridis. Organisasi tradisionalistik seperti JMPPK yang dibentuk oleh masyarakat kelompok penentang pabrik semen dengan atas kesadaran umum, kesadaran tanpa batas, tanpa kepentingan dan dengan nilai keikhlasan, tanpa pamrih memberikan bentuk yang baru bagi jenis organisasi yang selama ini ada dan dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu.

Jika digambarkan dalam diagram struktur organisasi JMPPK Rembang sebagai berikut.



Gambar 6.1 Struktur Organisasi JMPPK Rembang
(Sumber : Olah Data Wawancara)

Organisasi yang dibentuk dengan kesadaran umum tanpa batas, tanpa kepentingan tertentu, dan dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa pamrih menciptakan keberadaan fungsi kesadaran sosial yang sangat tinggi di antara anggota kelompok organisasi, dibarengkan dengan nilai ikatan darah yang teguh karena persamaan prinsip menjunjung tinggi kebenaran yang diyakini sampai akhir hayat, semakin kuat menambah daya dobrak gerakan sosial hingga berlangsung sampai sekarang, dan menambah tingkat kesolidan organisasi semakin tinggi.

2. Keanggotaan

Keanggotaan dalam organisasi JMPPK Rembang, tidak memiliki kriteria yang bisa dijelaskan secara objektif, karena sejak dari awal yang terjadi adalah upaya untuk mencari dukungan dari masyarakat agar bersama sama satu ide menolak pabrik semen PT. Semen Indonesia. Untuk menjadi anggota diperlukan kesadaran, tidak memaksa, dan tanpa pamrih, dikarenakan dari awal tidak ada kepentingan apapun maka dalam rekrutmen keanggotaan masih sangat rumit, karena harus melewati tahapan dari yang tersulit, seperti menyampaikan informasi kepada masyarakat pedesaan yang sangat belum lazim tentang hal tersebut, dengan kata lain bagaimana sulitnya perjuangan tokoh penggerak dalam menanamkan pendidikan kepada masyarakat demi mewujudkan kebenaran pada masa itu, dan harus didasari dengan kesabaran dan ketelatenan.

Meskipun mengalami kesulitan diawal namun sekarang dapat dilihat tingkat keberhasilannya, semakin bertambahnya kelompok pendukung gerakan tolak pabrik semen menandakan bahwa sosialisasi tentang pendidikan telah dilaksanakan dengan baik dan *outcome* yang dihasilkan menjadi nilai abadi.

Sejak perekrutan awal hingga sekarang masih pada tujuan yang sama yaitu menemukan individu yang memiliki ide, prinsip yang sama yaitu membangun organisasi yang solid untuk terus menolak pabrik semen di Rembang. Hingga sekarang kaitannya dengan keanggotaan menjadi tanpa batas baik dalam ruang primordialisme maupun dalam lintas batas nasional dan internasional.

Sebagaimana sistem organisasi lain yang mengharuskan anggotanya untuk loyal patuh pada organisasi, maka dalam organisasi JMPPK Rembang pada dasarnya tidak mengharuskan untuk loyal, namun keharusan anggota terdorong dari perasaan yang sama, berdiri atas dasar kesadaran bersama. Apa yang menjadi keharusan tidak menjadi beban bagi mereka, bahkan dengan sukarela mereka menawarkan diri dan bukan merasa diperintah oleh organisasi. Contoh dalam soal pembagian tugas sebelum aksi, dan pendanaan biaya aksi, mereka dengan sukarela menawarkan diri dalam tugas, dan sukarela membayar iuran tanpa harus diperintah.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam organisasi JMPPK Rembang memang tidaklah berbeda dengan kepemimpinan organisasi lain. Yang perlu dijadikan

karakteristik adalah jika di dalam sebuah organisasi terdapat satu ketua umum, dilanjutkan dengan struktur di bawahnya. Dalam JMPPK tidak mengenal ketua umum, yang ada hanya koordinator. Koordinator dipilih dalam kriteria tertentu dan bisa berjumlah lebih dari satu.

Beberapa kriteria yang dijadikan indikator menjadi seorang koordinator dalam organisasi JMPPK Rembang adalah memiliki tingkat intelektual yang mumpuni. Hal itu terlihat dari bagaimana cara menjelaskan berbagai informasi dengan gamblang dan jelas sehingga mampu dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, ia memiliki keberanian berbicara di tengah-tengah masyarakat umum, terlihat dari berbagai aksi dengan orasi yang ditampilkannya. Ia juga memiliki keteguhan dalam menyikapi segala kondisi yang ada tanpa berubah dari tujuan awal dan mampu meyakinkan tentang kesetiaan pada organisasi dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Kutipan percakapan tokoh penggerak:

Misalke mati sakiki ning mbelo kebeneran aku ikhlas. Aku yakin lan percoyo kabeh mau ono sing ngatur. Kabeh ono wektune, ning gerakan sosial iki gak pernah mati”, (wawancara dengan koordinator gerakan pada Desember 2016).

Bentuk kriteria kepemimpinan yang lain yaitu pada bagian yang membangkitkan nilai-nilai spiritisme. Nilai-nilai magis yang dalam budaya Islam dan budaya Jawa sangat menjalar dalam kehidupan, yang mampu menelusuri ruang lingkup batin sehingga mampu membangkitkan hal-hal yang tidak dapat dilihat namun mampu menjadi dorongan yang sangat kuat karena sudah menjadi keimanan. Dengan kata lain, bisa disebut doktrinisasi. Hal tersebut yang bisa melakukan adalah tokoh-tokoh agama, sebagai seseorang yang selama ini menjadi tauladan bagi masyarakat.

4. Pendanaan

Sebagaimana dengan perekrutan keanggotaan yang tanpa batas dan dengan kesadaran, dalam pendanaan pun tanpa didasari oleh sebuah keharusan yang memaksa. Semua dilandasi dengan kesadaran tanpa beban/sukarela. Masyarakat pendukung gerakan boleh saja menyumbang berapapun karena tidak ada patokan berapa yang harus dibayar.

Sejak dimulainya sebuah ide gerakan sosial di Desa Tegaldowo, pendanaan yang didapatkan hanyalah berasal dari masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak pabrik semen, itu pun dengan sukarela. Tidak ada paksaan dalam pendanaan bagi masyarakat pendukung gerakan.

Seiring dengan semakin banyak yang peduli tentang gerakan, sedikit banyak telah membantu pendanaan yang berasal dari sumbangan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lain, seperti makanan, dan minuman.

Dana yang terkumpul biasanya dipegang oleh bendahara yang dipilih. Pemilihan bendahara tidak berdasar pada mekanisme organisasi pada umumnya, melainkan atas dasar solidaritas. Meski atas dasar solidaritas bersama namun tetap saja terdapat kriteria, seperti orang yang dipandang memiliki tingkat ekonomi yang lumayan tinggi di antara masyarakat pendukung gerakan, sekaligus bisa bertanggung jawab, dan bisa dipercaya.

D. Strategi Dukungan Eksternal

Peran lembaga lain (*eksternal*) dalam membantu keberlangsungan gerakan sosial di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam melawan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. dampaknya sangat signifikan. Hal itu dikarenakan memiliki prinsip yang sama, memiliki ide yang sama untuk bergerak menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang sesungguhnya (*tanpa dilandasi kepentingan tertentu*).

Peran lembaga lain yang terlihat dalam fakta di lapangan juga menambah kekuatan baik secara materiel maupun non-materiel. Karena sebuah gerakan sosial yang hanya mengandalkan peran internal atau masyarakat lokal sendiri akan berada pada titik jenuh yang pada suatu saat akan menyerah *pada* genggamannya kepentingan kekuasaan. Lama tidaknya gerakan sosial bergantung bagaimana kuatnya strategi yang digunakan untuk mencapai cita-cita yang selama ini diagungkan. Salah satu strateginya adalah menggalang kekuatan dari luar yang memiliki persamaan ide prinsip, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pendapat sebagian masyarakat dengan mengatakan bahwa gerakan sosial masyarakat dalam menolak pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. mendapat bantuan dari luar bisa dikatakan benar, dan fakta bahwa setiap gerakan sosial yang menolak sesuatu yang dianggap tidak benar akan selalu *mendapat* respons negatif dari masyarakat, kelompok, organisasi, baik dalam lintas batas nasional maupun internasional, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara dunia.

Dukungan dari peran lembaga lain akan terus mengalir selama apa yang menjadi tujuan belum tercapai, dan selama masyarakat lingkungan pabrik masih menolak hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk. di Desa

Tegaldowo Gunem Rembang maka dipastikan dukungan akan selalu datang dan membantu silih berganti.

Beberapa peran lembaga lain berikut ini menjelaskan tentang dukungan dalam bentuk apa yang diberikan, disertai dengan penjelasan singkat.

1. Peran Media

Media dalam membantu gerakan sosial melawan pabrik semen di Desa Tegaldowo Gunem Rembang memberikan kontribusi dalam penyampaian informasi sehingga bisa disampaikan dengan cepat kepada pengguna virtual yang ada dalam lingkup transnasional maupun internasional. Bentuk bantuan adalah tercapainya tujuan dari penyebaran informasi dengan maksud mendapatkan berbagai pendapat atau argumen dari pengguna tentang pro atau kontra terhadap konflik semen di Rembang.

Media juga memberikan kontribusi pada mobilisasi opini publik masuk dalam kategori *trending news* yang berisi diskusi pro dan kontra pabrik semen di Rembang dari para pakar yang bergelut di dalamnya, dengan maksud memberikan penekanan pada pendapat masyarakat tentang pabrik semen di Rembang. Media virtual atau sosial media yang digunakan dalam membantu gerakan sosial dalam menolak pabrik semen di Rembang adalah *facebook*, *Twitter*, *YouTube*. Beberapa gatar yang bisa diikuti di antaranya adalah *#rembangmelawan*, *#savekendeng*, *#omah kendeng*, *#tolaksemenrembang*, dan sebagainya.

Media virtual elektronik menjadi sangat penting dalam membantu pergerakan dari gerakan sosial di Rembang. Hal itu terlihat bagaimana dukungan tokoh-tokoh baik dari transnasional, dan seniman nasional begitu tampak jelas dan nyata bentuknya baik materiel maupun non-materiel.

2. Dukungan Tokoh Samin Pati

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa sebelum pabrik semen berdiri di Rembang, yang pada akhirnya bergabung menjadi BUMN, dan berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia Tbk., semen gresik sudah berencana membangun pabrik semen di Pati. Namun, dalam perjalanannya mengalami kegagalan karena masyarakat setempat yang berada di wilayah tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo, dan Kecamatan Kayen menolak hadirnya pabrik semen dan tuntutan dimenangkan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui juga bahwa kemudian semen gresik beralih ke Rembang dan pada tahun 2012

izin terbit, semenjak itu benih konflik sudah mulai ada.

Keberhasilan masyarakat dalam menolak pabrik semen di Pati yang dilakukan oleh kelompok *sedulur sikep Samin* memberikan ide baru untuk berbagi informasi tentang gerakan sosial. Dengan kata lain belajar dan berguru dengan organisasi yang lebih berpengalaman, menyamakan prinsip, ide dan tujuan, kemudian saling bekerja sama dalam setiap kegiatan menjadikan gerakan menjadi satu kesatuan dalam wadah organisasi JMPPK.

Kontribusi yang didapatkan dari tokoh *sedulur sikep Samin* terlihat dalam setiap akan diadakannya kegiatan atau aksi selalu saling koordinasi dengan tokoh penggerak dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan, bersatu saling membantu demi mewujudkan tujuan bersama. Seperti kutipan percakapan penggerak kegiatan di Rembang berikut.

“Iyo Mas. Ancen setiap arep ono aksi mesti ono koordinasi karo dulur-dulur sing teko Pati, Blora, lan Grobogan. Diskusi piye nek Rembang arep ngadakke aksi, piye langkahe, mesti koordinasi Mas.” (wawancara dengan koordinator gerakan pada Desember 2016).

Keterlibatan tokoh *sedulur sikep* dalam setiap aksi gerakan sosial dalam satu wadah JMPPK terlihat dalam beberapa *event* yang dilakukan bersama, mulai dari cor kaki, jalan dari Rembang ke Gubernuran, dan *event-event* lainnya.

3. Dukungan Aktivistis Akademisi

Keterlibatan aktivis akademik dalam setiap aksi gerakan memiliki peran yang signifikan dalam membantu keberlangsungan gerakan perlawanan sosial. Sama halnya dengan setiap gerakan perlawanan sosial lainnya, dalam kasus pabrik semen Rembang, aktivis akademis selalu tampil, ikut mendorong dan bergerak bersama-sama dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan gerakan.

Keterlibatan aktivis akademisi dalam membantu gerakan perlawanan sosial masyarakat kontra pabrik semen dimulai sejak aksi-aksi awal yang dilakukan di kabupaten, provinsi, dan dalam ruang lingkup nasional. Euforia akademisi lokal memicu penyebaran dari dan menuju ke wilayah lain yang memiliki persamaan pandangan tentang konservasi lingkungan dan hak asasi manusia.

Kelompok akademisi yang peduli dengan lingkungan dan kelompok

yang peduli dengan hak asasi manusia bergerak bersama menjadi kolektivitas menjadi kelompok besar gerakan dengan tuntutan menolak setiap perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah aktivis dari kelompok akademisi, menambah daya gedor karena jumlah kelompok protes semakin banyak dan gerakan semakin terbuka dan radikal.

4. Dukungan Tokoh Masyarakat

Data yang diperoleh tentang tokoh masyarakat yang mendukung gerakan sosial melawan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. hanya ditemukan dua tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam gerakan sosial. Pertama, seorang pejabat di desa, sekaligus sebagai tokoh agama di Dusun Tegaldowo. Kedua, seorang lurah di sekitar wilayah pabrik semen, yang di antara sekian lurah yang ikut berperan dalam gerakan sosial.

Sebelumnya dikatakan oleh tokoh penggerak bahwa sejak awal aksi gerakan dimulai, sebenarnya tokoh masyarakat dan tokoh agama banyak yang ikut mendukung gerakan. Namun seiring dengan perkembangannya, pendukung dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat terus berkurang. Kutipan percakapan sebagai berikut:

“Biyen ki sing ngusulke nggawe paguyuban tokoh agama. Biyen yo melu nolak semen. Ning sakiki gak ngerti.... Biyen ki sing melu ndukung dulur-dulur tolak mberah Mas, ning sakiki berkurang goro-goro sebab e macem.” (wawancara dengan salah satu koordinator gerakan, pada Januari 2017)

Kontribusi yang diberikan dari dua tokoh masyarakat tersebut selain dalam dukungan materiel, dukungan moral spritual pun sangat mengena di hati masyarakat tolak semen. Kutipan percakapan dengan Lurah Timbrangan mengatakan bahwa dalam memberikan dukungan terhadap gerakan sosial menolak pabrik semen, melihat waktu luang yang ada, karena sebagai pemimpin desa harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa.

“Nek mbantu gerakan yo ndelok-ndelok, Mas. Biasane nek aksi kuwi dino Sabtu yo iso ngeterke. Mengko Minggu balik. Koyok ning Jakarta wingi kuwi misalke Senin iso ning kantor deso, nek liyane kuwi yo gak iso” (wawancara dengan tokoh masyarakat, pada Januari 2017).

5. Dukungan Tokoh Agama

Peran tokoh agama sejak dari awal perjuangan gerakan tolak semen cukup konsisten hingga sekarang. Meskipun ada beberapa yang seolah diam, namun pandangan dan keyakinan akan kebenaran sudah melekat dalam spirit masyarakat dalam melawan pabrik semen. Beberapa tokoh agama yang konsisten dalam ikut membantu gerakan sosial seperti Gus Ubaidillah, Gus Gufron, dan Gus Mus.

Sejak sebelum gerakan sosial ini dilakukan oleh masyarakat, sebagai masyarakat yang beragama dan memiliki keyakinan terhadap kebenaran yang dianutnya, banyak dari masyarakat gerakan tolak semen sebelumnya *sowan* terlebih dahulu kepada tokoh agama yang diyakini dan memiliki karisma, untuk meminta pendapat (*nyuwun ijazah*), atau saran saran terkait dengan gerakan tolak pabrik semen.

Pendapat yang diambil dari sebuah keyakinan tentang kebenaran yang hakiki dan itu diperoleh dari seorang yang memiliki karisma, dipercaya sebagai tauladan, akan menjadi sebuah prinsip ikatan batin yang kuat. Jika dipaksa untuk mengingkarinya maka akan dilawan dengan sangat keras. Berikut kutipan percakapan Sukinah, seorang tokoh penggerak perempuan Desa Tegaldowo sebelum melakukan tindakan tolak semen. Ia terlebih dahulu *sowan* ke tokoh agama di Demak bersama dengan beberapa teman perempuan untuk menanyakan tentang bagaimana jika ada pabrik semen di Rembang.

“Biyen sakdurunge melu nolak semen, aku sowan neng kyai Demak, takon bab pabrik semen. Piye dampak e nek ono pabrik semen ning Rembang”. [sang kiai pun menjawab] ”wah nek ono pabrik semen ning Rembang yo jelas bumi lingkungan rusak,” ... terus soko kui, manteb nolak semen” (wawancara tokoh gerakan pada Desember 2016).

6. Dukungan Lembaga Lain

Beberapa organisasi luar yang ikut bergabung dalam gerakan perlawanan dalam menentang kooptasi pabrik semen di Rembang semakin banyak. Setiap kali melakukan aksi, sering ikut andil dalam kegiatan. JMPPK Rembang memiliki kaitan erat dengan JMPPK di luar Rembang, yang tergabung dalam wilayah Kendeng (meliputi kawasan Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan, dan meluas ke daerah lain seperti Wonogiri).

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa dalam lingkup nasional menjadi tombak paling sesuai sebagai aktivis, yang

tergabung dalam bentuk dan konteks lain. Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam menolak kooptasi kapitalisme menjadi sasaran utama dalam menambah daya gedor gerakan perlawanan sosial. JATAM (Jaringan Tambang) juga ikut andil dalam mendukung gerakan perlawanan sosial yang ada dalam wilayah nasional.

7. Dukungan Advokasi

Peran NGOs dalam ikut terlibat dalam setiap gerakan sosial menolak pabrik semen hanya dalam pendampingan dalam setiap ada aksi yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan tidak terlibat langsung dalam gerakan protes. Pendampingan dalam bentuk kajian hukum yang dilakukan oleh NGOs antara lain meliputi perdebatan Perpres tentang Pegunungan Watuputih termasuk dalam kawasan hutan lindung, dengan Permen ESDM, ditemukan dokumen amdal tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Peran NGOs selama ini sangat signifikan dalam mendukung gerakan tolak semen dalam kajian hukum. Beberapa kegiatan meski di PTUN Semarang dimenangkan oleh korporasi hingga PTUN Surabaya, namun dalam pengajuan kasasi ke MA, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dimenangkan. Dukungan advokasi oleh lembaga independen diperoleh dari berbagai organisasi nasional seperti organisasi lingkungan dan organisasi yang bergerak pada bidang hak asasi manusia.

Keterlibatan NGOs dalam kasus konflik pabrik semen Rembang dalam persoalan advokasi dimulai sejak munculnya konflik antara masyarakat dengan pabrik semen, sampai dengan sekarang. Kasus terakhir WALHI menggugat Surat Keputusan Gubernur ke PTUN Semarang.

E. Wanita Sebagai Garda Terdepan dalam Gerakan

Sosok wanita dalam pandangan lahiriah memang memiliki kemampuan magis yang memikat. Di lain sisi seakan menoleh pada hal diskriminatif yang berkesan miring, sebagai makhluk yang lemah, *dapur sumur kasur*, bahkan dalam beberapa pandangan masih menjadi sangat diskriminatif, sebagai *kaum wingking*.

Fakta yang terlihat sekarang sungguh jauh berbeda. Di satu sisi kelemahan yang melekat ke sosok wanita, dapat dijadikan senjata utama dalam melawan setiap aksi dalam gerakan sosial. Bahkan disebut wanita sebagai garda terdepan dalam gerakan sosial di Desa Tegaldowo. Dimulai sejak peletakan abut pertama pabrik semen Juni 2014, para wanita yang

didominasi ibu-ibu maju menjadi benteng aksi protes.

Aksi kemudian berlanjut dengan mendirikan tenda dan musala. Ibu-ibu dengan gigih tetap tinggal di sana selama beberapa tahun, sampai pada akhirnya tenda dan musala dibakar. Aksi kemudian dilanjutkan dengan aksi mengecor kaki di depan kantor presiden. Ibu-ibu juga sangat berani meskipun disebut sebagai tindakan menyakitkan.

Peran ibu-ibu dalam ikut terlibat langsung dalam setiap aksi gerakan sosial bukan tanpa sebab. Mereka berpendapat bahwa jika lahan pertanian tidak ada, air juga semakin habis, yang paling susah dalam urusan rumah tangga adalah wanita. Gambaran seorang wanita sebagai seorang ibu rumah tangga di Desa Tegaldowo yang memiliki tugas selain mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, juga ikut membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadikan beban yang sangat berat jika nantinya lahan pertanian tidak ada. Sumber air berkurang, untuk bekerja selain petani tidak memiliki persiapan sebelumnya.

Bagi kaum lelaki sangat mudah mencari penghasilan selain petani. Ia bisa saja merantau keluar desa, tapi bagi wanita yang setiap hari selalu mengurus kebutuhan yang di rumah akan sangat sulit jika pabrik semen jadi beroperasi di wilayah mereka. Inspirasi seorang Kartini Rembang memberikan semangat pada jiwa dan batin mereka. Dengan mengetahui sejarah sosok Kartini yang berjuang demi kemajuan melalui pendidikan, semangatnya terus tumbuh pada jiwa dan batin generasi penerusnya. Keteladanan itu menjadi sentuhan dan pemicu semangat bagi wanita dalam membela kebenaran, keadilan, hingga batas akhir.

Hal yang menjadi sesuatu yang dikatakan *magic* justru pada saat wanita berada di garda terdepan. Bayangan akan ketakutan dan kekhawatiran tidak tampak sama sekali. Yang ada hanya keberanian dan kegigihan mereka, dan itu di luar nalar rasional manusia. Keberanian dan kegigihan wanita dalam gerakan sosial di Rembang memang fakta. Di satu sisi dari kebutuhan akan kelestarian alam Rembang yang semakin terkikis habis karena ulah perusahaan tambang, pada sisi yang lain bahwa kesamaan nasib, kesamaan prinsip menjadi dasar kuat bagi perjuangan ibu-ibu di wilayah Kendeng dan sekitarnya. Ibu-ibu yang tergabung dalam kata *seduluran* baik dalam sikap, batin, ide maupun tujuan, bergerak dalam satu kekuatan (*unity*) memberikan dorongan bagi para lelaki untuk lebih bersikap lebih jauh dari apa yang telah mereka lakukan.

Seolah apa yang telah dilakukan wanita ingin membongkar kesenjangan

pada status *miring* yang melekat dalam diri seorang wanita, bahwa wanita juga bisa menjadi garda terdepan meskipun dengan keterbatasan. Meskipun dari lingkungan pedesaan yang bodoh, goblok sekalipun, perasaan peka seorang ibu terhadap apa yang akan terjadi besok pada kelestarian hidup yang dirasa sangat menyengsarakan, ibarat kata ibu akan berjuang dengan gigih bahkan sampai titik darah penghabisan demi kelangsungan hidup anak-anaknya di masa mendatang.

Ibu pada saat menjadi garda terdepan tidaklah mengenal takut, minder, dan sungkan. Setiap saat apa yang menjadi tameng adalah keberanian mereka pada prinsip "*kowe wani aku, podo karo wani karo ibumu, kowe lahir soko ngendi, yo soko dalane ibumu*". Tameng keberanian dari prinsip tersebut yang sangat menggentarkan peran lawan untuk menghadapi perlakuan dari aparat yang sebagian besar adalah kaum lelaki. Prinsip itu juga menjadi tameng untuk bertahan jika sesuatu terjadi pada mereka. Gerakan perlawanan sosial yang dipelopori oleh ibu-ibu dalam konteks masyarakat Rembang merupakan internalisasi dari Kartini Rembang yang kokoh dan teguh dalam menolak dominasi laki-laki pada masa itu. Kartini merupakan cermin masyarakat kritis, feminisme dalam menolak imperialisme, dan jiwa semangat Kartini ada pada ibu-ibu yang selalu ikut di depan dalam menolak bentuk dominasi kapital.

BAB 5

DINAMIKA KONFLIK DAN GERAKAN SOSIAL

A. Gerakan Perlawanan Masyarakat dengan Perusahaan Tambang

Perusahaan pertambangan mulai bermunculan di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dimulai sejak tahun 1996 oleh PT. SAF (Sinar Asia Fortune), kemudian diikuti oleh perusahaan tambang lainnya. Berbagai macam masalah kemudian berkembang menjadi konflik dan mengalami perkembangan yang cepat karena berbagai dorongan dari masyarakat sekitar yang menolak keberadaan perusahaan tambang. Sejak saat itu hingga sekarang tercatat ada dua puluhan perusahaan pertambangan yang secara legal berizin untuk mendirikan perusahaan tambang.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang skala kecil dimulai dari konflik pertanahan, yaitu tindakan sewenang-wenang dari oknum yang menyerobot lahan milik warga yang akan digunakan sebagai jalan masuk tambang dengan menggunakan alat berat. Kepentingan dari pihak pendiri tambang disambut oleh oknum yang berkepentingan "*pucuk di cinta ulam pun tiba*". Apa yang menjadi kepentingan agar proses pertambangan berjalan dengan *mulus* disambut dengan tangan terbuka oleh oknum yang berkepentingan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dan dengan menggunakan cara apa pun. Hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadi korban.

Ketidakterimaan masyarakat terhadap perilaku oknum, tidak didasari akomodasi yang baik oleh pemerintah desa sehingga menciptakan benih kemarahan yang terpendam. Akses informasi dari desa menuju pemerintah daerah tertutup. Mau tidak mau, masyarakat menyimpan apa yang terjadi pada mereka. Penyimpanan dendam yang sekian lama akhirnya terluapkan seiring dengan hadirnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.

Aksi penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang dalam skala kecil atau Galian C memang muncul sejak kabar pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Tegaldowo. Aksi penolakan yang dilakukan sejak awal mendapat dukungan dari masyarakat dari beberapa desa yang terdekat, seperti Desa Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Suntri, Desa Dowan, dan Desa Kadiwono.

Semenjak Pabrik Semen Gresik (sebelum berubah bentuk menjadi Semen Indonesia) gagal mendirikan pabrik di wilayah Kabupaten Pati, mereka terus melakukan penyebaran wilayah. Sejak tahun 2011 Rembang menjadi orientasi wilayah berikutnya. Rembang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis tambang ada, mulai dari karst, andesit, batu belah, batu gamping, pasir kuarsa, dan sebagainya. Perusahaan tambang skala kecil menyebar ke penjuru wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang, mulai dari Kecamatan Sarang, paling timur, bergeser ke barat Kragan, Sluke, Lasem, Sedan, Sale, Pamotan, dan kebagian selatan yaitu Kecamatan Gunem.

Perusahaan tambang mencapai puncak penyebarannya sejak masa Bupati H. Moch Salim. Selama menjabat, ia dikenal sebagai tuan tanah di wilayah Rembang. Selama dua kali menjabat sebagai bupati, Rembang mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan hanya dirasakan pada kalangan ekonomi menengah. Eksploitasi besar-besaran menjalar di wilayah Rembang. Banyak gunung yang rata dengan dataran tanah dan ekosistem hilang akibat perusahaan tambang. Seolah mereka tidak memikirkan lagi tentang keberadaan ekosistem yang ada di lingkungannya. Padahal, manusia sendiri yang juga akan menerima dampaknya.

Pertanyaannya adalah, jika perusahaan tambang mampu mendorong tingkat perekonomian masyarakat Rembang, kenapa masih saja disebut daerah miskin di wilayah Provinsi Jawa Tengah? Yang kaya dan yang miskin siapa? Maka jika dominasi perusahaan tambang dilanjutkan, yang semakin kaya bukanlah masyarakat kecil, bukanlah masyarakat menengah. Pada akhirnya, yang miskin ataupun yang kaya akan menjadi miskin, karena sumber daya alam semakin menipis, sementara sumber daya manusia cenderung statis.

Wajar dan menjadi keharusan jika ada sebagian masyarakat dengan sengaja dan terang-terangan terlibat dalam aksi menolak izin perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Rembang karena memang Rembang sudah darurat alam. Berapa gunung yang tersisa tidak sebanding dengan gunung

yang sudah menjadi milik saudagar kaya dan berhak untuk ditambang karena sudah menjadi milik pribadi.

Era sekarang bukan era abad ke-17, ketika kapitalis menjadi primadona. Kapitalis yang terjadi di Rembang adalah kapitalis *ngawur, seenak udele dewe*. Makna kapitalis sudah lari dari makna sesungguhnya. Kesenjangan kelas era Marx muncul lagi di tengah era modern di Rembang, Maka jangan disalahkan jika muncul juga gerakan kelas ala Marx, karena memang fakta sekarang yang ada kelas borjuis dan proletarian, kelas miskin dan kelas kaya.

Gerakan sosial masyarakat Desa Tegaldowo memang sangat dirasakan seperti pada era Marx. Yaitu kekuatan modal memperdaya, mengeruk, dan menghisap tanpa ampun sampai ke titik terlemah. Ekonomi menjadi dominasi dalam setiap aksi, karena ekonomi dapat menentukan segalanya. Berbeda dengan pandangan sebagian masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya, yang merasakan tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari semua hasil pertanian yang mereka punyai. Kesuburan tanah bisa meningkatkan perekonomian berlebih dari hasil pertanian, dan bukan lagi pada perusahaan tambang yang sebelumnya telah berjalan selama 20 tahun, tidak memberikan apa pun justru dampak lingkungan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Selama kurang lebih 20 tahun dipendam, "menggenggam api dalam sekam yang sewaktu-waktu menjadi bara lagi", kalimat peribahasa yang pas dengan kondisi masyarakat Desa Tegaldowo saat ini. Selama dua dekade masyarakat Desa Tegaldowo seakan berdiri di atas bara api yang siap menelan dan melumat habis tanpa sisa, karena dampak nafsu murni kapitalis, berdiri tetap terbakar jatuh terkapar, sudah jatuh tertimpa tangga.

Perubahan fakta memberikan spirit baru, meskipun masyarakat sangat tertekan, frustrasi dan bagai katak dalam tempurung, sebagian masyarakat telah banyak belajar dari pengalaman yang sebelumnya, bahwa perasaan untuk memberontak mulai muncul seiring dengan bertambahnya waktu dalam mempelajari berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Batin mereka menentang keras akan dunia yang tanpa peradaban, dunia yang menghilangkan peradaban mereka, dunia yang jauh dari peradaban mereka, dan satu persatu mulai menyadari betapa selama ini mereka seakan terkungkung dalam penjara air mata dunia yang sudah menyimpang dari kebudayaan mereka.

Melek mata dan melek hati. Masyarakat terbangun dari mimpi buruk yang selama ini menyelimuti pikiran dan hati masyarakat Desa Tegaldowo. Itulah gambaran tekad masyarakat Desa Tegaldowo dengan menyimpan rasa negatif yang selama 20 tahun disimpan yang kemudian mencapai titik jenuh dengan munculnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.

Perlawanan masyarakat pada waktu itu tidak begitu tampak. Sebagai masyarakat yang menentang, mereka cenderung menyimpan segala persoalan yang menimpa dirinya. Menyimpan karena sistem budaya yang terbangun dalam bentuk promordialisme, *ngelus dodo* tanpa ada tindakan apa pun. Mereka cenderung *nerimo ingpandum*, bukan karena keputusan namun karena sistem budaya yang terbangun; *sakdermo nglakoni* meskipun mengalami penekanan, intimidasi, *kabeh kuwi ono mangsane* menyingkapi tentang ketidakpastian, ketidakadilan, *kabeh wis ono sing ngatur*, mengakui budaya mengalah dengan keadaan yang meskipun tidak mencocoki.

Loncatan sistem budaya kapitalis yang dilakukan oleh sebagian kelas pemodal menimbulkan lahirnya kapitalis murni tanpa makna. Dengan kata lain, adanya kemunduran dalam mekanisme yang selama ini dibangun oleh *founding father*. Mereka justru melihat mekanisme kapitalis dari sisi yang terluar, yang menghilangkan asas tunggal, yaitu keadilan, kebenaran, kemanusiaan dan kesejahteraan. Istilah Kant dipahami dari sisi yang sempit, dan bukan secara keseluruhan.

Kapitalisme dalam era Rembang justru menyeberang dengan kajian Adam Smith yang menolak menggunakan *invisible hand* dalam kerangka kebenaran, keadilan, namun menggunakan dalam sisi tertentu dengan mengatasnamakan kapitalisme versi Adam Smith. *Invisible hand* memiliki makna yang luas, bukan kecenderungan dalam satu hal. Di satu konteks negatif, namun di satu sisi positif. Dialektika memainkan peran yang sangat krusial untuk dapat memahami pendapat-pendapat mereka.

Perang melawan kapitalisme Rembang menjadi krusial dalam kasus konflik masyarakat dengan pabrik semen, yang seolah olah menjadi penilaian bahwa masyarakat Desa Tegaldowo menolak pabrik semen, kemudian muncul konflik antara masyarakat dengan pabrik semen. Sebelum konflik dengan kapitalis pabrik semen, konflik sudah terjadi dengan kapitalis pada abad ke-17 dan abad ke-18, yang tampak pada perusahaan tambang skala kecil yang ada sebelum pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.

B. Dinamika Konflik ke Protes

Sebagaimana dijelaskan tentang penyebab gerakan sosial pada bab sebelumnya, bahwa sebelum konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Rembang dengan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. bermula dari beberapa konflik yang telah terjadi sebelumnya sejak perusahaan tambang skala kecil atau galian C mulai bermunculan di tengah-tengah warga masyarakat Desa Tegaldowo. Konflik terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk konflik agrarian, konflik dengan personal atau kelompok, dan konflik dengan aparat pemerintah desa.

Dasar dari konflik yang berkembang di Desa Tegaldowo diawali dengan konflik agraria yang belum terselesaikan hingga saat ini. Konflik dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari makelar tanah dan aparat pemerintahan desa. Konflik awal terjadi dikarenakan masyarakat tidak terima jika ada alat berat masuk lokasi pabrik yang merusak tanaman yang ada di tanah milik masyarakat setempat. Kejadian itu didiamkan selama bertahun-tahun dan tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan tambang. Yang kemudian terjadi adalah penyerobotan lahan.

Diamnya masyarakat terhadap perusahaan tambang yang menyerobot lahan karena ada unsur ketakutan dan ketidakberdayaan masyarakat akan persoalan hak milik tanah yang selama ini tidak dimiliki oleh masyarakat yang sah menurut hukum. Kelemahan atas hak tanah dijadikan senjata untuk tujuan tertentu yaitu menggiring masyarakat ke dalam opini yang menyudutkan, memperdaya masyarakat dengan ketidaktahuan mereka. Dengan cara itu, mudahlah pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih lahan yang bukan menjadi hak mereka. Sebuah tindakan yang sengaja memanfaatkan kebodohan masyarakat, demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Rasa frustrasi, kecewa, tidak puas, dan marah menjadi alasan untuk bersatu dan bergerak untuk menentang atas ketidakadilan dan kebenaran yang selama ini jauh dari harapan mereka. Harapan wong cilik yang terpinggirkan disamakan dengan dalih untuk kepentingan bersama dan kuantitas bersama. Alasan itu menjadikan harapan tidak terealisasi karena dominasi diskusi tidak menemukan hasil. Lazimnya mereka masih menggunakan asas partai besar dan bukan kebenaran yang menjadi tujuan meski minoritas.

Memendam rasa frustrasi selama puluhan tahun, memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang menjadi korban. *Kabeh ono mangsane.*

Pada masa itu seolah menjadi jawaban atas apa yang terjadi selama ini. Saat inilah yang tepat untuk membuktikan bahwa apa yang telah diyakini mereka membuahkan kenyataan. Keyakinan tentang nilai dan prinsip hidup lama memiliki kenyataan meskipun dalam jangka waktu yang lama, dan menyimpan banyak pengorbanan yang tidak dapat dihitung.

1. Aksi Bertanya

Masyarakat mulai bergerak dengan tujuan menuntut kejelasan tentang hal yang selama ini disembunyikan dan menggantal dalam benak pikiran mereka. Terdorong semangat untuk berani menanyakan semenjak munculnya kabar pabrik semen akan hadir di wilayah mereka, dengan mendatangi rumah Kepala Desa pada waktu itu, dan dengan diwakili oleh lima orang pemuda bertemu, menanyakan perihal kabar santer berdirinya pabrik semen.

“Turene badhe wonten pabrik semen ten Tegaldowo Pak? Nek wonten pabrik semen nasib wong cilik terus piye? Wong tambang cilik sing ono wae lingkungan rusak, opo meneh pabrik sing gedhe” (wawancara dengan pemuda anggota gerakan pada Januari 2017).

Sekitar tahun 2012 akhir, setelah beberapa pemuda dengan berani menanyakan kepada kepala desa kabar pabrik semen direspons kurang memuaskan, pemuda dan masyarakat kemudian bergabung dan semakin intens mengadakan diskusi untuk menentukan langkah berikutnya.

Sekitar Maret 2013, hasil *rembugan* masyarakat kemudian mencoba menanyakan hal yang sama kepada pemerintahan kecamatan. Dengan mendapatkan hasil yang sama, kembali beberapa perwakilan menemukan jawaban yang tidak memuaskan dari Pak Camat. Sebelum aksi menanyakan hal serupa ke pihak kecamatan terlebih dahulu beberapa perwakilan pemuda secara kompak observasi ke tempat pabrik semen yang ada di Tuban Jawa Timur. Dua kali mereka menempuh jalur dengan sembunyi-sembunyi, demi mendapatkan data riil tentang pabrik semen yang sebenarnya.

Observasi pertama yang dilakukan menemui hambatan dengan kegagalan karena kurangnya informasi jalan menuju lokasi pabrik semen di Tuban. Berdasarkan kesepakatan bersama memutuskan untuk kembali pulang, dengan maksud akan datang di kemudian hari. Selang beberapa hari, setelah mengumpulkan berbagai informasi akses yang mudah menuju lokasi pabrik, kembali lagi, sesuai rencana semula mereka berhasil menembus ke lokasi pabrik semen. Setelah melihat data riil di lapangan,

sebagai modal untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak pabrik semen.

Aksi bertanya yang dilakukan oleh beberapa kelompok pemuda ke pemerintah kecamatan ditanggapi dengan jawaban yang tidak memuaskan. Mereka mencoba berdialog, menyuruh kelompok pemuda dengan membuat surat kepada pihak-pihak terkait. Respons yang diterima dari pemerintah desa maupun kecamatan yang seolah aksi bertanya ibarat menimbang bola, lempar-lemparan. Sikap itu menimbulkan semangat untuk bertindak lebih jauh, dengan semakin intens mengadakan diskusi.

Diskusi pertama terjadi di balai Desa Tegaldowo dengan dipelopori oleh organisasi kepemudaan karang taruna, dengan tujuan menjangkau pendapat-pendapat tentang dampak jika pabrik semen berdiri di wilayah mereka. Diskusi gagal karena pihak pemerintah desa merasa tidak diberitahu sebelumnya. Diskusi itu kemudian dibubarkan dengan paksa. Aksi pembubaran dilakukan oleh beberapa anggota perangkat desa bersama dengan preman setempat.

2. Aksi Berkirim Surat

Diskusi pertama yang gagal karena pembubaran paksa oleh pihak pemerintah desa dengan didukung oleh beberapa preman, tidak membuat kelompok pemuda menjadi turun keberanian. Aksi kemudian berlanjut dengan mengirim surat kepada pihak-pihak terkait, dengan isi surat mengharap ada sosialisasi pabrik semen di Desa Tegaldowo, termasuk kepada pihak kecamatan.

Aksi kirim surat berawal dari saran dari Pak Camat karena ketidaktahuan kelompok penentang tambang tentang apa yang dilakukan. Maka, dengan perwakilan sekitar belasan pemuda bergerak menuju kantor pos Rembang sembari mengadakan treatikal aksi sebagai wujud awal gerakan protes menolak pabrik semen. Aksi kirim surat pertama kalinya ditujukan kepada instansi-instansi pemerintahan, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga Presiden.

Aksi kirim surat yang kedua, pada saat aksi ngecor kaki di depan Istana Negara, yang ditujukan kepada Presiden, menekankan segera menindaklanjuti putusan MA yang dimenangkan oleh gugatan JMPPK Rembang. Namun, belum juga diindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah terkait IUP PT. Semen Indonesia Tbk.

Gerakan protes yang selama ini dilakukan oleh kelompok pemuda

dengan masyarakat lainnya, bisa disebut sebagai protes semi terbuka, dengan masih bersifat kooperatif. Mereka membuat tempat-tempat berkumpulnya masyarakat kelompok kontra sekaligus tempat diskusi dan berembung seperti *cangkruk* dan warung kopi, dengan menggunakan simbol-simbol atau slogan tolak pabrik semen.

Gerakan protes dari kasus konflik pabrik semen di Rembang bisa disebut juga semi-gerakan sosial. Meskipun belum terbentuk sebuah organisasi yang merupakan ciri dari sebuah gerakan, akan tetapi ada unsur lain seperti (1) bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana dan tak berencana (terutama kumpulan) secara tepat, (2) kebangkitan opini massa, (3) ditujukan kepada oknum lembaga sentral (4) sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur makro dan mikro dari lembaga-lembaga sentral (Lofland 2003).

C. Dinamika Protes menjadi Gerakan Sosial

1. Proses Membentuk Organisasi

Demi memantapkan aksi selanjutnya agar menjadi sebuah gerakan sosial dan mencoba mencounter pandangan pihak lain tentang *gerombolan orang-orang bodoh*, maka pada 22 Mei 2013, sejumlah kelompok pemuda sepakat merencanakan membentuk sebuah organisasi dengan maksud menepis pemuda yang menolak disebut *gerombolan orang-orang bodoh*. Maka dibentuklah sebuah paguyuban *SUKA DAMAI* yang beanggotakan pelopor kepemudaan yang tergabung dalam masyarakat tolak pabrik semen.

Ide paguyuban disebut disarankan oleh seorang tokoh agama setempat yang peduli dengan situasi, meskipun dalam perjalanannya menyatakan untuk tidak berpihak baik yang pro pabrik semen maupun yang kontra. Pembuatan paguyuban kembali mendapat tekanan dari pihak pemerintah desa. Dikatakan paguyuban itu ilegal, karena harus ada beberapa syarat di antaranya akta notaris.

Awal paguyuban dibentuk tanpa ada tujuan tertentu. Dalam benak mereka bahwa kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak pabrik semen harus selalu berada dalam satu wadah, satu kesatuan yang terikat satu sama lain. Dari beberapa penjelasan bab sebelumnya bahwa kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial terjadi karena ikatan darah, seide, seprinsip, dan karena faktor lain dengan tujuan yang sama dan tetap pada koridor hukum. Maka, meskipun berbagai tindakan intimidasi yang dilakukan, kelompok masyarakat yang tergabung dalam

gerakan tolak pabrik semen tetap saja santun dan tidak radikal. Karena kemungkinan tujuan awal akan melenceng jika gerakan menjadi radikal. Gusfiled (1970) mengatakan, protes dengan kerusuhan, perlawanan, demonstrasi spontan, dan pemogokan, sering kali melenceng dari agenda dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun secara formal paguyuban *SUKA DAMAI* tidak diakui oleh pemerintah desa, namun secara simbolik paguyuban tetap eksis. Justru kelompok masyarakat semakin memahami bahwa organisasi yang dibentuk tidak harus berbadan hukum, namun secara simbolis menekankan bahwa organisasi bergantung dari tujuan awal, bagaimana konsistensi tujuan bisa dipertahankan, ada anggota yang semakin bertambah, dan ada aksi yang direncanakan. Mereka berpikir bahwa organisasi yang dibuat dengan cara politis, atau untuk tujuan kepentingan tertentu tentu akan melenceng dari apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Maka paguyuban yang dibuat oleh kelompok masyarakat tolak pabrik semen bisa disebut paguyuban tanpa batas, yang dibangun atas dasar solidaritas mekanik, atas dasar kesadaran pendukungnya, tanpa ada niat atau tujuan tertentu.

Bergabungnya paguyuban menjadi JMPPK Rembang, atas dasar solidaritas bersama atas kelompok yang merasa senasib dengan persoalan konflik semen di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu JMPPK Pati, Blora, dan Grobogan. Organisasi semakin kuat, karena bertambahnya dukungan dari berbagai sektor lintas nasional, namun tetap pada substansi primordial, solidaritas mekanik. Sejak saat itu aksi-aksi mulai melebar dari kabupaten ke lingkup nasional.

2. Protes di Kabupaten

Sejak demonstrasi dilakukan dalam lingkup desa, pada 22 Juni 2013, puluhan warga mulai melakukan protes dengan unjuk rasa mendatangi kantor Balai Desa Tegaldowo. Mereka menyuarakan penolakan pabrik semen. Suasana mejadi ricuh karena pihak pemerintah desa tidak menanggapi dengan hal yang positif. Adu mulut terjadi, kemudian beberapa anggota kelompok gerakan mendapat tindakan intimidasi oleh pihak terkait.

Gerakan protes unjuk rasa mulai melebar. Pada 18 September 2013, sekitar ratusan warga Desa Tegaldowo dan sekitarnya yang tergabung dalam kelompok masyarakat tolak tambang JMPPK Rembang, mendatangi kantor DPRD Rembang dengan tuntutan minta sosialisasi dan mendesak

DPRD Rembang untuk turut mendesak Kementerian Kehutanan mencabut surat izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh PT. Semen Indonesia Tbk.

Gerakan protes berikutnya dikarenakan aspirasi masyarakat mengalami *deadlock*. Aksi unjuk rasa dilanjutkan pada 19 Februari 2014. Sekitar hampir seribu orang datang kembali ke kantor DPRD Rembang. Anggota JMPPK Rembang makin bertambah dengan dukungan masyarakat dari wilayah lain ikut terlibat dalam gerakan aksi unjuk rasa. Sebagian besar ibu-ibu terlibat dalam aksi, dengan membawa simbol dan poster tolak pabrik semen, serta mengadakan aksi teatral.

Aksi *longmarch* dimulai dari alun-alun Kota Rembang, bergerak menuju bundaran kota di depan kantor DPRD Rembang. Aksi sempat menjadi ricuh karena tuntutan untuk bertemu dengan ketua DPRD tidak terpenuhi. Aksi *gontok-gontokan* pun terjadi antara demonstran dengan pihak aparat keamanan. Pembacaan tuntutan di antaranya adalah pencabutan dukungan dan persetujuan terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen yang ada di Rembang, serta meninjau kembali konsistensi Perda RT/RW provinsi dan kabupaten yang menyatakan bahwa kawasan Watuputih adalah kawasan cekungan air tanah sebagai kawasan hutan lindung geologi.

Kemudian gerakan berlanjut di Balai Desa Tegaldowo pada keesokan harinya. Acara awal diskusi dengan pihak pemerintah desa, untuk segera menutup jalan tambang yang sering dilalui kendaraan tambang. Sebab, jalan tersebut milik warga dan bukan milik tambang. Dalam diskusi tersebut sekaligus meminta menutup jalur jalan pertambangan dikarenakan kendaraan tambang yang lewat di tengah perkampungan desa mengakibatkan polusi suara dan pencemaran lingkungan. Dialog kembali ricuh karena beberapa pemilik tambang tidak terima dan menyewa beberapa preman untuk membantu mengamankan, bahkan beberapa tokoh penggerak mengalami tindakan intimidasi.

D. Pengusiran Anggota DPRD

Kejadian pengusiran anggota DPRD Rembang terjadi setelah demo unjuk rasa terjadi di depan kantor DPRD Rembang pada tanggal 18 September 2013. DPRD Rembang yang hadir adalah ketua dan wakil ketua dengan bersama camat. Mereka mendatangi warga di Dusun Ngablak Tegaldowo, bermaksud untuk memberikan penerangan tentang pabrik semen.

Kedatangan pejabat kota menyebabkan banyak warga yang datang untuk ikut mendengar apa yang menjadi arahan yang disampaikan. Berawal dari beberapa kalimat yang menyudutkan masyarakat dan menekankan dengan paksaan, banyak warga sekitar yang tidak mersepons positif. Beberapa masyarakat dari lingkungan sekitar secara beramai-ramai mendatangi dengan membawa alat seadanya, untuk mengusir pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Setelah pengusiran anggota DPRD, masyarakat kemudian bergerak menuju ke rumah seorang aparat pemerintahan desa, dengan membawa berbagai jenis alat pukul. Namun, aksi tersebut gagal karena bisa diredam oleh penasihat gerakan.

E. Pemasangan *Plang* sebagai Simbol Tolak Jual Lahan untuk Pabrik Semen

Sekitar Maret 2012, masyarakat yang tergabung dalam kelompok penolak pabrik semen sengaja memasang *plang* atau *patok* (alat yang berbentuk kayu disilang sebagai tanda larangan) di tempat-tempat lahan yang menjadi milik mereka, sebagai maksud simbolisasi tidak akan pernah dijual sampai kapanpun kepada pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. Para warga lebih memilih dunia pertanian yang sudah menjadi identitas mereka sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan bukannya dihilangkan.

Langkah tersebut dilakukan oleh masyarakat sebagai langkah lanjutan dalam bentuk simbolis, menyatakan pendapat dengan simbol-simbol tertentu agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak lain, agar apa yang menjadi tujuan dapat terpenuhi. Aksi pemasangan *plang* atau *patok* dilakukan warga secara bersamaan. Puluhan warga berkumpul dan bergerak ke lahan yang menjadi hak miliknya sebagai bukti bahwa mereka menolak pabrik semen berdiri di wilayah mereka.

Pemasangan simbol-simbol sangat sering dilakukan oleh masyarakat, seperti poster, banner, ataupun dalam bentuk yang lain. Simbol-simbol itu ditempatkan di banyak tempat yang memberikan makna bahwa simbol menjadi senjata bagi masyarakat untuk mempertontokan keeksistensian mereka. Simbol itu juga sebagai tameng terhadap pihak-pihak lain yang mencoba untuk melakukan rayuan, bujukan dan *iming-iming*. Terlihat dalam beberapa kali dalam pembagian sembako yang dilakukan oleh pabrik semen. Masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak semen tidak mau menerimanya atau menolak.

F. Aksi Gerakan Istigasah

Bentuk lain sebagai upaya menolak hadirnya PT. Semen Indonesia Tbk. adalah dengan mengadakan siraman rohani atau istigasah. Aksi tersebut dilakukan atas inisiatif kelompok masyarakat tolak pabrik semen, dengan menghadirkan beberapa tokoh agama Rembang. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk protes dalam tema keagamaan untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaldowo tidak berdasar pada hal yang aneh, namun dilihat dari faktor agama adalah kebenaran.

Aksi keagamaan dilakukan secara beruntun. Pertama, dalam acara pengajian umum di makam Mbah Ronggdito, sebagai *cikal bakal* desa. Hadir ratusan warga dari berbagai desa di wilayah sekitar Desa Tegaldowo, dengan acara istigasah pelestarian alam lingkungan dari kehancuran. Pada 22 Oktober 2013, istigasah dilakukan lagi. Kali ini ditempatkan di lapangan Desa Tegaldowo, dengan dihadiri oleh tokoh agama yang sama.

G. Aksi Pembubaran Pengundian Hadiah

Gerakan semakin masif dan semakin terbuka dalam menentang pabrik semen. Salah satu aksi yang dilakukan adalah pembubaran acara pengundian hadiah lomba jalan sehat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tolak semen pada Oktober 2013. Ketika itu, ratusan orang mendatangi tempat pengundian di lokasi tapak pabrik semen di wilayah kawasan perhutani Mantingan Kecamatan Bulu.

Aksi sempat dihadang oleh beberapa aparat keamanan yang sengaja menghadang untuk menghalau masyarakat. Namun karena kalah jumlah dan masyarakat terus melakukan perlawanan, akhirnya acara tersebut dapat digagalkan. Sesampainya di sana, acara pemberian hadiah yang dihadiri oleh pihak kecamatan digagalkan dengan membongkar paksa panggung dan menghentikan acara. Pihak kecamatan menyatakan untuk memediasi masyarakat dengan pihak pabrik semen. Aksi dapat dipadamkan dan masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

H. Aksi Pemblokiran Jalan di Lokasi Pabrik

Deretan aksi yang dilakukan mencapai puncaknya pada saat pencahangan batu pertama simbol berdirinya pabrik semen. Pada 14 Juni 2014 ratusan masyarakat yang mayoritas ibu-ibu melakukan aksi *long march* dari Desa Tegaldowo menuju lokasi tapak pabrik semen, sambil membawa

poster-poster yang menyatakan penolakan pabrik semen di Rembang.

Blokade yang dilakukan ibu-ibu dengan menghadang kendaraan berat material pabrik yang mau masuk ke lokasi pembangunan. Aksi itu membuat kendaraan berhenti. Aksi sempat memanas dikarenakan beberapa ibu sempat mendapatkan perlakuan kasar dari pihak aparat keamanan. Perlakuan itu tidak mengendorkan semangat, tetapi justru menjadi pemicu semangat bagi yang lain untuk terus melanjutkan aksi.

Setelah aksi pemblokadean jalan menuju pabrik semen, aksi dilakukan dengan membangun tenda-tenda di sekitar jalan masuk pabrik semen. Selama itu, ibu-ibu setiap hari melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara bergantian. Terhitung sejak saat itu, dengan kisaran waktu sekitar tiga kali lebaran, dengan gigih ibu-ibu menduduki tenda-tenda. Aksi dihentikan karena ada pembakaran tenda.

Setelah JMPPK Rembang melakukan gugatan perizinan ke PTUN pada September 2014, masyarakat mencoba melakukan aksi blokade jalan lagi pada November 2014 karena selama menunggu putusan PTUN aktivitas pertambangan diberhentikan. Aksi pemblokadean mendapatkan perlawanan dari pihak pabrik. Warga dipaksa mundur oleh aparat keamanan. Aksi pemblokadean dilakukan dikarenakan pihak pabrik semen tidak menghormati proses hukum yang dilakukan oleh JMPPK Rembang. Aksi yang dilakukan ibu-ibu sempat menahan beberapa kendaraan berat milik proyek dan menahan ratusan pekerja pabrik.

Selama gugatan di PTUN Semarang, JMPPK Rembang dibantu para mahasiswa. Berbagai aksi teaterikal dilakukan sebagai simbol penolakan. Aksi tandingan juga dimeriahkan oleh warga yang pro semen, dengan membawa poster bentuk dukungan kepada pabrik semen.

Pada awal 2015, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memutuskan untuk menolak gugatan yang dilakukan oleh JMPPK Rembang dan WALHI terkait izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah SK Nomor 668.1/17 Tahun 2012, dikarenakan alasan kedaluwarsa.

“Penolakan lebih karena penggugat tidak mengajukan gugatan sejak 90 hari waktu Surat Keputusan Izin Lingkungan itu terbit. Surat Keputusan dari Gubernur terbit tanggal 7 Juni 2012 serta disosialisasikan kepada warga Rembang” (*Kompas*, April 2015).

Meskipun gugatan ditolak oleh Hakim PTUN Semarang kemudian

mendapatkan hal yang sama dari PTUN Surabaya, aksi-aksi gerakan tetap dilanjutkan, sembari menunggu banding yang akan dilakukan oleh JMPPK Rembang, dengan pendamping WALHI. Aksi ibu-ibu tetap tidak meninggalkan tenda sedikitpun. Tindakan itu justru mendapatkan simpati dari berbagai kalangan baik akademisi, politisi, dan seniman dari penjuru tanah air. Simpati masyarakat luas terhadap teaterikal tenda yang dilakukan oleh *sedulur* ibu-ibu sempat didatangi oleh beberapa artis seniman.

Pengajuan Kembali (PK) terhadap putusan Izin Lingkungan Pabrik Semen dengan SK Gubernur Nomor 668.1/17 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung didaftarkan WALHI dan JMPPK Rembang di Pengadilan Tata Usaha Semarang pada April 2016. Aksi PK dibarengi dengan aksi teaterikal di depan Istana Presiden dengan melakukan tindakan *ngecor kaki* yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam JMPPK dari kelompok Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Pengajuan gugatan tentang izin lingkungan hidup ke Mahkamah Agung dimenangkan pihak penggugat dengan keputusan MA No 99 PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016. Berdasar SK MA tersebut, JMPPK Rembang dan WALHI mendesak Gubernur untuk segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang. Desakan berujung pada gerakan aksi *long march* dengan jalan kaki yang dilakukan oleh puluhan warga Desa Tegaldowo menuju kantor Gubernur dengan didampingi oleh warga penggerak lainnya yang menunggu untuk terlibat dalam gerakan.

Desakan yang dilakukan oleh JMPPK Rembang gabungan dengan beberapa elemen, mahasiswa, dan aktivis dari beberapa wilayah, menuntut Gubernur untuk segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia Tbk. dan segera memberhentikan segala bentuk aktivitas pabrik. Selama 30 hari *full day*, masyarakat mendirikan tenda-tenda di depan kantor Gubernur, menunggu apa yang menjadi tuntutananya terpenuhi.

Lelah menunggu, pada tanggal 16 Januari 2017 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017, dalam poin pokok Gubernur tidak mematuhi putusan MA, namun menyelipkan imbuhan yang memberi pengertian agar pihak PT. Semen Indonesia Tbk. menyempurnakan dokumen *addendum* andal dan RKL-RPL dan komisi penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen *addendum* andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016.

Tindakan yang dilakukan oleh Gubernur sudah jelas membuktikan bahwa Gubernur Jawa Tengah sangat mendukung adanya pabrik semen, meskipun berbagai penolakan dilakukan oleh masyarakat. Tindakan Gubernur yang memberikan izin kembali kepada PT. Semen Indonesia Tbk. sangat tidak etis dikarenakan tim independen bentukan Presiden disebut tim KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sedang bekerja dan masih dalam proses menemukan kesimpulan. Hingga kemudian pada pertengahan 2017, dari Tim KLHS menyatakan bahwa Pegunungan Watuputih sebagai kawasan batu alam karst dan tidak boleh ada kegiatan penambangan.

I. Aksi Mendirikan Tenda di Jalan Masuk Pabrik

Setelah aksi pemblokiran jalan menuju lokasi pabrik semen pada puncak aksi pada tanggal 16 Juni 2014, masyarakat penolak pabrik semen mendirikan tenda-tenda kecil di sekitar jalan masuk pabrik semen. Aksi mendirikan tenda adalah bentuk kemogokan masyarakat untuk tetap terus menduduki wilayah pabrik semen, dengan tujuan agar pabrik semen segera ditutup.

Aksi pendirian tenda diikuti dengan pembangunan musala. Setiap malam para ibu bergiliran tidur di tenda, sedangkan para bapak bertugas mengirim bekal. Berdasarkan keputusan bersama, disepakati bahwa untuk memudahkan segala pemenuhan kebutuhan maka mereka membawa alat dapur dan perkakas lainnya untuk keberlangsungan kebutuhan sehari-hari.

Aksi menghuni tenda berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Selama puasa dan lebaran para ibu dan bapak dilaksanakan di tenda perjuangan. Aksi tenda berhenti setelah kejadian pembakaran tenda yang dilakukan oleh oknum. Kejadian tersebut diawali oleh para ibu yang melakukan aksi blokir jalan masuk pabrik semen, sebagai protes bahwa selama menunggu putusan MA maka segala bentuk operasional pabrik harus dihentikan.

Malam harinya, para ibu dipaksa untuk pergi dari jalanan masuk pabrik. Kemudian beberapa oknum melakukan tindakan kesengajaan membakar tenda perjuangan dan musala.

J. Dinamika Gerakan Sosial Masih Berlangsung

Geger Watuputih menjadi perbincangan hangat karena setiap saat selalu menciptakan hal-hal baru dalam setiap aksi yang dilaksanakan.

Pertarungan ide, konsep, hukum dalam setiap perdebatan kemudian berkembang menjadi gugatan, yang hingga kini sementara sedang dikatakan *deadlock*, karena masing-masing memiliki dasar dan pemahaman yang berbeda, memunculkan kegalauan pemerintah, khususnya Presiden.

Baik pihak pabrik semen dan JMPPK Rembang masing-masing masih berpegang pada prinsip kepentingan. Sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari pabrik semen, kelompok masyarakat yang tergabung dalam JMPPK Rembang terus gigih hingga saat ini dan terus melawan jika pabrik semen masih berdiri di lingkungan mereka. Di lain pihak, pabrik semen juga tetap menginginkan agar pabrik bisa beroperasi karena sudah terlanjur dibangun.

Perdebatan panjang tentang persoalan bisa atau tidaknya pabrik semen, bermula dari tidak adanya sosialisasi yang benar. Sosialisasi yang betul-betul dapat dipahami oleh masyarakat adalah sosialisasi yang mengandung substansi secara kompleks. Ibarat menawarkan sebuah produk naik dari sisi kuantitas maupun kualitas harus seimbang. Sebagaimana tuntutan masyarakat sejak awal, protes dan unjuk rasa yang dilakukan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten menuntut adanya sosialisasi, karena selama masa itu meskipun masyarakat bermaksud menanyakan tentang perihal pabrik semen, sosialisasinya kapan, tidak mendapatkan jawaban yang maksimal sehingga membuat masyarakat kecewa. Selama tuntutan tentang sosialisasi tidak dilaksanakan maka gerakan akan terus berjalan dan tidak akan pernah ada matinya.

Dasar kekuatan masyarakat JMPPK Rembang untuk terus melanjutkan gerakan sosial adalah PK dari MA dimenangkan oleh JMPPK, WALHI, YLBHI, dan kajian KLHS, yang pada intinya mengatakan bahwa Pegunungan Watuputih adalah kawasan karst. Dengan demikian, tidak boleh ada kegiatan penambangan baik dalam skala kecil maupun besar. Keputusan Gubernur membuat SK baru yang tetap memperbolehkan izin lingkungan kepada PT. Semen Indonesia Tbk. menuai polemik baru terkait adanya kepentingan pemangku kebijakan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, polemik konflik pabrik semen di Rembang menimbulkan kegalauan pemerintah pusat, khususnya Presiden. Setelah kajian Tim KLHS belum ada tindakan dari Presiden bagaimana terkait dengan pabrik semen—dihentikan atau dilanjutkan. Tentu segala konsekuensi menanti. Berbagai macam penggalangan aksi gerakan sosial, mulai dari intimidasi, pembakaran tenda hingga kriminalisasi

tidak menyurutkan langkah perjuangan dalam menolak pabrik semen di Rembang. Tuntutan agar pabrik semen tutup dan hengkang dari wilayah Rembang terus berlangsung.

BAB 6

DIKOTOMI KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan

Sebagaimana disebut oleh Budiman, di dalam memainkan peran pembangunan pemerintah memiliki fungsi objektif dan subjektif. Fungsi objektif yang harus dijalankan pemerintah berkaitan dengan upaya memberikan keadilan, kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Dengan kata lain, fungsi objektif pemerintah dilihat dari konteks makro, berdasarkan prinsip sebuah sistem besar, di mana sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari sebuah Negara dengan pemerintahannya wajib memenuhi kebutuhan kehidupan setiap individu yang tinggal di dalamnya, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum.

Bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 tentang tujuan Bangsa Indonesia, kemudian tersirat dalam pasal UUD 1945 dari Pasal 28, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah harusnya menjalankan amanat Undang-Undang secara sempurna yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi warga negaranya, dengan menghilangkan kepentingan kelompok ataupun golongan. Kepentingan yang dimaksudkan adalah demi kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat secara universal.

Demi mewujudkan impian bangsa Indonesia, pemerintah selalu mengupayakan semaksimal mungkin, dengan berbagai langkah dan program-program yang dilakukan sejak Orde Baru hingga sekarang. Namun, seiring waktu perjalanannya, dikarenakan pada masa titik jenuh dari sebuah perkembangan, dan/atau mengalami kebuntuan (*stuck*) akibat dari hasil yang bisa dikatakan belum cukup signifikan dari target pembangunan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara makro, justru

pemerintah melakukan *grounded* dengan lebih mengutamakan kepentingan subjektifnya sebagai pelaku ekonomi, diikuti dengan aktor kapitalis lainnya demi mendapatkan keuntungan secara bersama.

Kecenderungan *goal development* daripada *society of development* pemerintah menggunakan *laisses faire* secara sepihak, dengan dalih percepatan kemajuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya berbuah pada ketimpangan dan kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Masyarakat miskin makin tertindas. Keadilan dan kesejahteraan universal masih jauh dari harapan, seperti yang tertulis dalam sejarah konsep pembangunan pada Orde Baru. Keadilan dan kesejahteraan sosial bukannya dilihat dari berbagai konteks, namun pembangunan dilihat dari kuantitas ekonomi, sedangkan kualitas yang lain terabaikan.

Masyarakat pada era awal modernisasi memiliki hubungan layaknya patron klien, sebagai masyarakat makro yang harus tunduk pada kebutuhan makro sistem dari pemerintah, dengan memanfaatkan budaya *inlander*, pribumi yang *ngawulo dhawuh titahing gusti alias sendiko dawuh* menjadi alat yang memiliki daya paksaan terhadap kekuasaan. Kekuatan militer yang diterapkan menjadi sarana untuk memaksa dan menindas bagi yang menentang.

Pada masa Orde Baru, masyarakat lebih cenderung menjadi aktor makro daripada aktor mikro. Masyarakat lebih cenderung patuh pada sistem makro dari pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan fungsi objektifnya, pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dikarenakan lebih cenderung menggunakan pendekatan makro maka yang terjadi kemudian adalah bukan sebagai sistem yang saling berkesinambungan, namun hegemoni atas dasar legitimisasi kekuasaan, dan kekuatan dari sistem besar, sentralisasi dan kebijakan *top down*. Masyarakat sebagai aktor mikro tidak terjaring, bahkan sering terabaikan.

Awal Reformasi disebut sebagai awal masyarakat aktor mikro memulai terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan hak kebebasan berpendapat terbuka lebar, demokrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang menuju substansi demokrasi. Suyahmo (2015) mengatakan bahwa di dalam sebuah Negara dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memiliki asas (1) Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia (2) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Sejak setelah saat itu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok minoritas (mikro) mulai berani bergerak dan berunjuk identitas mengaktualisasikan diri dengan kepentingan akan hak-hak mereka yang selama ini seolah terkurung dalam kekuatan perenialisme yang dipertontonkan oleh pemerintah. Menjadi terbuka setelah masa Reformasi bagi pemerintah adalah sebuah kewajiban sebagai fungsi perlindungan, keadilan dan kesejahteraan secara makro, demi perwujudan kemajuan dari demokrasi untuk lebih peduli terhadap kelompok minoritas.

Meskipun kerangka teoretis menyatakan demikian, namun dalam fakta yang masih menjadi fenomena adalah bayang-bayang atas legitimasi kekuasaan, kekuatan masih menjadi bobot dalam setiap pandangan yang diberikan oleh pemerintah, dengan masih cenderung memilih kuantitas makro daripada kualitas secara universal. Dengan kata lain, pemerintah masih cenderung menggunakan subjektivitas kepentingan kelompok-kelompok tertentu dikarenakan pemerintah adalah produk politik. Perkembangan demokrasi yang seimbang menjadi pertanyaan besar dalam setiap pembangunan yang menjadi syarat pokok perkembangan demokrasi saat ini, yang justru mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri dikarenakan demokrasi seolah menjadi milik aktor makro.

Fungsi Negara di masa setelah Reformasi masih cenderung di bawah bayang-bayang secara makro dengan apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Ia lebih condong ke kuantitas daripada kualitas absolut. Musyawarah sebagai cara dasar yang lebih mengarah pada substansi demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan seolah terbengkalai, bahkan terpinggirkan karena kurangnya kesadaran dari masing-masing. Kesadaran karena kepentingan dan bukan atas dasar kejujuran sering kali ditunjukkan oleh pembuat keputusan, yang menghasilkan keputusan sepihak.

Sejak masyarakat terlibat aktif, terlihat dampak positif dalam dimensi pemerintahan yang demokratis. Masyarakat sudah cukup memahami fungsi objektif sebagai bagian dari demokrasi, yang memiliki hak kebebasan berpendapat dan hak aspirasi. Dengan kata lain, fungsi objektif masyarakat meningkat menandakan bahwa tingkat kesadaran (*civil society*) menjadi meningkat. Untuk mengiringi kondisi sekarang tentunya sangat diperlukan kesadaran dari pemerintah, alat kapitalis, dan aktor kapitalis lain agar memahami sejarah perkembangan dari masyarakat pada umumnya. Pemaksaan dan kuantitas makro harusnya sudah mulai

ditinggalkan, diganti dengan cara baru dalam pendekatan pembangunan yang lebih humanis, dan mengarah pada masyarakat secara umum, seperti perkembangan teoretis yang menjadi dasar sebagai masyarakat sebagai subjek pembangunan (*society as subject of development*).

B. Peran Pemerintah terhadap Konflik

Peran pemerintah terhadap penyelesaian konflik lebih dalam konteks bagaimana menjadi pengelola konflik (*governance*). Peran negara harus mampu menjadi *safet valve* atau penengah dalam menyikapi konflik yang terjadi di dalam masyarakat dan korporasi. *Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mencakup negara dan pemerintahan, namun juga mencakup dua pihak lain, yaitu masyarakat dan swasta. Pemerintah dalam *good governance* memiliki peran terbesar dan struktur pusat dalam jaringan antarpihak, sementara pihak lain memberi masukan kebijakan dari mulai proses perencanaan hingga proses penerapannya. Dalam hubungan tiga akses tersebut, jika terjadi konflik maka peran pemerintah tidak berjalan dengan fungsi juri dan manajer (Prayogo 2011).

Pemerintah harus bisa menjadi juru penengah, yang berfungsi (1) netral, mengupayakan kedua belah pihak yang berkonflik agar bisa mencapai titik temu, kesepakatan sintesis, (2) mengupayakan kedua belah pihak tidak direndahkan harkat dan martabatnya, (3) mengupayakan kedua belah pihak merasa diuntungkan, (4) mengupayakan kedua pihak agar menyadari bahwa hidup itu dinamis, penuh tantangan dan jangan meninggalkan kebersamaan dan kerukunan sebagai penyangga kehidupan sosial.

Pemerintah harusnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, antara masyarakat, pihak pemilik modal dan kepentingan pemerintah sendiri. Tidak serta-merta pemerintah menggunakan kewenangannya demi memenangkan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan pemilik modal atau dengan yang diuntungkan.

C. Sikap dan Pandangan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Konflik Semen di Rembang

Sejak masyarakat Desa Tegaldowo memulai hak aspirasi mereka dengan menanyakan tentang perihal akan adanya pabrik semen, berbagai pandangan baik positif dan negatif muncul dari berbagai pihak pemerintahan atau dalam jajaran struktural sistem besar di wilayah baik

kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan beberapa mereka mengakui akan dampak dari pabrik semen. Namun karena terikat sistem, mereka tidak berani mengemukakan dan lebih memilih untuk loyal terhadap sistem yang membentuknya meski di dalam batin mereka menolak. Kesadaran menerima risiko (*consciousness of risk*) ada pada karakter dalam kelompok masyarakat yang taat pada konsensus dan sewaktu-waktu berada menjadi kelompok yang dinamis dengan alat kesadaran yang mereka miliki (*consciousness of pragmatis*) menjadi kesadaran yang sesungguhnya (*real consciousness*).

Sikap dan pandangan pemerintah yang berbeda pada konflik semen Rembang memberikan makna khusus bahwa, secara umum kesadaran mereka sudah mulai terbangun oleh sejarah. Bagaimana kejadian-kejadian yang sebelumnya menciptakan titik jenuh dari akumulasi peristiwa dari kebisingan dan kerakusan pihak-pihak tertentu. Kondisi itu disebut "*di ambang batas*" dari modernisasi yang selama ini sudah banyak membawa kebaikan dan keburukan, telah membuka hati masyarakat secara umum untuk kembali kepada solidaritas mekanik. Seperti yang digambarkan oleh Durkheim tentang gambaran masyarakat struktural fungsional dalam kerangka siklus Ibnu Kholdun. Jadi, cepat atau lambat masyarakat akan terbentuk dalam satu kesatuan sebuah sistem yang saling terintegrasi, berdasarkan kesadaran fungsi dan kesadaran risiko, atau disebut sistem tanpa batas.

Sejak awal sikap Bupati Rembang pada konflik semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Rembang cenderung diskriminatif pada masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda terhadap pabrik semen Rembang. Ia terkesan berstigma dengan pandangan negatif dengan memberikan stereotip masyarakat pedesaan yang identik dengan kebodohan dan kemiskinan. Bupati Rembang masih berpikir menggunakan paradigma positivistik, behaviouristik yang memandang bahwa masyarakat harus taat dan tunduk pada pemerintah, meskipun ada kata tidak adil dalam konteks makro.

Meskipun pengetahuan informal yang sarat dengan pengalaman, justru lebih dimengerti dan dipahami. Sebab, di dalam substansi pengalaman tersebut terdapat fakta yang ilmiah dan alamiah. Tingkat keaslian dan kebenarannya tidak diragukan lagi. Fakta ilmiah alamiah sangat kecil kemungkinan bersinggungan dengan prinsip hidup dan keyakinan mereka yang berpijak pada kebenaran nyata.

Sikap dan pandangan Bupati Rembang terhadap pabrik semen, dengan mengatakan bahwa di Rembang tidak ada konflik, memberikan pemahaman bahwa Bupati tidak peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat bawah. Ia mengabaikan bagaimana aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaldowo dan sekitarnya hingga melibatkan banyak aktor pendukung, yang betul-betul ingin membuka tabir gelap di antara warga masyarakat dan perusahaan tambang sebelum PT. Semen Indonesia Tbk. tentang dampak lingkungan, tentang konflik pembebasan lahan, dan tentang perilaku pendatang yang selama ini sangat cukup memberikan alasan untuk menolak pabrik semen.

“Dari dulu sampe sekarang di Rembang tidak ada apa-apa. Yang memperlmasalah orang-orang dari luar Rembang. Ibarat sepeda motor, pabrik semen sudah memiliki SIM. Jika sudah punya SIM kok tidak boleh naik sepeda motor, itu ya salah. Perizinan yang sudah diperoleh ibaratnya SIM untuk melakukan kegiatan”. (Suara Muria, 19 November 2014).

Sikap dan pandangan Bupati Rembang juga memberikan preseden buruk bagi pendidikan masyarakat dengan menafikan kebenaran tentang konflik yang terjadi di Rembang. Kebenaran tentang gerakan sosial masyarakat dalam melawan pabrik semen yang sudah menyebar ke dalam lingkup nasional seolah dinafikan dengan kepentingan subjektif dari kelompok-kelompok tertentu, membuang kebenaran minoritas dengan dalih kebenaran milik kelompok makro.

Pendidikan berdasarkan nilai-nilai universal sudah bergeser menjadi alat untuk menggapai nilai-nilai kepentingan. Nilai-nilai praksis dengan menggunakan pola lama cenderung diskriminatif sangat bersinggungan dengan pola modern yang dimiliki oleh masyarakat saat ini.

Para pemuda pemuda penggerak berdialog dengan Bupati Rembang (dulu Plt. Bupati) pertama kali pada 13 September 2013. Pada kesempatan itu, Bupati justru menyudutkan masyarakat penolak pabrik semen. Mereka mengatakan bahwa tanah di sekitar pabrik disebut sebagai lahan yang tandus, kering, dan hal itu sangat berbeda dengan pemikiran masyarakat yang setiap hari menikmati hasil dari lahan mereka sampai saat ini.

“Pemkab tidak melihat mengenai pro dan kontra pabrik semen, namun melihat pada hak dan kewajiban pemerintah. Karena pabrik sudah mengantongi izin, tentu Pemkab harus melaksanakan kewajiban pelayanan. Namun kami juga menghormati hak warga yang menolak” (Suara Muria, 30

November 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Rembang tentang tidak melihat pro dan kontra pabrik semen, menciptakan prasangka yang berbuntut pada pertanyaan ada apa dengan Pemkab Rembang. Adakah *invisible hand* seperti yang dimaksud demi sesuatu kepentingan pribadi atau kelompok? Jelas dari pernyataan tersebut adanya ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebenaran, kejujuran sebagai syarat penting dalam pendidikan.

Sikap terbuka dan terang-terangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya mendukung pabrik semen di Rembang mengintrepretasikan bahwa selama ini Pemkab hanya melihat dari sisi pembangunan ekonomi. Adanya pabrik semen meningkatkan PAD Kabupaten Rembang. Namun, tidak dilihat dalam sisi yang lain, bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi yang seimbang. Peningkatan ekonomi bukan dilihat dari banyaknya pendapatan dari perusahaan tambang, namun juga bisa diambilkan dari sektor lain, pariwisata, pertanian, perkebunan, pengelolaan hasil alam, dan sebagainya.

Pemerintah kabupaten tidak memedulikan bagaimana kerusakan alam yang terjadi di Rembang. Dampak dari liberalisasi lahan tambang yang sudah beralih milik dari seorang petani ke pemilik kapitalis *ngawur*, bagaimana Rembang disebut sebagai wilayah dengan krisis alam hebat, dari mulai Rembang Utara hingga Rembang selatan mengalami krisis ekologi tersebut. Ironi, Rembang yang kaya sumber daya alam tidak didukung oleh pengelolaan karena sangat minimnya pendidikan dan rendahnya sumber daya manusia.

Sikap pemerintah daerah lebih dominan menggunakan hak pribadinya (dikresi) dalam membuat kesimpulan, yang cenderung subjektif berdasar pada kepentingan individu personal daripada individu seorang pemimpin regional dalam suatu wilayah. Midgal (1988) menyebutkan bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai perubahan-perubahan di masyarakat memerlukan peran pemimpin untuk mengupayakan membuat perencanaan Negara (*state planning*), kebijakan publik (*policies*) dan tindakan aksi (*actions*). Termasuk juga kemampuan untuk melibatkan masyarakat (*to penetrate*), mengatur hubungan sosial (*social relationship*) dan pengelolaan sumber daya secara baik (*good governance of natural resources*).

Pendekatan pemerintah Rembang dalam kasus pabrik semen masih menggunakan pendekatan klasik dalam sebuah tataran demokrasi politik. Pemerintah Rembang bertindak sebagai *rent seeker*, yang dominan pada kebutuhan dan ekonomi semata, otoritarianisme, dan tidak berpihak kepada sosial budaya lingkungan.

D. Sikap Pemerintah Provinsi terhadap Konflik Semen Rembang

Reaksi pemerintah Kabupaten Rembang seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jateng yaitu mengeluarkan izin lingkungan diberikan kepada PT. Semen Indonesia Tbk. pada tahun 2012, dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juni 2012.

Reaksi masyarakat terhadap pabrik semen yang akan berdiri dan berjalan di wilayah mereka menggugah kesadaran mereka terhadap pandangan perusahaan tambang yang sudah ada sejak 20 tahun terakhir yang menimbulkan banyak dampak, baik dari lingkungan, sosial ekonomi dan budaya. Izin terhadap pabrik semen dalam skala besar memberikan persoalan baru bagi warga sekitar yang terkena dampaknya. Spontan, mereka konsisten menolak.

Konsistensi menolak kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan memberikan izin lingkungan kepada pabrik semen di Rembang dirasa telah bersinggungan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Sejak gugatan dilakukan, bermacam dialektika dinyatakan oleh Gubernur Jateng. Dari awal dinyatakan jika gugatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaldowo menang maka izin lingkungan akan dicabut. Beberapa bulan kemudian setelah gugatan nyata dimenangkan oleh JMPPK Rembang dalam keputusan MA No 99 PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016, Gubernur menciptakan dialektika dengan mencabut izin lama dan membuat *addendum* baru terkait dengan kelengkapan atas dokumen agar pihak PT. Semen Indonesia Tbk. menyempurnakan dokumen *addendum* amdal dan RKL-RPL dan komisi penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen *addendum* andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016.

Dialektika yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah sejak saat aksi gugatan terhadap izin lingkungan yang diberikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juni 2012 hingga kemudian sampai terciptanya *addendum* yang dibuat atas dasar Surat keputusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016, merupakan tindakan yang tidak etis karena seolah mempermainkan *legitimasi* kekuasaan yang ada pada saat ini. Dengan sengaja mereka membuat celah baru dengan maksud operasional pabrik semen tetap berjalan di Rembang Jawa Tengah. Dialektika apa lagi yang akan dilakukan setelah muncul kajian KLHS bentukan Presiden dalam menyingkapi polemik konflik pabrik semen di Rembang? (Suharko, 2016).

Sikap pemerintah provinsi terhadap pabrik semen Rembang dengan menggunakan hak diskresi dalam menerbitkan surat keputusan baru dengan mengizinkan pabrik semen untuk beroperasi kembali, memberikan interpretasi bahwa seorang pemimpin provinsi atau gubernur tidak mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun sedikit lebih baik daripada pemerintah Rembang dan lebih beretika dalam menanggapi keluhan masyarakat, namun pada dasarnya hal tersebut dianggap sama, karena lebih berpihak kepada korporasi.

E. Sikap dan Pandangan Pemerintah Pusat terhadap Konflik Pabrik Semen Rembang

Kendeng geger dari tahun 2009 hingga sekarang dikarenakan perbedaan pandangan dari kelompok masyarakat dengan pemangku kebijakan. Kebijakan ditentang oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan faktor lingkungan dan koeksistensi pertanian yang merupakan mata pencaharian masyarakat sehari-hari dan dianggap sebagai pertahanan dari negara agraris yang menjadi pilar pokok negara.

Perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan provinsi rupanya tidak menggetarkan pemerintah pusat untuk lebih menelaah dan mendalami konflik pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Sejak *geger* pabrik semen Rembang Presiden membentuk tim khusus tim Kajian Khusus Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang bertujuan untuk meluruskan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perdebatan.

Beberapa hal yang dimaksudkan tentang kondisi lingkungan adalah terkait dengan ANDAL (analisis dampak lingkungan) yang dibuat oleh pabrik semen sarat dengan kepentingan. Dalam proses pembuatannya dianggap tidak berdasar pada realitas sengaja menghilangkan unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Dokumen ANDAL harusnya menjadi dokumen privasi dalam sebuah kelembagaan, namun justru dalam kasus pabrik semen dokumen tersebut menjadi komoditas publik.

Kajian KLHS menentukan tentang kelangsungan perusahaan pertambangan yang akan berdiri di wilayah Pegunungan Kendeng dan Rembang. Kajian KLHS yang pertama sudah dilakukan dan memiliki asumsi terhadap keberlangsungan pegunungan Watuputih sebagai kawasan karst dan tidak layak untuk ditambang. Kajian KLHS memiliki peran yang penting dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh Presiden dalam menyingkapi keberlanjutan pabrik semen di Rembang.

BAB 7

GERAKAN SOSIAL PERKOTAAN

A. Gerakan Sosial

Macions (1999) menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movements*) adalah aktivitas yang diorganisasikan dan ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Senada dengan Macions, Spencer (1982), menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru.

Locher (2002) berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, bergabung secara bersama sama untuk mendapatkan beberapa hal, yakni perubahan sosial. Greene (2002) menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movements*) adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional.

Klandermans dalam Quah (2000), menyitir pendapat Tarrow bahwa gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan, dan pihak yang berwenang. Sementara Stolley (2005) berpendapat bahwa gerakan sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan menentang *status quo*, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Gerakan sosial adalah membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha usaha dengan mempertahankan suatu gerakan.

Menurut Szomptka (2004) gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Dalam Pruitt dan Rubin (2009), tindakan kolektif berhubungan dengan pembentukan kelompok-kelompok

pejuang. Kelompok yang terbentuk atas dasar persamaan persepsi, keinginan dan tujuan. Dahrendrof dalam Pruitt dan Rubin (2009) mengatakan bahwa munculnya kelompok-kelompok pejuang disebabkan oleh: (1) Komunikasi terus-menerus di antara orang senasib, (2) Adanya seorang pemimpin yang membantu artikulasi ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan menyusun rencana untuk melakukan tindakan kelompok, (3) legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.

Menurut Singh (2001), gerakan sosial adalah mobilisasi massa untuk menentang negara dengan sistem pemerintahannya, dengan tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga-lembaga yang setiap kemunculannya didasari oleh adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan dalam kasus ketimpangan, dominasi, kebebasan, dan keadilan sosial.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sidey Tarrow (1998), mengatakan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama melawan kelompok elite dan penguasa. Berdasarkan pendapat Tarrow dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial meliputi (1) adanya pertentangan/perlawanan terhadap elite, otoritas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, (2) gerakan didasari oleh solidaritas dan identitas kolektif, (3) adanya tujuan kolektif gerakan sosial.

Pandangan Lofland (2003:25) tentang konsep gerakan sosial yang meliputi 5 poin pokok: (1) Lahirnya organisasi baru kekerasan atau protes baru dengan semangat independen, (2) Bertambahnya jumlah aksi kekerasan dan atau protes baik terencana maupun tidak terencana secara cepat, (3) Kebangkitan opini massa, (4) Ditujukan kepada oknum lembaga sentral, (5) Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur makro dan atau mikro dari lembaga sentral.

Berdasarkan konsep definisi berbagai tentang gerakan sosial, maka kasus konflik semen di Rembang termasuk dalam kerangka gerakan sosial, karena mencakup beberapa aspek, di antaranya (1) Terbentuknya organisasi

kelompok JMPPK Rembang, (2) Semakin bertambahnya keanggotaan dalam organisasi, dengan melibatkan berbagai tokoh-tokoh baik dari kalangan nasional maupun internasional, (3) Membangun opini dan memobilisasi massa dengan menggunakan e-media, (4) Gerakan ditujukan kepada pemerintah (*status quo*), (5) Memiliki tujuan bersama sebagai upaya menciptakan perubahan sosial.

1. Bentuk dan Tipologi Gerakan Sosial

Bentuk gerakan sosial dalam konteks global menurut Moghadam (2009), gerakan perempuan dan jaringan feminis transnasional (*the global woman's movement and transnational feminist networks*), gerakan dan jaringan Islam transnasional (*transnational islamist movements and networks*), gerakan ketidakadilan global (*the global justice movements*). Dilihat dari perkembangannya, studi gerakan sosial tentang sebab-sebab gerakan sosial meliputi faktor ekonomi, politik, budaya dan geografis, mendorong terjadinya peningkatan mobilitas global dalam aspek kapital (*capital*), manusia (*people*), organisasi (*organization*), gerakan (*movements*), dan ide-ide (*ideas*). Perkembangan tentang isu yang diperjuangkan meliputi hak buruh (*labor rights*), hak asasi manusia (*human rights*), hak perempuan (*women rights*), dan perlindungan lingkungan (*environmental protection*).

Di Indonesia, bentuk-bentuk gerakan sosial lebih banyak diarahkan kepada bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat dan kelompok-kelompok marginal sebagai reaksi terhadap bentuk dominasi dan hegemoni yang dilakukan oleh negara. Terdapat tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu kekuasaan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri, *political power*, *economic power*, dan *social power*.

2. Tipologi Gerakan Sosial menurut Rajendra Singh

a. Tipe Klasik

Gerakan sosial klasik dilatarbelakangi oleh pertentangan ideologi kapitalis dan Marxis. Faktor pendorong gerakan tipe klasik adalah dominasi para pemilik modal (kelas borjuis) atas kaum buruh (kelas proletariat). Dominasi melahirkan kemiskinan, kesengsaraan bagi kaum buruh. Tokoh gerakan ini adalah Karl Marx, dengan sasaran akhir adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas. Aktornya adalah para pekerja industri dan petani atau disebut kelas ekonomi tertentu. Fokus gerakan ini adalah ekonomi politik. Struktur kapitalis telah melahirkan konflik kelas.

b. Tipe Neo-Klasik

Gerakan sosial tipe neo-klasik disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan yang melahirkan ketegangan struktural. Ketimpangan terjadi karena ada dominasi dari salah satu pihak yang menimbulkan ketagangan dalam status dan perasaan terpinggirkan (*deprivacy relative*). Isu gerakan adalah harga diri, revitalisasi, dan munculnya *Ratu Adil*. Metode gerakan dengan aksi kolektif atau pengerahan massa.

Ngadisah (2003) menyebut bahwa aktor gerakan neo-klasik adalah Talcott Parson dan Smelser. Adapun ciri gerakan neo-klasik dijelaskan; (1) Berada dalam kerangka dialektik Marxis, yang dielaborasi dalam formasi kelas, historis materialistis dan materialisme deterministik, (2) Gerakan dilandasi oleh rangsangan-rangsangan emosional, seperti; kegelisahan, kegembiraan, stres, dan ketergantungan, sehingga melahirkan perilaku spontan, (3) Ada nuansa politis, karena ada unsur perlawanan terhadap kelas tertentu, (4) Aktor yang melibatkan diri dalam gerakan bukan orang-orang yang secara subjektif kekurangan.

c. Tipe Gerakan Sosial Baru (*New Sosial Movement*)

Ciri gerakan sosial baru menurut Singh (2001) antara lain: (1) Tidak mengikatkan diri pada ideologi tertentu, (2) Bersifat transnasional, (3) Menghasilkan *ends*, (4) Aktor yang berperan berasal dari *grassroot* segala segmen, (5) Menolak pendekatan *collective behavior*, (6) Organisasi dan komunikasi canggih, (7) Melawan diskriminasi.

Sasaran perjuangannya adalah membangun *civil society*. Faktor pendorong utama adalah kontrol atau campur tangan negara terlalu besar. Isu gerakan adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), pelestarian lingkungan, demokrasi, anti institusi, anti nasionalisme, gender, egalitarian, perdamaian, dll.

3. Tipologi Gerakan Sosial menurut Situmorang

Situmorang (2014), membagi tipe gerakan berdasarkan perkembangan teori, (1) Teori gerakan sosial klasik, (2) Teori gerakan sosial modern. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori Gerakan Sosial Klasik, ciri-ciri gerakan sosial klasik dalam pendekatan teoretis menggunakan kajian dua teori, yaitu teori perilaku kolektif dan teori pilihan rasional, teori perjuangan kelas, Vanguard, dan hegemoni budaya.

- b. Teori Gerakan Sosial Modern, teori gerakan sosial modern berkembang pada era 1960-an. Teori ini ditandai dengan ditransformasikannya teori gerakan sosial klasik menjadi lebih modern dengan mempergunakan teori-teori yang telah dikembangkan oleh para akademisi. Beberapa teori yang dipakai untuk mendeskripsikan gerakan sosial modern seperti; teori keluhan, teori struktur kesempatan politik, teori struktur mobilisasi sumber daya, teori *framing process*, teori *reportaire*, teori *contentious politics*.

Menurut Situmorang (2013:24) karakteristik gerakan sosial modern adalah sebagai berikut: (1) aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif, (2) teori keluhan lebih cocok untuk menggambarkan mengenai konsep gerakan sosial modern, (3) semakin banyaknya studi tentang pergerakan sosial yang membawa efek atau dampak pada perkembangan riset dan penelitian mengenai teori pergerakan sosial, (4) teori pergerakan sosial menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemahnya, dan berhasil tidaknya gerakan sosial tersebut.

Konflik dan gerakan sosial pada kasus pabrik semen di Rembang tidak dalam membicarakan sebuah teori baru, karena teori yang belum matang akan menjadi prematur. Konflik hanya sebatas menemukan varian baru dalam studi gerakan sosial yang ada di dalam ruang lingkup tertentu.

B. Gerakan Sosial Perkotaan

Gerakan sosial baru perkotaan (*urban social movement*) adalah bentuk gerakan sosial baru yang dikategorisasikan berdasarkan struktur masyarakat Indonesia yang dalam Furnival disebut sebagai masyarakat majemuk. Nasikun (2014) dalam buku *Sistem Sosial di Indonesia*, mengatakan bahwa perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan (*cosmopolitan*), adalah jika masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang yang berpendidikan, relatif kaya, penuh aspirasi dan semangat, individualistik namun berbeda dengan gambaran masyarakat desa adalah sekelompok orang yang kurang berpendidikan, melarat, kurang bergairah, serta tidak berdaya, *guyub rukun*.

Gerakan sosial baru perkotaan adalah varian baru dalam studi gerakan sosial. Masyarakat perkotaan sebagai refleksi dari *civil society*, memunculkan bentuk baru dalam strategi gerakan sosial. Gerakan sosial menjadi sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru pelosok dunia dengan bantuan media sosial. Masyarakat perkotaan memanfaatkan teknologi

informasi terancang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atau aktor aktor lain sebagai bentuk dari mobilisasi secara virtual.

Tampak dalam kehidupan nyata bahwa masyarakat pedesaan yang sangat otodidak dalam *memahami* teknologi lebih cenderung mengamini dan mempergunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Pengalaman-pengalaman merekonstruksi pemikiran dari masyarakat klasik menuju masyarakat modern.

Beberapa argumen dari gerakan sosial perkotaan yang menjadi perbedaan dari beberapa gerakan sebelumnya, yaitu Gerakan Sosial Pedesaan dalam penelitian Ngadisah tentang Konflik dan Gerakan Sosial Politik di Papua, dan Gerakan Sosial Baru dalam penelitian Victor Silaen dalam kasus PT. Newmont Indranayon di Toba Samosir, adalah sebagai berikut.

- a. Tidak dominan kepentingan politik ekonomi semata, melainkan kepentingan sosial budaya dan lingkungan.
- b. Tokoh agama bukan sebagai pemimpin gerakan seperti halnya dalam gerakan Imam Mahdi, tetapi hanya sebagai tokoh di balik layar, yang memiliki fungsi spirit dan magis.
- c. Menggunakan berbagai media virtual dalam upaya mobilisasi massa, dan mencari dukungan transnasional.
- d. Menggunakan taktik perempuan sebagai garda terdepan, yang menambah daya *gedor* gerakan sosial.
- e. Memiliki tingkat konsistensi dan organisasi yang militan.
- f. Mengembangkan isu isu global dengan memanfaatkan demokrasi politik yang terbuka.
- g. Menampilkan ideologi pluralisme.
- h. Memiliki sistem keanggotaan yang sangat terbuka.
- i. Menciptakan gerakan nirkekerasan.
- j. Mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keyakinan identitas, yang dipengaruhi oleh pandangan tokoh agama, dan tokoh akademik yang saling bertentangan dan bertolak belakang.

BAB 8

PEMBANGUNAN YANG BERBUDAYA INDONESIA

A. Stagnasi Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan di masa sekarang masih didominasi oleh kepentingan ekonomi yang dijadikan instrumen politik oleh kelompok tertentu. Hal ini berakibat pada stagnasi paradigma pembangunan yang disebut mengalami kemunduran orientasinya. Keberadaan paradigma yang jauh tertinggal dari pemikiran di masa sekarang digeneralisasikan sebagai kegagalan pembangunan dikarenakan tidak bisa mengontrol kekuatan ekonomi yang berjalan secara progresif. Dampaknya adalah pembangunan tidak sejalan dan tidak seimbang dengan sosial budaya dan lingkungan. Paksaan menjadi hal yang teknis atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Sejak berdirinya pembangunan pertambangan di wilayah Pegunungan Watuputih, progresivitas pembangunan yang masif menciptakan berbagai persoalan sosial budaya dan lingkungan yang nyata, dan merugikan masyarakat. Bagaimana proses kecurangan dengan cara mengelabui masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh oknum demi mendapatkan keuntungan ekonomi, lingkungan rusak dan menyebabkan polusi, menjadi persepsi yang menjadi pengetahuan dengan menyatakan bahwa pembangunan masih berpihak kepada korporasi atau pemilik modal.

Meskipun pada kenyataannya sebagian masyarakat menikmati hasil dari pembangunan, hal itu tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan baik dari alam maupun nilai-nilai kemasyarakatan. Pembangunan yang berdampak pada sosial budaya sudah disampaikan oleh Kartodjirjo (1988) yang menyatakan bahwa tidaklah bisa hanya dilihat dari pengaruh ekonomi semata, dalam setiap pembangunan hendaknya memperhatikan sosial budaya masyarakatnya. Sosial budaya sudah seharusnya menjadi tujuan dalam setiap pembangunan, dikarenakan benturan budaya menyebabkan

konflik makin parah dan lama untuk di selesaikan.

Ngadisah (2003) memperhatikan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat Papua dikarenakan PT. Freeport tidak memperhatikan dengan benar apa sosial budaya masyarakat Papua. Benturan budaya modern dengan budaya lokal yang masih menggunakan ketradisionalannya belum bisa menerima secara utuh berdampak pada konflik yang berkepanjangan, dan masih menyisakan dendam hingga sekarang. Meskipun dari luarnya terlihat tampak aman, namun tidaklah dalam batinnya.

PT. Semen Indonesia Tbk. harusnya membuka sejarah lama, tentang kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat di wilayah Pegunungan Watuputih. Sejarah tersebut menjadi acuan langkah-langkah yang dilakukan ke depannya. Secara keseluruhan dinyatakan bahwa masyarakat tidak menolak adanya pabrik semen, karena proses yang dilakukan oleh agen kurang benar maka sekecil apa pun gangguan pasti akan menghambat proses pembangunan.

B. Pembangunan berbasis Nila-Nilai budaya Indonesia

Pembangunan adalah bentuk budaya lama yang menyisakan luka yang cukup mendalam bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan sumber daya alam yang melimpah. Pembangunan yang memiliki nilai progresif bergerak tanpa batas berdampak terhadap benturan yang sangat tajam dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan pada khususnya.

Nilai progresivitas pembangunan sangat bertentangan dengan dunia sosial masyarakat yang masih tetap mengharapkan ideologi ketradisionalan untuk tetap dipertahankan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Ngadisah yang menyatakan bahwa konflik pembangunan di Papua terjadi dikarenakan adanya benturan nilai progresivitas dengan nilai budaya daerah sekitar. Benturan nilai tersebut berlangsung sangat keras sehingga menciptakan konflik semakin tajam dan keras.

Sebagaimana benturan yang terjadi di daerah Pegunungan Watuputih Gunem Tegaldowo antara perbedaan pemahaman masyarakat sekitar tentang pembangunan sangatlah berbeda. Sebagian masyarakat menginginkan nilai ketradisionalan tetap terjaga. Di sisi lain ingin mereduksi nilai tersebut dan beralih pada dunia instanisasi buah proses pembangunan yang justru di dalamnya menyuguhkan dialog otokrasi dari pembangunan itu sendiri.

Nilai otokrasi pembangunan yang diterapkan menjadi dilema di negara yang sangat kental dan sangat beragam akan kebudayaan seperti di Indonesia. Bagaimana gambaran adat istiadat dan budaya yang sudah menjadi ideologi masyarakat secara umum, dan umurnya sudah sangat jauh melampaui batas ruang sisi dari manusia itu sendiri, yang akan sulit diubah hanya dalam beberapa dekade saja. Nilai pembangunan dipandang sudah menjadi sesat dikarenakan tidak memedulikan sosial budaya dan lingkungan.

Keberagaman budaya Indonesia harusnya menjadi dorongan utama untuk membuktikan bahwa pembangunan mampu menjadi irama yang indah dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pembangunan harus mengingat sejarah bagaimana Walisongo membangun budaya dan menyandingkannya dengan agama, bagaimana Sunan Kalijaga mampu menjadi daya pikat tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas Hindu sehingga berangsur memilik Islam untuk menjadi panduan hidup mereka.

Ki Hajar Dewantara selalu mendengungkan tentang kebudayaan Indonesia yang memiliki makna filosofis sangat tinggi dan harusnya mampu menjadi ideologi yang nyata dalam kehidupan. Namun bagi sebagian masyarakat masih belum bisa menjawab hal tersebut. Akhirnya pembangunan pun jauh dari nilai keberadaban yang telah membangun negeri ini sebelumnya.

Beberapa hal tersebut masih mendasari kata pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan masih dalam konteks dominan kuantitas. Bagaimana ekonomi dan keberampilan di muka masih menjadi ikon sosial yang memiliki nilai sangat tinggi di masyarakat, sementara nilai kualitas semakin direduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrome, N. Hill, S. & B. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad. E, 2014. *Anatomi konflik kegiatan eksplorasi pertambangan PT. Cahaya Manunggal Abadi (PT. CMA) Di Kawasan Pertambangan Emas Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. Tesis UGM.
- Amnah , 2006. *Konflik Kegiatan Penambangan Bahan Galian C*. tesis UGM. **Diterbitkan**
- Arbuansyah, 2008. *Konflik pertanahan: Kasus perluasan areal tambang PT. Adaro Indonesia di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong*. Tesis UGM.
- Arikunto**, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Atkinson**, Mirrian & M. E. Mulrnnan. 2009. *Local Protest and Resistance to the Rupert Diversion*, Northern Quebec. *Atic*, Vol. 62, No. 4 (Dec.2009), pp. 468–480.
- Awang**, San Afri. 2005. *Negara, Masyarakat dan Deforestasi; Kontruksi Sosial Atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Disertasi UGM.
- Bainton** and Macintyre. 2013. *My Land My Work: Business Development and Large Scale Mining In Papua New Guniea*. in Fiona Mccormack, Kate Barclay (ed.) *Engaging with Capitalism: Cases from Oceania (Research in Economic Anthropology, Volume 33)* Emerald Group Publishing Limited, pp. 139–165.
- Bank, J.A. 1972. *The Sociology Of Social Movement*. London. The Mcmillan Press Ltd.
- Benford, Robert D. & David A. Snow**. 2000. *Framing Process And Social Movements: An Overview and Assesment*. *Annual Review Of Sociology*, Vol. 26, pp. 611–639.
- Bevington**, D. & C. Dixon. 2005. *Movement-Relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism*. *Social Movements studies*, Vol. 36, No. 3 (Dec, 2005), p. 185–208.

- Budiman, A. 1991. *Negara dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Padi Kapas.
- Budiman, A. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Bury, Kolf, 2002. *Livelihoods, Mining and Peasant Protests in The Peruvian Andes*. Department of Geography and Human Environmental Sciences San Fransisco State University. Journal of Latin American Geography, Vol 1 No 1 pp. 3–16.
- Chanddhoke, Neera. 2007. *New Social Movements Theories*. The Sociological Quarterly, Vol. 36, No. 3. pp. 441–464.
- Coser, Lewis. 1964. *The Function of Social Conflict*. New York: The Press, A Division of McMillan Publishing, Co. Inc.
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, 2nd ed*. Thousand Oaks, CA. Sage Publication.
- _____. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahendrof, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Societyz, Stanford, Stanford University Press*.
- _____. 1986. *Konflik Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Krtitik, Terjemahan Alimandan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Della Porta, D. 2008. *Research on Social Movements and Political Violence*. Published Online: 15 July 2008. Springer + Business Media, LLC.
- Dermawan, Triwibowo. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. LP3ES Jakarta.
- Devuyt, dan Maria FJ, 2011. *CSR and Development: a Mining in Africa*. Journal of Management Development, Vol 30 ISS 10 pp 955-967.
- Dvorakova, V. 2008. *Civil Society and Social Movements in Latin America and Central and Eastern Europe: A omparative Approach*. Ten Mund, Fortaleza. Vol. 4, No. 7, pp. 334–115.
- Fakih, M. 2005. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, M. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Finn, Donovan. 2009. *Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities?* (Dissertation). Champaign-Urbana: University of Illinois.

Fisher, Simon dkk. 2000. *Manajemen Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.

Ganibay, et al. 2011. *Unequal Partners, Unequal Exchange: Gold Corp, The Mexican State and Compesino Dispossession at The Penesquito Goldmine*. Journal of Latin American Geography, Vol 10 No. 2 pp. 153–176.

Gannibay. C, et al. 2011. *Unequal Partners, Unequal Exchange: Gold Corp, The Mexican State, and Compression Dispasion at The Penequito Goldmine*. Journal of Asian Studies Volume 95 Issue 01 pp. 59–80.

Giddens, A. 2007. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern dalam Suatu Analisis Karya Tulis Mark, Durkeim, dan Max weber*. Jakarta, Universitas Indonesia Press (UI-Press).

Greene, S. 2002. *Sociology and you*. Glencoe: McGraw-Hill.

Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. Princestone. NJ: Princeston UP.

Hadiwinata, Bob. S. 2005. *Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Vol. 9, No. 1. hlm. 1–22.

Hasibuan, 2011. *Gerakan Perlawanan Masyarakat Lokal: (Studi Tentang Perlawanan Masyarakat Bangun Purba Dalam Mempertahankan Hak-hak Ulayat Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)*. Tesis UGM.

Helen. 2016. *Negara, rakyat dan perusahaan*. Tesis UGM **Diterbitkan**.

Holden dan Jacobson. 2008. *Civil Society Opposition to Nonferrous Metals Mining in Guatemala*. Voluntas: International of Voluntary and Nonprofit Organization, Vol 19 No 4 pp. 325–350.

Hollander, J.A. & R.L. Einwohner. 2004. *Conceptualizing Resistance, Sociology forum*, Vol 19, No. 4 (December 2004), pp. 533–554.

Hollander, Jocelyn A. & Rachel L. Einwohner. 2004. *Conceptualizing Reisistance*. Sociological Forum, Vol. 19, No. 4. Pp. 533–554.

Jaya, La Ode M. Rusdin. 2005. *Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap Negara: Studi Perlawanan Masyarakat Kontu Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*. Tesis UGM.

Jenkins, J. C. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements*. Annual Review of sociology, Vol. 9, pp. 527–553.

- Kartodirjo, S. 1984. *Pemberotakan Petani Banten*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Klandermans, Bert & Jackie Smith. 2002. *Survey Research: A Case For Comparative Designs*. Di Dalam Bert Klandermans Dan Suzanne Staggenborg. *Methods Of Social Movements*. Minneapolis: University Of Minnesota Press.
- Klandermans, Bert, Jose Manuel Sabucedo, Mauro rodrigues dan marga de Weerd. 2002. *Identity Process in Collective Action Participation: Farmers Identity and Farmers Protest in the Netherland and Spain*. *Political Psycology*, Vol. 23, No. 2, pp. 235–251.
- Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: social-Psychological Expansion fo Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, Vol. 49, No. 5, pp. 583–600.
- Klandermans, Bert. 1993. *A Tehoritical Framework for Comparison of Social Movement Participation*. *Sociological Forum*, Vol. 8, No. 3, pp. 383–402.
- Kristeva, S. 2015. *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo. 1994. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- . 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kustanto, dkk. 2012. *Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri*.
- Kornblurn, William. 2003. *Sociologi in the Changing World (6th Edition)*. USA: Wardsmoth/Thompson Learning.
- Lanndsberger, Henry A, Alexandrov. 1981. *Pergolakan petani dan perubahan sosial*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Locher, Stella R. & Sales A. 2000. *The International Handbook of Socioligy*. London: Sage Publication Ltd.
- Lofland, Jhon. 1985. *Protest: Studies Fo Collective Behavior And Social Movements*. New Brunswick: Transaction Book.
- Lofland, Jhon. 1996. *Social Movements Organization, (Guide To Research On Insurgent Realities*. New York: Aldine De Gruyter.
- Manalu, Dimpos. 2006. *Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik: Studi Terhadap Gerakan Perlawanan Masyarakat Dalam Mengubah Kebijakan Pemerintah Mengenai PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea Sumatera Utara*. Tesis UGM.

Maruf, R.K. 2017. *Strategi Perlawanan Gerakan Masyarakat ; Studi Kasus Forum Komunikasi Tinalah (FKMT) Dalam Merespon Rencana Pembangunan Waduk Tinalah Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo*. Tesis UGM.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow & Charles Tilly. 2001. *Dynamics Of Contention*. New York: Cambridge University Press.

McCarthy, J.D. & M.N. Zald. 1977. *Resource Mobilization and social Movements: A Partial Theory*. American Journal of Sociology, Vol 82, No.6, pp. 1212–1241.

Moghadam, V. 2009. *Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and The Global Justice Movements*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.

Moleong, L. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oetami. 1997. *Industry, Kerusakan Lingkungan dan Resistensi Petani: (Studi Kasus perlawanan Petani Tambak di Pesusuruan Jawa Timur)*. Tesis UGM.

Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. London: Routledge.

Patilima, H. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Polanyi, K. 1988. *Ekonomi Sebagai Proses Sosial, dalam Evers; Teori Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor.

Polleta Francesca & James M. Jasper. 2001. *Collective Identity and Social Movements*. Annual Review of sociology, Vol. 27, pp. 283–305.

Poloma, M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Popkin, L. 1996. *Petani Rasional*. Jakarta, Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.

Pratiwi, S.T. 2016. *Gerakan Masyarakat Adat Melawan Perusahaan Sawit di Jambi: Kisah Perjuangan Suku Anak Dalam Batin Sembilan Di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari*. Tesis UGM.

Press release – UN General Assembly’s Open Working Group proposes sustainable development goals” (PDF). *Sustainabledevelopment.un.org*. 19 July 2014. Retrieved 2016-10-18.

Purba, J. 2002. *Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Pengelolaan*

Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor.

- Regadon**. 2009. *CSR as a Tool to Fight Against Poverty: the case of Mauritius*, *Social Responsibility Journal*, Vol 5 ISSI pp. 19–33.
- Robert, B.R.** 1990. *Peasant and Poletarians*. *Annual Review of Sociology*, Vol 16 pp. 353–377.
- Rostamin. 2013. *Strategi Perlawanan Petani Lahan Pantai Menolak Penambangan Pasir di Kulon Progo*. Tesis UGM.
- Sadli, Sarpinah**. 1984. “Persepsi Sosial mengenai perilaku menyimpang”. *Desertasi* tidak di publikasikan. PPS UI.
- Salim, Agus (peny)**. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Schellenberg**, James A. 1982. *The Science Of Conflict* (Oxford University Press). New York Press.
- School, J.W.M.** 1980. *Modernisasi Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Terjemahan Soekardijo. Jakarta: Gramedia.
- Schrijvers, Joke**. 2000. *Kekerasan Pembangunan: Pilihan Untuk Kaum Intelektual*. Jakarta. Kalyanamitra & Media Pressindo.
- Schroback, P. Louisa C, Sean P.** 2014. *Socio Economic Determinants for Industry Development: The Case of Australians Sydney Rock Oyster Industry*.
- Schutz, Aaron. 2004. *Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism*. *Educational Researcher*, Vol. 33, No. 1, pp. 15–33.
- Scott, J.** 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sethi**, et al. 2011. *Freeport-Mc. Morran Copper & Gold, Inc; An Innovative Voluntry Code of Conduct to Protect Human Rights, Create employment Opportunities and Economic Development of the Indigenous People*. *Journal of Business Ethics*, Vol 103 No 1 pp. 1–30.
- Setiawan, Bonnie**. 1999. *Peralihan Ke Kapitalisme Dunia Ke Tiga*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
- Silaen Victor**, 2006. *Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal Pada Kasus Indranayon Di Toba Samosir*. Jogjakarta: IRE Press.
- Simmel, Goerge**. 1950 *The sociology of Goerge Simmel*. Gloncoe, Free Press.

Simons, H. 2009. *Case Study research in Practice*. London, Sage Publication.

Singh, Rejendra. 2001. *Social Movement Old And New A Post Modernist Critique*. New Delhi/Thosand Ook/London, Sage Publication.

Sirashi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat Jawa 1912-1926*. Jakarta Grafiti.

Situmorang, 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan, Yogyakarta Pustaka Pelajar*.

Situmorang, 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Smelser,Neil, J. 1976. *Theory of Collectibe Behaviour*, (Routlage and Kegan Paul Ltd, London.

Soenyono. 2008. *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan: Political Opportunity, mobilizing Structure, dan Cultural Framing*. Surabaya: Insan Cendekia.

Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali Press

Soetomo. 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Press

Spencer,M. 1982. *Foundations of Modern sociology*. New jersey: Prentice Hall Inc.

Stolley,K.S. 2005. *The Basic of Sociology*. Westport: Greenwood Press.

Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ke Tiga*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 1997. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung, Alfabeta.

Suharko, 2013. *Karst: Di Tambang atau di Lestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan Semen di Pati Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Vol 17, no 2, (101-206).

Suharko, 2016. *Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016*. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Volume 20, Nomor 2, November 2016 (97-116)

Suharko, 2006. *Gerakan Sosial*. Jakarta. Seri Modul Simpul Demokrasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Suhendar, Endang & Yohanna Budi Winarni. 1997. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung, Akatiga.

Sukamto. 2012. *Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan Sosial Korban*

Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo. Ringkasan Disertasi: PPS Unair Surabaya.

- Sukmana, Osman, 2016. *Gerakan Sosial Korban Lumpur Lapindo dalam melawan dominasi Negara dan korporasi*. Disertasi UGM.
- Suliadi, 2015. *Dinamika Resistensi Petani Terhadap Ekonomi Kapitalisme di Jawa ; Studi Atas Perlawanan Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Karangwuni Kulon Progo*. Tesis UGM Diterbitkan.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Social*. Jakarta Gramedia, Pustaka Pelajar.
- Suratno**, G. 2004. *Analisis mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada. Universiti Press.
- Susetiawan, 2000. *Konflik Sosial dalam Kajian Sosiologis Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara Industri*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutaryo. 1992. *Dinamika Masyarakat Dalam Prespektif Konflik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Suyahmo**. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Syafran, 2016. *Konflik Pertanahan Dalam Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi UGM.
- Tarrow**, Sidney. 1998. *Power In Movement*. Cambridge University Press, New York, USA.
- Tarrow, Sidney. 2008. *Charles Tilly and the Practice of Contentinous Politics*. Social Movements Studies, Vol. 7, No. 3, pp. 225-246.
- Turner, Jonathan, H. 1989. *Theory Building in Sociology, Assesing Theoretical Cumulation*, (Newburg Park London, New Delhi).
- Weber, Max**. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Surabaya; Pustaka Prometheus.
- Widyanta, AB**. 2002. *Problem Modernitas Dalam Kerangka Kebudayaan Goerge Simmel*, (Kata Pengantar: St. Sunardi) Kerjasama Yayasan Adhikarya Ikapi Dan Ford Foundation. Yogyakarta Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wuisman,J.J.M**. 1996. *Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Jilid I, asas Asas*, Penyunting M. Hisyam. Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Yurida Tungga Dewi, 2006. *Konflik Antara Masyarakat Local Dengan Perusahaan Tambang Asing (Studi Kasus Teluk Buyat Dan PT. Newmont Minahasa Raya)*. Tesis UGM Diterbitkan.

Zeitlin, Irving, M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi, (Terjemahan Ashore Dan Juanda)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

----- . 2015. *Rembang Melawan; Membongkar Fantasi Pertambangan Semen Di Pegunungan Kendeng*. Editor: Dwi Cipta & Hendra Try Ardiyanto. Yogyakarta, LiterasiPress

Artikel koran

Musthafa. A.II. 2014. *Pemkab Rembang Isyaratkan Dukung Pabrik Semen*. Suara Muria. 10 November,

Wibowo, A.M. 2014. *Semua Pihak Diminta Menghormati Hukum Polemik Pabrik Semen*. Suara Muria . 30 November,

Dokumen Negara

UUD 1945 Pasal 3 ayat 28 huruf E

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Republik Indonesia. Nomor:12 Tahun 2012. Tentang. Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah replaced UU Nomor 32 Tahun 2004

TENTANG PENULIS



Sidik Puryanto lahir di Rembang, 03 juli 1978, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah Indonesia. Penulis adalah dosen di lingkungan FKIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Jawa Timur. Pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Kanjuruhan Malang pada program Pascasarjana. Riwayat pendidikan penulis adalah S1 Bahasa Inggris di IKIP PGRI Tuban Jawa Timur, S2 Pendidikan IPS di Kanjuruhan Malang, dan S3 Pendidikan IPS di Universitas Negeri Semarang. Selain itu, ia juga sebagai Dosen Terbang di Universitas Kanjuruhan Malang pada S2 PIPS.



Didi Susanto lahir di Kotabesi, 01 Mei 1984, Kecamatan Kotabesi Sampit Kalimantan Tengah. Penulis adalah dosen di lingkungan FKIP Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari S1 jurusan administrasi Negara di UNISKA dan lulus tahun 2009, lanjut S2 di Ilmu Komunikasi lulus tahun 2011, dan Pendidikan IPS lulus tahun 2013. Sekarang penulis adalah mahasiswa doktoral di Universitas Negeri Semarang program Pendidikan IPS.